



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH *UNCONDITIONAL GRANTS* DAN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP
BELANJA PEMERINTAH DAERAH: STUDI EMPIRIS
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan
studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia

**Sampurna Budi Utama
NPM 0706181145**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH**

**JAKARTA
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sampurna Budi Utama

NPM : 0706181145

Tanda Tangan : 

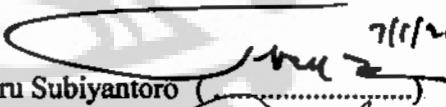
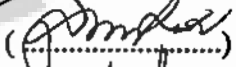
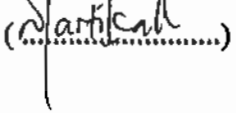
Tanggal : Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Sampurna Budi Utama
NPM : 0706181145
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Pengaruh *Unconditional Grants* dan
Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja
Pemerintah Daerah: Studi Empiris Kabupaten/Kota
di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Pembimbing : Prof. Dr. Heru Subiyantoro ()
Penguji : Arindra A. Zainal, Ph.D ()
Penguji : DR. Sartika Djamaluddin ()

Ditetapkan di: Salemba

Tanggal :

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas ijin dan karunia-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan studi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Melalui tesis ini yang berjudul “Analisis Pengaruh *Unconditional Grants* dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Indonesia“, penulis ingin menuangkan segenap daya dalam sebuah penelitian mengenai penerapan desentralisasi fiskal. Harapan penulis semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bidang perencanaan anggaran daerah dan perumusan kebijakan desentralisasi fiskal serta pihak-pihak lain yang berminat pada kajian ekonomi publik. Penulis juga berharap tesis ini dapat memberikan inspirasi bagi penelitian yang terkait di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Secara khusus, penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada:

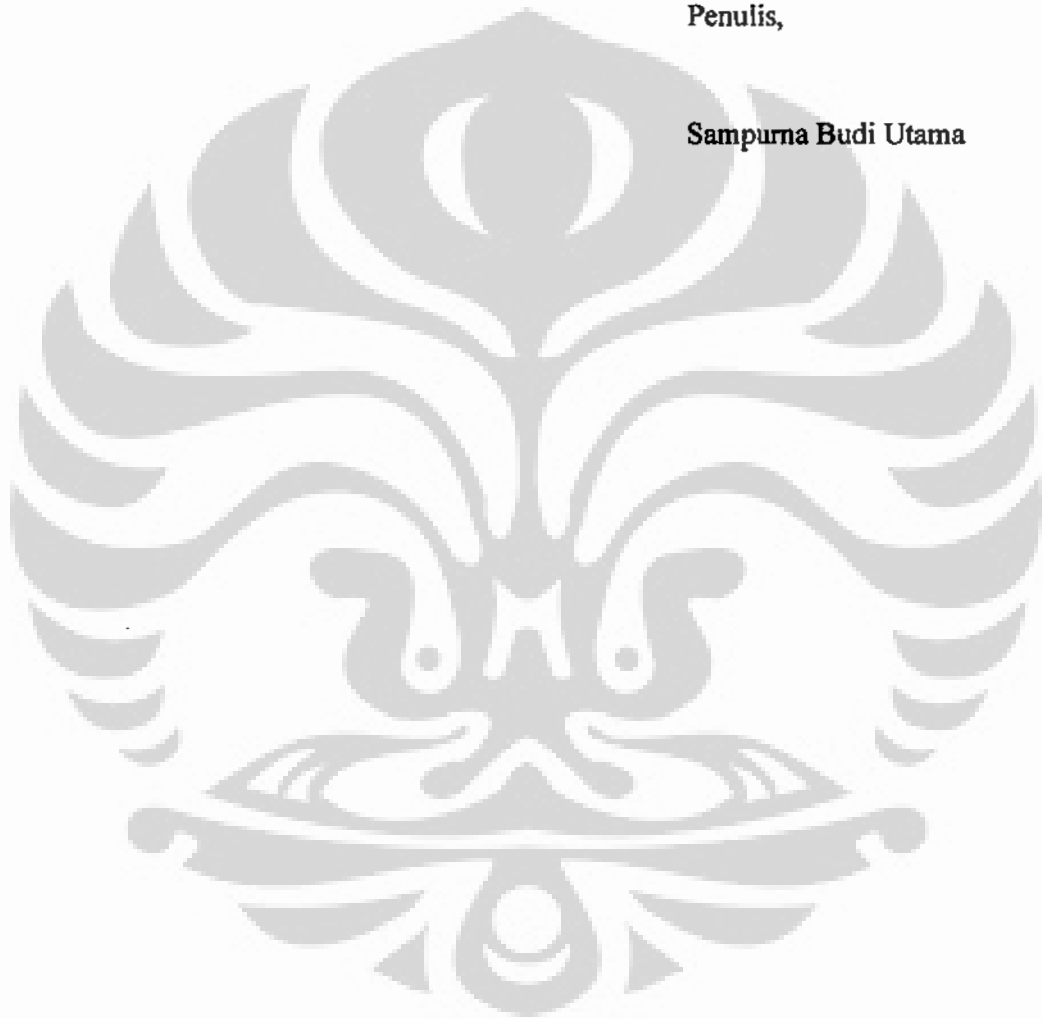
1. Bapak Prof. Dr. Heru Subiyantoro, selaku dosen pembimbing tesis, yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan yang bermanfaat bagi penulis.
2. Bapak Arindra A. Zainal, Ph.D dan Bapak DR. Andi Fahmi Lubis keduanya selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
3. Istriku tercinta Nur Aisyah Kustiani, Ak. M.si. yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan moril.
4. Anak-Anak penulis: Ishmah Karima Jamil, Nushayba Najmina, Aynun Ramadhani Fajriah dan Darren Aisha yang menjadi penyejuk mata dan harapan penulis.
5. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca untuk kemajuan penulis di masa yang akan datang sangat dinanti.

Jakarta, Januari 2010

Penulis,

Sampurna Budi Utama



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sampurna Budi Utama
NPM : 0706181145
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Pasca Sarjana
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Pengaruh *Unconditional Grants* dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Indonesia”

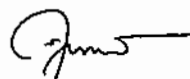
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: Januari 2010

Yang menyatakan



(Sampurna Budi Utama)

ABSTRACT

Name : Sampurna Budi Utama
Study Program: Master of Planning and Public Policy
Title :

An Analysis of the Influence of Unconditional Grants and Gross Regional Domestic Product of the Local Government Expenditure: An Empirical Study of District/City in Indonesia

One of the important objectives of the decentralization implementation in Indonesia is to create efficiency in the provision of public goods and services through the role shifting of public decision-making to the lowest level of government that has the most complete information so that the allocation of more productive resources can be created. For that reason, the delegation of authority from the higher government to the lower government is needed to carry out spending, taxation and levy in which the authority of local governments, and provide assistance in the form of transfer from central government to local government.

This research aims to reveal whether the intentions of the decentralization implementation can be achieved. To prove it, this study tested whether the phenomenon of flypaper effect is found in the use of transfer funds from central government in the form of unconditional grants, which indicates that local governments have behaved not prudently.

Data used in this research are secondary data which are collected in a cross section from BPS and the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, including PDRB data based on the current price, local expenditure, and unconditional grants for the observation period of 2003-2006. The data are processed econometrically. Objects of the observation are 135 districts/cities in Indonesia that have complete data and do not get expansion during the period of observation.

The finding of this research shows that there is a flypaper effect phenomenon that illustrates the behavior of local (district/city) governments in Indonesia, which is asymmetrical in relation to the use of transfer funds in the form of unconditional grants. Its found that for each additional 1 rupiah of unconditional grants, local governments will respond in the form of the increase of local expenditure by 0,887 rupiah and for each additional 1 rupiah of PDRB, local government expenditure will increase by 0,006 rupiah. The flypaper effect indicate not prudently in the use of grants from central government by local governments.

Keywords: fiscal decentralization, local expenditure, PDRB, unconditional grants, flypaper effect

ABSTRAKSI

Nama : Sampurna Budi Utama
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul :

Analisis Pengaruh *Unconditional Grants* dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Indonesia

Salah satu tujuan penting dari penerapan desentralisasi di Indonesia adalah untuk menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap sehingga alokasi sumber daya secara lebih produktif dapat tercipta. Untuk itu diperlukan pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah, serta pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pusat kepada pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan mengungkap apakah maksud dari penerapan desentralisasi tersebut dapat dicapai? Untuk membuktikan hal tersebut, penelitian ini menguji apakah dalam penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat berupa *unconditional grants* ditemukan fenomena *flypaper effect* yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah berperilaku secara tidak hati-hati.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa *data panel* yang dikumpulkan dari BPS dan Ditjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, meliputi data PDRB berdasarkan harga berlaku, belanja daerah, dan *unconditional grants* untuk periode pengamatan tahun anggaran 2003 hingga 2006. Data diolah secara ekonometri. Objek observasi adalah 135 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dan tidak mengalami pemekaran selama periode pengamatan.

Hasil penelitian ini menemukan adanya fenomena *flypaper effect* yang menunjukkan perilaku pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang bersifat asimetris dalam kaitannya dengan penggunaan dana transfer dalam bentuk *unconditional grants*. Untuk setiap tambahan 1 rupiah *unconditional grants*, pemerintah kabupaten/kota akan merespon dalam bentuk kenaikan belanja daerah sebesar 0,887 rupiah dan setiap tambahan 1 rupiah PDRB akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,006 rupiah. *Flypaper effect* menunjukkan terjadinya indikasi ketidakhati-hatian dalam menggunakan sumber daya berupa *grants* dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, belanja daerah, PDRB, *unconditional grants*, *flypaper effect*

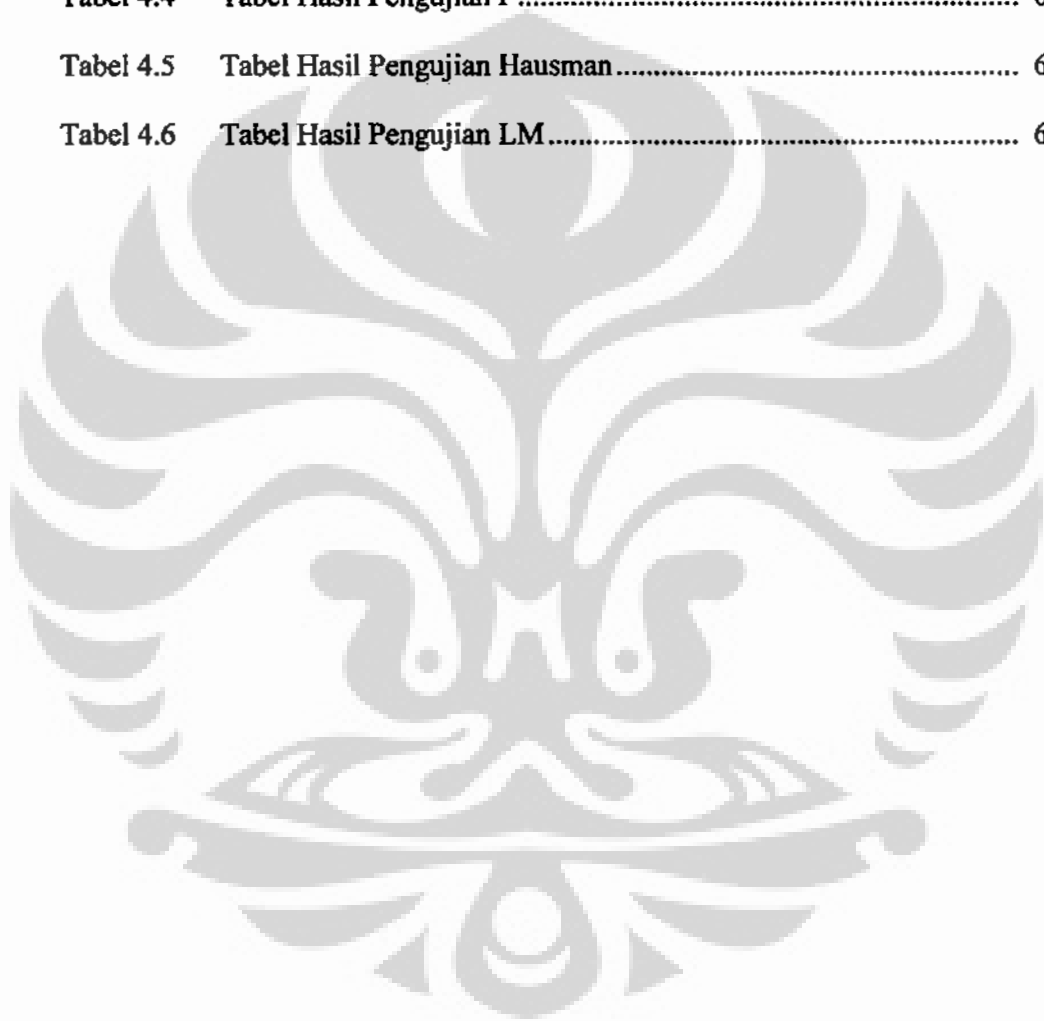
DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vii
Abstraks.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah.....	8
1.3 Tujuan Studi	8
1.4 Lingkup Studi.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
2 KAJIAN LITERATUR.....	13
2.1 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	13
2.1.1 Pengertian dan Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	14
2.1.2 Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal	14
2.1.3 Dana Perimbangan.....	17
2.1.3.1 Dana Bagi Hasil.....	18
2.1.3.2 Dana Alokasi Umum	18
2.1.3.3 Dana Alokasi Khusus	19
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	20
2.2.1 Pengertian APBD.....	20
2.2.2 Pendapatan Daerah	20
2.2.3 Belanja Daerah	21
2.3 Pajak dan Retribusi Daerah	22
2.4 Hasil Studi Terdahulu.....	25
2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis yang Melandasi Penyusunan Model	28
2.5.1 Flypaper Effect	28
2.5.1.1 Pengertian dan Konsep Flypaper Effect	28
2.5.1.2 Pendapatan Daerah Regional Bruto	33
2.5.1.3 Unconditional Grants.....	34
3 METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Kerangka Umum	41
3.2 Spesifikasi Model	43
3.2.1 Pengaruh Unconditional Grants Terhadap Belanja Daerah.....	43
3.2.2 Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah	44
3.2.3 Pengujian Flypaper Effect	44
3.3 Populasi, Sampel dan Metode Pemilihan Sampel	46
3.4 Data	48
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian	48

3.6	Teknis Analisis Regresi Data Panel	49
3.6.1	Metode Estimasi Regresi Data Panel.....	52
3.6.1.1	Model Common Effect	52
3.6.1.2	Model Fixed Effect	53
3.6.1.3	Model Random Effect	53
3.7	Pengujian Signifikansi Model Regresi Data Panel	54
3.7.1	Pengujian Signifikansi Fixed Effects	55
3.7.2	Pengujian Signifikansi Random Effects	56
3.7.3	Pengujian Hausman	56
3.8	Pemilihan Estimator dengan Struktur Varian-Kovarian Residual	57
3.8.1	Pemilihan Estimator dengan Uji LM	57
3.8.1	Pemilihan Estimator dengan Uji Lambda LM	58
4	ANALISIS HASIL PENELITIAN	59
4.1	Data	59
4.2	Hasil Pengujian Estimasi Data Panel	59
4.2.1	Hasil Pengujian Pendekatan Estimasi Common Effect	60
4.2.2	Hasil Pengujian Pendekatan Estimasi Individual Effect	61
4.2.3	Hasil Uji F	64
4.2.4	Hasil Uji Hausman.....	65
4.2.5	Pengujian Struktur Varian-Kovarian Residual	67
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
5	SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN SERTA IMPLIKASI KEBIJAKAN.....	78
5.1	Simpulan	78
5.1	Keterbatasan Penelitian dan Saran	79
5.2	Implikasi Kebijakan.....	80
	Daftar Referensi.....	81
	Lampiran	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Perkembangan Transfer ke Daerah.....	6
Tabel 4.1	Tabel Hasil Pengujian Pendekatan Common Effect.....	61
Tabel 4.2	Tabel Hasil Pengujian Pendekatan Fixed Effect	62
Tabel 4.3	Tabel Hasil Pengujian Pendekatan Random Effect	63
Tabel 4.4	Tabel Hasil Pengujian F.....	64
Tabel 4.5	Tabel Hasil Pengujian Hausman.....	66
Tabel 4.6	Tabel Hasil Pengujian LM.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Perkembangan Belanja Transfer Pusat ke Daerah.....	5
Gambar 2.1	Types Intergovernmental Grants.....	35
Gambar 2.2	Grafik Kondisi Awal Tanpa <i>Grants</i>	36
Gambar 2.3	Grafik Kondisi Setelah Diterima <i>Matching Grants</i>	37
Gambar 2.4	Grafik Kondisi Setelah Diterima <i>Unconditional Grants</i>	39
Gambar 3.1	Kerangka Berfikir Pengembangan Model	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Belanja	87
Lampiran 2 : Data PDRB	91
Lampiran 3 : Data Unconditional Grants.....	94
Lampiran 4 : Output Pendekatan Commont Effect.....	98
Lampiran 5 : Output Pendekatan Fixed Effect	99
Lampiran 6 : Output Pendekatan Random Effect.....	105
Lampiran 7 : Output Uji F	111
Lampiran 8 : Output Uji Hausman.....	113
Lampiran 9 : Output Model Akhir	115
Lampiran 10: Output Hasil Uji Dengan Menggunakan Data Cross-Section	121
Lampiran 11: Output Hasil Uji Dengan Menggunakan Variabel PAD (Data Cross-Section).....	130
Lampiran 12: Output Hasil Uji Dengan Menggunakan Variabel PAD (Data Panel)	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan perubahan yang sangat strategis dalam sejarah Indonesia. Perubahan ini merupakan respon terhadap perkembangan keadaan yang begitu dinamis baik di dalam negeri, berupa tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah, maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global sehingga dipandang perlu untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Menurut Mardiasmo (2002), tuntutan tersebut dinilai wajar berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, merujuk pada praktik pengalaman di masa lalu dimana sistem sentralisasi yang diterapkan di Indonesia menyebabkan intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang terlalu besar telah menyebabkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Arah dan *statutory requirement* yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut mengakibatkan inisiatif dan prakarsa daerah menjadi mati. Sebagai dampaknya, pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Alasan kedua, tuntutan pemberian otonomi tersebut muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan di masa yang akan datang.

Sementara itu, Yustika (2008) mengemukakan bahwa tuntutan adanya sebuah model desentralisasi muncul karena dua alasan utama. Pertama, secara substantif wilayah Indonesia yang begitu luas dengan jumlah penduduk yang besar, beragam, dan aspirasi politik yang berlainan menyebabkan sangat sulit untuk dikelola dengan model sentralistik. Alasan kedua berhubungan dengan perubahan politik yang sangat cepat pada awal

reformasi menyebabkan apa saja yang dianggap sebagai warisan Orde Baru, termasuk di dalamnya kekuasaan yang sentralistik, harus dirubah dan digantikan dengan model baru. Alasan kedua ini kemudian dikenal sebagai "big bang" model desentralisasi di Indonesia.

Menurut Ter-Minassian (1997), banyak negara melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi publik.

Penelitian Tim Peneliti Fisipol UGM yang dikutip dalam Bapekki (2006) menemukan alasan mengapa Desentralisasi menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia. Beberapa alasan tersebut adalah:

1. semakin langkanya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan;
2. mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan;
3. banyak sumber pendapatan daerah yang besar dikelola oleh pemerintah tingkat provinsi bahkan pungutan pada level pemerintah propinsi lebih besar daripada subsidi yang diberikan kepada kabupaten dan kota.

Pemberian kewenangan (baik desentralisasi maupun dekonsentrasi) diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal-hal tersebut direalisasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budiono (dalam Sidik et al, 2002) menjelaskan bahwa tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah.

Bird dan Vaillancourt (1998) mengisyaratkan ada dua prasyarat penting bagi kesuksesan desentralisasi, terlepas dari keseimbangan makro atau efisiensi mikro, yaitu: pertama, proses pengambilan keputusan di

daerah harus demokratis dan kedua, biaya-biaya dari pengambilan keputusan tersebut sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat.

Dalam prakteknya di Indonesia, desentralisasi diwujudkan melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak yang menjadi kewenangan daerah, pembentukan Dewan yang dipilih oleh rakyat, serta pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Selain itu, pelaksanaan desentralisasi juga diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari Pusat. Dengan kata lain, merujuk pada pengertian desentralisasi menurut Litvack (1999), Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi dalam bentuk desentralisasi administrasi, desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal.

Pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditujukan untuk membantu membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya pembagian kewenangan/fungsi dimaksud. Pengaturan hubungan keuangan ini harus dilakukan secara lebih adil, proporsional, dan akuntabel sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada, baik dari dana desentralisasi, maupun dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Dengan demikian, dana-dana tersebut secara selaras dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendanai kebutuhan pengeluaran yang menjadi kewenangan daerah (Departemen Keuangan, 2008).

Pemerintah Indonesia memberlakukan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 melalui pengundangan Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dipandu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29/2002.

Seiring dengan reformasi manajemen Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang Keuangan Negara,

UU No. 22 Tahun 1999 telah diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan penyelenggaraan tugas Pemerintah daerah dan DPRD bersumber dari keuangan daerah yang dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

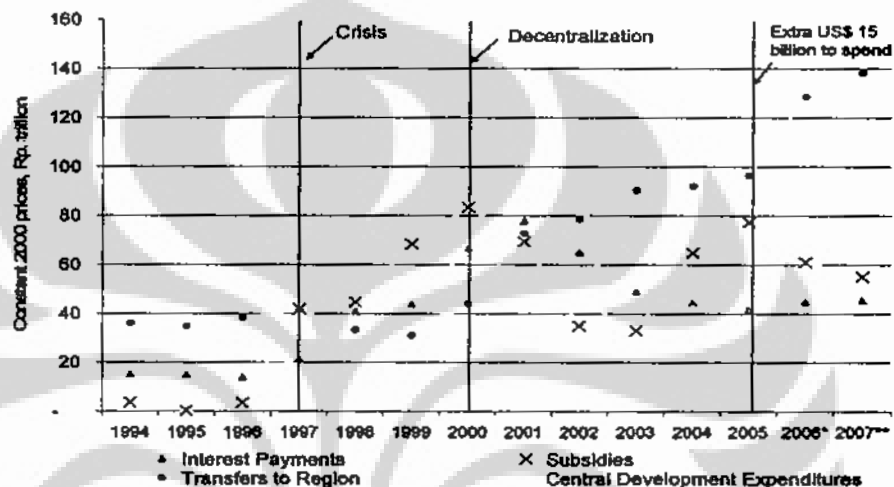
UU No. 25 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, selanjutnya menjelaskan mengenai dasar-dasar pembiayaan daerah merupakan akibat dari penyerahan dan pelimpahan wewenang Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pusat kepada Bupati/Walikota yang diikuti dengan pembiayaannya. Dengan demikian, untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian Daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sedangkan, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Penerapan kebijakan Otonomi daerah mengakibatkan kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang lebih mengerti dan memahami kebutuhan daerahnya diharapkan akan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, dan melaporkan penggunaan dana tersebut secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik.

Perkembangan belanja transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk periode tahun 1994 hingga tahun 2007 (angka sementara) ditunjukkan dalam tabel I.1. Dalam tabel tersebut terlihat terjadinya lonjakan dana transfer secara signifikan pada tahun 2001 yang menandai tahun pertama penerapan secara resmi kebijakan otonomi daerah dalam koridor UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999. Lonjakan

dana transfer juga terjadi pada tahun 2006 sebagai dampak dari kebijakan menaikkan harga BBM dalam negeri sehingga memperbesar kebutuhan belanja pemerintah daerah yang didanai dari APBN melalui dana perimbangan.

Grafik 1.1
Perkembangan Belanja Transfer Pusat ke Daerah
Untuk periode tahun 1994-2007



Sumber: Raksaka Mahi (2008).

Tujuan transfer seperti ini adalah untuk mengurangi, kalau tidak mungkin menghilangkan, kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002).

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi keuangan negara telah membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskal yang cukup dramatis. Saat ini, sekitar 40% alokasi dalam APBN merupakan dana transfer Pusat ke Pemerintah daerah dalam bentuk Dana Perimbangan. Alokasi transfer ke daerah dapat dilihat pada Tabel I.2.

Nota Keuangan dan RAPBN 2009 menunjukkan, sejalan dengan peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan, realisasi DBH (termasuk pengalihan DAK DR ke dalam DBH SDA Kehutanan) menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari Rp20,7 triliun (1,2 persen

terhadap PDB) dalam tahun 2001 menjadi Rp62,9 triliun (1,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp78,9 triliun (1,7 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, atau rata-rata tumbuh 21,0 persen per tahun.

Selain DBH, peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun juga terjadi pada DAU, terkait dengan meningkatnya rasio alokasi DAU terhadap penerimaan dalam negeri (PDN) neto, dari 25 persen dalam periode 2001-2003, menjadi 25,5 persen dalam periode tahun 2004-2005, dan kemudian menjadi 26,0 persen dalam periode tahun 2006-2008. Sejalan dengan peningkatan rasio DAU terhadap PDN neto tersebut, maka dalam rentang waktu 2001-2008, realisasi DAU meningkat dari Rp60,3 triliun (3,6persen terhadap PDB) dalam tahun 2001, menjadi Rp64,8 triliun (4,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp79,5 triliun (3,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2008 atau rata-rata tumbuh sebesar 16,9 persen per tahun.

Tabel 1.1
Perkembangan Transfer ke Daerah
Tahun 2001-2008 (dalam miliar rupiah)

Uraian	Realisasi APBN							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
1. Dana Perimbangan	81.054,4	94.658,6	111.070,4	122.867,6	143.221,3	222.120,6	243.967,2	279.587,8
a. DBH	20.708,6	25.497,2	31.369,5	37.900,8	50.479,2	64.900,3	62.942,0	78.858,6
b. DAU	60.345,8	69.159,4	76.977,9	82.130,9	88.765,4	145.664,2	164.787,4	179.507,1
c. DAK	-	-	2.723,0	2.835,9	3.976,7	11.556,1	16.237,8	21.202,1
2. Dana Otsus & Penyesuaian	0,0	4.722,5	1.539,6	9.243,9	7.242,6	4.049,4	9.296,0	13.966,7
a. Dana Otsus	-	3.547,5	1.539,6	1.539,6	1.775,3	3.488,3	4.045,7	7.510,3
b. Dana Penyesuaian	-	1.175,0	2.372,5	7.704,3	5.467,3	561,1	5.250,3	6.476,4

Catatan: Sejak tahun 2001-2005, DBH termasuk DAK DR

*data 2008 merupakan perkiraan realisasi

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2009.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Saat ini tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah (1) memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan (2) memiliki ketergantungan kepada bantuan Pusat yang seminimal mungkin (Halim, 2001). Oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber pendanaan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian, isu tentang kemampuan fiskal merupakan permasalahan yang bersifat penting dan strategis mengingat tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat berbanding terbalik dengan tingkat perolehan PAD.

Berkaitan dengan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) tersebut, mengemuka tuntutan agar daerah diberikan kemampuan memungut perpajakan (*taxing power*) yang lebih besar yang memungkinkan Pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar sehingga tidak lagi bergantung kepada dana transfer dari Pusat. Diharapkan, melalui pemberian kemampuan memungut perpajakan yang lebih besar ini kemandirian fiskal Pemerintah daerah dapat diciptakan. Namun demikian, kreativitas Pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD harus memperhatikan koridor peraturan perundangan yang berlaku. Sebab kreativitas yang berlebihan dan tidak terkontrol dalam meningkatkan PAD dapat menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi yang merugikan masyarakat dan dunia usaha (Sidik, 2002). Kekhawatiran bahwa pemberian kemampuan memungut perpajakan yang lebih besar apabila dilakukan tidak secara hati-hati dan bijaksana dapat menciptakan ekonomi biaya tinggi dan berbenturan serta tumpang tindih dengan kepentingan Pusat patut mendapat perhatian.

1.2 Masalah

Sumber dana Pemerintah daerah sebagian besar masih bertumpu pada transfer dari Pusat untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah daerah yang tercantum dalam APBD. Transfer yang akan diterima Pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi Pemerintah daerah dalam menggunakan sumber dana tersebut, selain pengaruh dari sumber pendapatan lainnya.

Perilaku pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang dimilikinya, baik dari transfer maupun dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah sendiri, merupakan objek yang telah diteliti untuk dijelaskan oleh beberapa peneliti dengan berbagai pendekatan. Pemerintah daerah bisa merespon transfer dari Pusat secara simetris dan tidak simetris. Beberapa peneliti, sebagaimana dipaparkan dalam bab II, menjelaskan respon belanja pemerintah daerah sebagai *flypaper effect*.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis merumuskan masalah penelitian dalam konteks pengalaman di Indonesia sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai proksi pendapatan daerah, dan transfer dana dari Pusat dalam bentuk *unconditional grants* terhadap belanja daerah?
2. Apakah pengaruh *unconditional grants* terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PDRB yang mengindikasikan terjadinya *flypaper effect* berkenaan dengan kebijakan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Studi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PDRB dan transfer dana dari Pusat dalam bentuk *unconditional grants* berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah melalui pengujian secara serentak menggunakan sampel kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk membuktikan apakah terdapat perilaku yang bersifat asimetris dari pemerintah daerah sehubungan dengan transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Salah satu

pertimbangan dari penerapan desentralisasi fiskal menurut perspektif kepentingan ekonomi adalah sebagai upaya menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik. Menurut Litvack et al (1998) dalam BPPK (2006), mengutip argumen yang dikemukakan oleh Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Weingast (1995) dan Breton (1996), menyatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimun, dengan alasan:

1. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya.
2. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk melakukan inovasinya.

Penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ditemukannya fenomena *flypaper effect* menunjukkan adanya indikasi pemborosan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat. Jika terdapat perilaku yang bersifat asimetris seperti ini maka tujuan efisiensi dalam penggunaan dana tidak berhasil dicapai.

1.4 Lingkup Studi

Penelitian ini menggunakan *data panel* dengan mengambil sampel data dari realisasi APBD kabupaten/kota untuk periode pengamatan tahun 2003 hingga tahun 2006. Data yang dianalisis adalah data yang bersumber dari laporan APBD Pemerintah daerah kabupaten, yaitu data belanja daerah serta dana transfer dari Pusat yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2003 hingga tahun 2006 yang disampaikan Daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan serta data PDRB menggunakan pendekatan harga berlaku yang bersumber dari BPS.

Penggunaan *data panel* untuk periode pengamatan tahun 2003 hingga 2006 diambil dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kelengkapan data. Data sampel merupakan kabupaten/kota yang tidak mengalami pemekaran wilayah selama periode pengamatan dan tersedia datanya, berupa PDRB, realisasi belanja daerah dan realisasi penerimaan dana transfer dalam bentuk *unconditional grants*, secara lengkap.

Penelitian ini melihat fenomena *flypaper effect* dari sudut pandang birokrat (*bureaucratic model*) yang selalu berusaha untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang mereka punyai. Sebagai akibatnya, birokrat tidak memiliki insentif untuk menginformasikan kepada masyarakatnya tentang tingkat yang sebenarnya dari pengeluaran yang didanai dari *grants*. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melihat fenomena *flypaper effect* sebagai suatu bentuk ilusi fiskal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan untuk melihat variabel-variabel lainnya yang turut mempengaruhi belanja daerah diluar variabel produk domestik regional bruto dan dana transfer dari Pusat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna dalam memberikan bukti empiris (statistik) tentang pengaruh jumlah dana transfer yang diterima dari Pusat dalam bentuk *unconditional grants* terhadap belanja daerah dan pengaruh produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah serta menjelaskan manakah dari kedua variabel tersebut yang memiliki daya pengaruh yang lebih kuat terhadap belanja daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan apakah pengalokasian dana transfer dari pusat ke daerah sudah sesuai dengan kebutuhan riil untuk membiayai belanja daerah ataukah justru kebijakan transfer dana yang dipraktikkan selama ini menimbulkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi legislatif dan eksekutif sebagai pengambil keputusan kebijakan pemerintah.

Penelitian ini memberikan bukti secara empiris berkenaan dengan kebijakan transfer dana dari Pusat kepada daerah dan pengaruhnya terhadap belanja daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah selanjutnya sehubungan dengan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

2. Bagi dunia pendidikan dan penelitian desentralisasi fiskal

Untuk menambah perkembangan pengetahuan di bidang otonomi daerah khususnya desentralisasi fiskal dan memberikan sumbangan ide bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai masalah yang akan dibahas, maka penulis menyusun penelitian ini dalam 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I, yang berjudul Pendahuluan, berisikan uraian mengenai latarbelakang penelitian, masalah penelitian, tujuan studi, lingkup studi, manfaat penelitian, dan sistematika penyajian.
2. Bab II, yang berjudul Kajian Literatur, berisikan uraian mengenai kajian literatur yang terkait dengan pokok penelitian, yaitu Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Hasil Studi Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran Teoritis yang Melandasi Model.
3. Bab III, yang berjudul Metode Penelitian, berisikan kerangka umum metode penelitian yang digunakan, spesifikasi model yang digunakan untuk mengestimasi, data yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian, teknik analisis yang terkait, serta hipotesis yang akan dijawab melalui penelitian.
4. Bab IV, yang berjudul Analisis Hasil Pengujian Empiris, berisikan mengenai hasil pengujian model dengan menggunakan teknik analisis

pada Bab III, hasil estimasi termasuk pengujian hipotesis untuk mengetahui hasil estimasi, dan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian.

5. Bab V, yang berjudul Simpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran, serta Implikasi Kebijakan menguraikan tentang kesimpulan dari analisis hasil pengujian empiris, saran mengenai bagaimana memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan penelitian berikutnya, serta implikasi hasil penelitian terhadap intervensi kebijakan yang mungkin dilakukan.



BAB II

KAJIAN LITERATUR

Bab ini berisi kajian literatur yang berhubungan dengan topik penelitian dan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya yang melandasi penelitian ini. Setelah itu, dikembangkan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

2.1 PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Salah satu tuntutan reformasi yang mengemuka hingga kini adalah permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan otonomi daerah. Sebagai respon dari tuntutan ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 33 tahun 2004. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut membawa perubahan yang cukup berarti terhadap hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik dalam kaitannya dengan fungsi pemerintahan maupun dalam bentuk hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Substansi dari perubahan kedua undang-undang tersebut adalah semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Diharapkan melalui kebijakan otonomi daerah tersebut, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah sehingga berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi regional yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Rasyid (2007) dalam Haris (2007) diharapkan melalui kebijakan otonomi daerah akan terjadi peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian *revenue* dari sumber penerimaan yang berkait dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan

syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah. Salah satu konsep dasar yang melandasinya kedua paket UU otonomi daerah tersebut adalah sebagai upaya perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat *block grant* dan pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah.

2.1.1 Pengertian dan Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Mengacu pada UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah yang telah diubah dengan UU No. 33 tahun 2004, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di Indonesia disebutkan sebagai suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (*money follows function*). Artinya bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Salam (2007) dalam Haris (2007) menyatakan bahwa sebagai dampak dari kebijakan perimbangan keuangan tersebut, berdasarkan perhitungan ekonomi, muncul perubahan besar dalam APBD daerah kabupaten dan kota dimana terjadi peningkatan perolehan dana yang luar biasa terutama bagi daerah yang memiliki sumber daya alam.

2.1.2 Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dimaksudkan sebagai sebuah alat dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses

pengambilan keputusan publik yang demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan melalui pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintah di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan memungut pajak, terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Mardiasmo (2009) dalam Abimanyu dan Megantara (2009) mengutip pendapat Litvack (1999) membedakan desentralisasi menjadi tiga bagian:

1. Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang melibatkan aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.
2. Desentralisasi administrasi, berupa pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antartingkat pemerintahan.
3. Desentralisasi fiskal, dalam bentuk pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi (pembangunan).

Prinsip pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, menurut Mardiasmo (2009) dalam Abimanyu dan Megantara (2009) diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi, dan keanekaragaman daerah.

Mengutip Bahl (1998) dan Rahmawati (2008), Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mensyaratkan adanya pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*) yang mengiringi pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) sehingga hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa. Dengan demikian, kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Tujuan umum dari program desentralisasi fiskal di Indonesia menurut Sidik (2004) dalam Singgih dan Subiyantoro (2004) adalah untuk membantu:

1. meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah;
2. memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemudian nasional;
3. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah;
4. mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah; serta
5. memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2009 disebutkan bahwa Desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain untuk:

1. mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*);
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
3. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
4. tata kelola, transparan, akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian Transfer ke Daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; serta
5. mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Desentralisasi berpengaruh besar terhadap peran Pemda dalam hal: (i) transfer dana dari pusat meningkatkan secara signifikan sumberdaya keuangan daerah; (ii) kewenangan fiskal daerah diperluas secara signifikan; (iii) tanggung jawab yang mencakup penyediaan layanan sosial dan

infrastruktur daerah; dan (iv) kewenangan untuk membuat kebijakan ekonomi daerah (World Bank, 2008)

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dalam desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka pemerintah daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai yang berasal dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat (Sidik, 2002). Menurut Bahl (1998) desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan yang mencakup bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah besar dana dan/atau sumber-sumber ekonomi kepada daerah untuk dikelola menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri.

Dalam hal terjadi ketimpangan antara kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, dalam konteks Indonesia, diatasi dengan adanya kebijakan transfer ke pemerintah daerah sebagai instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke pemerintah daerah.

2.1.3 Dana Perimbangan

Transfer dari pemerintah pusat penting untuk pemerintah daerah dalam menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002). Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktifitas perekonomian di daerah.

Menurut Gan Jun et al. (2005), transfer pemerintah pusat merupakan pengalihan dari pendapatan fiskal antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah yang memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat disparitas sosial sehingga dalam jangka panjang dapat mengembangkan perekonomian negara.

2.1.3.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil, menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berjalannya sistem transfer dalam Dana Bagi Hasil mencerminkan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Depkeu, 2008).

Dana Bagi Hasil terdiri atas DBH yang bersumber dari penerimaan Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH dari sumber penerimaan pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta PPh Pasal 21. Sedangkan DBH Sumber Daya Alam terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.1.3.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Depkeu (2008), DAU adalah alokasi dana yang bersifat *block grant* dalam jumlah besar dan penggunaannya dimaksudkan untuk sepenuhnya ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. DAU merupakan tanggapan atas aspirasi daerah untuk mendapatkan akses yang lebih besar dan kendali yang lebih besar atas pendapatan. Ketentuan yang ada dalam UU No. 33 Tahun 2004 mengatur bahwa jumlah DAU yang dibagikan, minimal 26% dari penerimaan dalam negeri dan dibagikan kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan suatu formula.

Tujuan dari DAU adalah sebagai instrumen untuk *equalizing grant* atau pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Oleh karena itu, keberhasilan alokasi DAU akan sangat ditentukan oleh tercapai tidaknya upaya perbaikan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dari tahun ke tahun.

DAU memiliki posisi yang baik untuk mengatasi ketidakseimbangan horisontal karena memiliki sifat yang dirumuskan dengan menggunakan pendekatan distribusional berdasarkan kesenjangan perbedaan fiskal. Analisis empiris menunjukkan bahwa DAU untuk tahun anggaran 2001 secara substansial jauh lebih menyeimbangkan dibandingkan penyaluran berdasarkan SDO dan INPRES dahulu. Kajian internal yang dilakukan Depkeu menunjukkan bahwa metode alokasi yang dipergunakan pada tahun anggaran 2002 nampaknya lebih menyeimbangkan dibandingkan metode-metode pada tahun sebelumnya (Depkeu, 2003).

2.1.3.2 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Depkeu, 2008). Pasal 51 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 mempertegas fungsi DAK sebagai bagian dari Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.

Di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 33 Tahun 2004, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU, DBH dan DAK. Dilihat dari ada tidaknya deskresi dalam penggunaan dananya, transfer dalam bentuk DAU dan DBH dapat dikategorikan sebagai *unconditional grant/general purpose grant/block grant*, sedangkan DAK termasuk kategori *conditional grant/categorical grant/specific purpose grant*. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh *unconditional grant/general purpose grant/block grant* terhadap belanja daerah maka *categorical grant/conditional grant* tidak dibahas lebih lanjut.

2.2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.2.1 Pengertian

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

2.2.2 Pendapatan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD (Sidik, 2002).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengelompokkan pendapatan daerah menjadi tiga kelompok: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan UU dan PP tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh hampir semua daerah dan merupakan

jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang baik.

Davey (1989) dalam Bappekki (2006) berpendapat bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pajak (*tax objects*) dan tingkat hasil (*buoyancy*) dari obyek tersebut. Tingkat hasil ditentukan oleh sejauhmana sumber perpajakan (*tax bases*) responsif terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi obyek pengeluaran seperti inflasi, penambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan yang baik secara kuantitatif dan kualitatif.

Sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat kemampuan keuangan daerahnya. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk. Sumber-sumber pendapatan potensial tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (Bappekki, 2006). Besaran PAD sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Semakin besar jumlah penerimaan PAD, semakin besar pula kesempatan daerah untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerah.

2.2.3 Belanja Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah daerah memiliki wewenang mengeluarkan belanja daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

Struktur APBD sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006 membagi klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, program dan kegiatan, serta kelompok belanja. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: (a) pelayanan umum, (b) ketertiban dan keamanan, (c) ekonomi, (d) lingkungan hidup, (e) perumahan dan fasilitas umum, (f) kesehatan, (g) pariwisata dan budaya, (h) agama, (i) pendidikan, serta (j) perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program sedangkan belanja tidak langsung tidak terkait langsung dengan program yang terdiri dari: (1) belanja pegawai, (2) bunga, (3) subsidi, (4) hibah, (5) bantuan sosial, (6) belanja bagi hasil, (7) bantuan keuangan, dan (8) belanja tidak terduga.

2.3 Pajak dan Retribusi Daerah

Kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang independen, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah, akan sangat menentukan pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Jika pemerintah daerah mampu menggali untuk mendapatkan pendapatan yang besar tentu membawa konsekuensi politis dan ekonomi seperti posisi yang lebih baik dalam menentukan perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah daripada pemerintah daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU

No. 18 Tahun 1997. Pelaksanaan dari ketentuan dalam UU tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Adanya kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi ini menjadi perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yang memungkinkan daerah memiliki sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai potensi daerah masing-masing.

Pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Penerimaan pajak daerah ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut UU No. 34 Tahun 2000, pajak daerah memiliki pengertian yang hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti pajak pada umumnya, pajak daerah juga mempunyai peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (berfungsi *budgetair*) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah (*regulerend*). Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak daerah dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetair*) tetapi dapat pula suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu (*regulerend*).

UU No. 34 Tahun 2000 membagi pajak daerah menjadi dua kelompok besar, yaitu pajak yang dikelola oleh provinsi dan pajak yang dikelola kabupaten/kota. Pemerintah provinsi mengelola empat jenis pajak, yaitu (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; dan (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola tujuh jenis pajak daerah yang meliputi: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak

Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan (7) Pajak Parkir.

Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya (Brotodihardjo, 1993). Hal tersebut memang disengaja, sebab pembayaran tersebut oleh si pembayar ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu berupa layanan pemerintah. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. UU Nomor 34 Tahun 2000 membagi retribusi dalam tiga jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yang mencerminkan kegiatan tertentu dari pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam sebuah laporan World Bank (2008) disebutkan, sekitar 80 persen penerimaan pemerintah daerah berasal dari dana perimbangan. Akan tetapi, peran pendapatan asli daerah (PAD) untuk kebijakan daerah saat ini dan khususnya yang akan datang tidak boleh dianggap remeh. Hingga sekarang, banyak pemerintah daerah belum memberikan perhatian yang memadai untuk memperkuat kapasitasnya dalam menghasilkan PAD secara efisien. Misalnya, sebagian pemerintah daerah memungut sejumlah pajak yang sangat rendah nilainya dan tidak dapat mengeksploitasi instrumen

pajak yang lebih efisien yang sesuai dengan kewenangan mereka. Pada sisi belanja, PER 2007 yang dipublikasikan oleh Bank Dunia telah menunjukkan adanya kaitan yang hilang dalam rantai pendapatan-belanja-hasil. Meskipun belanja pemerintah daerah telah meningkat, alokasi dan efektivitas penggunaan dana seringkali belum optimal.

2.4 Hasil Studi Terdahulu

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Abdullah dan Halim (2003) melakukan pengujian atas adanya *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan menggunakan data tahun 2001 dan 2002. Kesimpulan penting dari penelitian ini adalah temuan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU periode t_1 terhadap belanja daerah periode t . Mengingat kemampuan keuangan daerah di Jawa dan Bali berbeda dengan kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali, temuan tersebut tidak dapat digeneralisir untuk menyimpulkan fenomena serupa terjadi untuk seluruh wilayah Indonesia.

Maemunah dan Akbar (2008) mereplikasi penelitian diatas dengan menggunakan sampel data 35 kabupaten/kota di Pulau Sumatera untuk periode pengamatan 2003 dan 2004. Hasil dari penelitian ini memperkuat temuan Abdullah dan Halim (2003) bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari pengaruh PAD terhadap belanja daerah yang mengindikasikan terjadinya *flypaper effect*.

Berangkat dari kedua temuan tersebut, Kusumadewi dan Rahman (2007) meluaskan pengujian *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Indonesia. Dengan menggunakan data daerah yang sudah ada dan tidak mengalami perubahan dari tahun 2001 sampai dengan 2004 serta ketersediaan data laporan realisasi APBD dari tahun 2001 sampai dengan 2004, mereka memperoleh data sebanyak 270 daerah kabupaten/kota yang tersebar di 30 propinsi di Indonesia. Dari data tersebut, hanya 225 daerah saja yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian karena sebanyak 45 daerah kabupaten/kota memiliki nilai PAD, DAU, dan Belanja Daerah yang

ekstrem (*oulier*) yang dapat mengganggu generalisasi hasil penelitian sehingga harus dikeluarkan dari penelitian. Dalam penelitian tersebut, mereka membuat *cluster* daerah dengan PAD tinggi dan PAD rendah berdasarkan pada rasio Derajat Otonomi Fiscal (DOF). Daerah dengan nilai rasio DOF diatas rata-rata dikategorikan sebagai daerah dengan PAD tinggi dan daerah dengan nilai rasio DOF dibawah rata-rata dikategorikan sebagai daerah dengan PAD rendah. Temuan penting dari penelitian ini konsisten dengan temuan Abdullah dan Halim (2003) bahwa baik pada daerah kaya PAD maupun pada daerah miskin PAD, keduanya mengalami *flypaper effect* dimana DAU yang diterima daerah mampu menstimulus daerah untuk melakukan belanja di banding PAD sendiri.

Ketiga penelitian tersebut diatas menggunakan alat analisis regresi berganda dengan model yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots \text{persamaan 2.1}$$

dimana:

- Y = Belanja Daerah
- α = Konstansta
- β_1, β_2 = Koefisiensi regresi
- X_1 = PAD
- X_2 = DAU

Kecenderungan perilaku asimetris pemerintah daerah terhadap besaran transfer yang diterima dari pemerintah pusat diteliti oleh Ndadari dan Adi (2008). Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *non-probability sampling* dari 461 kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan syarat daerah yang dijadikan sampel adalah daerah yang memiliki data-data yang lengkap dan daerah yang tidak mengalami pemekaran diperoleh sampel hanya sebanyak 41 kabupaten dan kota. Sampel tersebut diuji dengan menggunakan model berikut:

$$\ln E_{gt} = \ln \delta_0 Pr' + \ln \delta_1 Rr(1/Pg') Yt + \ln \delta_2 (Pr'/Pg')_t + \ln \delta_3 (1/Pg')_t + \ln \delta_4 U + e \dots \dots \dots \text{persamaan 2.2}$$

dimana:

Eg_t	= Anggaran PAD pada tahun t .
Pg_t'	= Anggaran DAU pada tahun t .
Y	= Penerimaan daerah pada tahun t .
Pr_t'	= Realisasi DAU pada tahun t .
Rr	= Realisasi PAD pada tahun t .
U	= Tingkat Pengangguran Terbuka.
$(1/Pg_t')Y$	= Rasio dari pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
(Pr_t'/Pg_t')	= Persepsi relatif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada periode t .
$(1/Pg_t')$	= Kepentingan relatif dari Dau terhadap belanja pemerintah pada periode t .

Sampel tersebut diuji dengan menggunakan alat analisis regresi berganda dalam pengukuran Manipulasi Belanja (*Expenditure Manipulation*). Hasil dari penelitian ini memberikan bukti adanya perilaku asimetris daerah dalam merespon transfer pemerintah pusat yang sejalan dengan adanya *flypaper effects*. Kesimpulan tersebut ditarik dari adanya korelasi yang positif antara variabel rasio dari pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan anggaran PAD. Korelasi positif yang menunjukkan adanya ilusi fiskal tersebut berarti bahwa terjadi manipulasi belanja di dalam belanja pemerintah daerah di mana saat pemerintah daerah memiliki PAD yang tinggi, di sisi lain ketergantungan akan DAU juga masih tinggi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Dollery dan Worthington (1995) yang menyebutkan apabila terdapat variabel transfer pemerintah pusat yang memiliki hubungan positif dengan anggaran PAD maka ada indikasi terjadi ilusi fiskal (*fiscal illusion*).

Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut apabila dibandingkan dengan penelitian ini mempunyai beberapa persamaan, seperti dalam permasalahan yang dibahas berkenaan dengan fenomena *flypaper effect* dan ilusi fiskal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Abdullah dan Halim (2003), Kusumadewi dan Rahman (2007) serta Maemunah dan Akbar

(2008) terletak pada lingkup lokasi penelitian, sampel data yang digunakan, periode waktu yang dianalisis dengan penggunaan tahun anggaran yang berbeda, dan variabel bebas yang digunakan. Sedangkan dengan penelitian Ndadari dan Adi (2008), perbedaannya terletak pada metode analisis yang dilakukan, spesifikasi model, data yang digunakan, periode waktu penelitian serta masalah penelitian. Penelitian ini membatasi pada periode waktu 2003 hingga 2006, melingkupi kabupaten/kota di Indonesia dengan fokus penelitian pada pengujian apakah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah berkenaan dengan transfer dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis yang Melandasi Penyusunan Model

2.5.1 FLYPAPER EFFECT

2.5.1.1 Pengertian dan Konsep *Flypaper effect*

Hubungan pengaruh dari transfer dana antar pemerintah dan pendapatan daerah terhadap kebijakan belanja daerah dalam dunia akademis dikenal sebagai *flypaper effect*. Beberapa peneliti menjelaskan respon belanja pemerintah daerah sebagai *flypaper effect*, yaitu respon belanja pemerintah daerah berbeda untuk sumber dana dari transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan sendiri (seperti pajak daerah). Dengan kata lain, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer dibandingkan dengan respon belanja daerah lebih besar terhadap pendapatan daerah, kondisi tersebut disebut sebagai *flypaper effect* (Oates, 1999).

Pendekatan umum mengenai *flypaper effect* antara lain menyebutkan pengaruh transfer dana sebagai salah satu penyebab ilusi fiskal dalam tingkat pengeluaran barang publik. Transfer dana antar pemerintah pada umumnya akan mengurangi harga barang publik bagi masyarakat penerima, dan dengan sendirinya akan menurunkan tingkat penerimaan pajak daerah sebagai efek samping dari adanya dana bantuan. Dalam studi Dollery dan

Worthington (1995) menggunakan data di Australia ditemukan bahwa dengan adanya *flypaper effect* menyebabkan transfer dana bantuan dari yurisdiksi pemerintah federal pada yurisdiksi pemerintah lokal akan mengalami ilusi fiskal.

Masyarakat, khususnya masyarakat pemilih dalam negara bagian penerima transfer, mempercayai bahwa beban pajak mereka ditanggung oleh yurisdiksi lain di luar negara bagian tersebut (dalam hal ini adalah pemerintah pusat). Sehingga, mereka cenderung beranggapan bahwa barang publik dibiayai oleh dana bantuan dari federal, dan pajak untuk pembiayaan barang publik tersebut ditarik dari yurisdiksi lain. Oleh karena itu, pengeluaran antara pendonor (federal) dan penerima (negara bagian) akan timpang. Negara bagian cenderung akan menuntut dana bantuan untuk pembiayaan publik dari pemerintah federal, sehingga meningkatkan pengeluaran pemerintah federal menjadi berat sebelah. Sementara itu, penerimaan pajak yang dipungut oleh negara federal akan bertambah untuk pembiayaan dana bantuan, sedangkan pelayanan yang diberikan pemerintah federal cenderung stagnan. Sebaliknya, penerimaan pajak negara bagian mungkin menurun tetapi pelayanan publiknya tetap dan cenderung bertambah, karena dibiayai oleh dana bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*).

Dengan demikian, timbul anggapan bahwa "bila pemerintah federal menambah jumlah dana bantuan, maka permintaan pelayanannya cenderung jatuh." Menurut pandangan pendonor/penerima, penambahan dana bantuan akan menurunkan jumlah yang tampak pada pengeluaran negara bagian penerima, dan malah meningkatkan jumlah pengeluaran pendonor, sehingga pengeluaran pendonor tampak lebih mahal. Pada umumnya, penurunan pada pengeluaran "asli" pendonor (federal untuk kepentingan federal sendiri dalam studi Dollery dan Worthington tersebut) sebagai akibat perubahan pandangan akan jumlah pengeluaran yang tampak, merupakan alternatif bukti adanya ilusi fiskal.

Penelitian sebelumnya mengenai *flypaper effect* menjelaskan bahwa secara umum perkiraan empiris atas *flypaper effect* menyebabkan perubahan 40 sen belanja daerah atas tiap kenaikan satu dollar *grants*, sedangkan

kenaikan satu dollar pendapatan daerah menyebabkan perubahan 15 sen belanja daerah (Hines dan Thaler, 1995). Transfer atau *grants* dari Pusat kepada pemerintah daerah akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendapatan lain (Bradford dan Oates, 1971). Namun, studi empiris membuktikan bahwa stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau *grants* seringkali lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri atau dengan kata lain terjadi *flypaper effect*

Fenomena *flypaper effect* membawa dampak lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi. Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Anomali tersebut memicu diskusi yang intensif di antara ahli ekonomi. Perdebatan tersebut menghasilkan beberapa penjelasan yang ditawarkan. Dalam khasanah ekonomi, telaah mengenai *flypaper effect* dapat dikelompokkan menjadi 2 aliran pemikiran, yaitu model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). Model birokratik menelaah *flypaper effect* dari sudut pandang dari birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.

Filimon, Romer dan Rosenthal (1982) dalam Rossen (2005) berpendapat bahwa birokrat selalu berusaha untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang mereka punyai. Sebagai akibatnya, birokrat tidak memiliki insentif untuk menginformasikan kepada masyarakatnya tentang tingkat yang sebenarnya dari pengeluaran yang didanai dari *grants*.

Implikasi yang penting penerapan desentralisasi fiskal bisa membantu dalam menjelaskan pertumbuhan sektor publik. Dalam sistem yang terdesentralisasi, pemerintah daerah seharusnya memiliki lebih banyak

informasi untuk membedakan kepentingan penduduknya sehingga bisa memperoleh lebih banyak sumber daya dari perekonomian. Hal ini memberikan implikasi bahwa efisiensi ekonomi penyediaan barang publik akan tercapai dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Tiebout menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi, masyarakat lokal, dan pemerintah daerahnya. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah lokal melalui legislatifnya (Hyman, 2003). Hipotesis tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat potensi untuk mencapai efisiensi ekonomi (*maximizing social welfare*) dalam penyediaan barang publik pada tingkat lokal.

Model Tiebout ini menunjukkan kondisi yang diperlukan untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam penyediaan barang publik yang bersifat lokal yang pada gilirannya akan menciptakan kondisi yang dikenal sebagai "the market for local services would be perfectly competitive" (Tresch, 1981: 576-577), (Aronson, 1985:153-161), (Stiglitz, 1988:636-637) dalam BPPK (2005).

Oates (1979) menyatakan fenomena *flypaper effect* dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti *flypaper effect* merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah

daerah. Ilusi fiskal diartikan sebagai kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai pembiayaan maupun alokasi anggaran dan keputusan mengenai kedua hal tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam ini. Logan (1986) berpendapat kesalahan persepsi tersebut dapat berlanjut dalam bahkan jangka panjang.

Lebih lanjut, birokrat pemerintah daerah dan masyarakat memandang bahwa kemudahan transfer yang diterima pada saat yang sedang berjalan tetap memiliki nilai sekarang (*present value*) yang lebih tinggi daripada jumlah transfer yang diterima pada waktu-waktu yang akan datang meskipun dengan nilai sekarang yang lebih tinggi. Dengan demikian, fungibilitas transfer tersebut akan memberikan pengaruh konsumsi yang jauh lebih besar. Hal ini memberikan implikasi lebih lanjut bahwa masyarakat akan menggunakan aspek fungibilitas transfer ini untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya

Studi Holtz-Eakin et al (1985) menemukan bahwa *grants* tahun lalu dapat memprediksi belanja tahun ini, namun sebaliknya belanja tahun lalu tidak dapat memprediksi belanja tahun berjalan. Selain itu, Syukri dan Halim (2003) untuk studi kasus untuk kabupaten/kota di Jawa-Bali, juga telah membuktikan *flypaper effect* dengan menyimpulkan bahwa DAU dan PAD secara terpisah dan serentak berpengaruh terhadap belanja daerah, baik untuk prediksi tanpa maupun dengan lag.

Perilaku pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang dimilikinya, baik dari transfer Pusat maupun dari pendapatan daerahnya sendiri, merupakan objek yang telah diteliti untuk dijelaskan oleh beberapa peneliti dengan berbagai pendekatan. Pemerintah daerah bisa merespon transfer dari Pusat secara simetris dan tidak simetris (Gamkhar dan Oates, 1996).

Menurut Alderete (2004) dalam Ndadari dan Adi (2008) ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerah, terdapat spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer tersebut secara asimetris. Perilaku asimetris ini dapat dilihat dengan adanya pengeluaran

yang berasal dari *grants* yang memberikan keuntungan pribadi, sedangkan di lain pihak anggarannya juga berkurang.

Studi Kuncoro (2007) untuk pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia menemukan bahwa perubahan besaran transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten menimbulkan perilaku asimetris pemerintah kota dan kabupaten dalam penggunaan dana transfer yang diterimanya tersebut. Kuncoro menyebutkan bahwa peningkatan alokasi transfer dari pemerintah pusat akan direspon oleh pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi. Artinya, terdapat indikasi terjadi inefisiensi dalam belanja pemerintah daerah, terutama belanja operasional, yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Disisi lain, apabila terjadi penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten maka pemerintah daerah merespon kebijakan tersebut dalam bentuk penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan Pendapatan Asli Daerah.

2.5.1.2 Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB)

Kinerja perekonomian secara nasional tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). PDB didefinisikan sebagai jumlah nilai pasar semua barang dan jasa akhir (*final goods*) yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu tanpa memperhatikan kewarganegaraan pelakunya (Mankiw, 2003). Untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah diperlukan pengukuran perekonomian regional yang melibatkan aspek dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Biasanya dalam hal ini digunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi regional. Mengacu pada definisi PDB menurut Mankiw, PDRB dapat dipahami sebagai statistika tentang jumlah nilai tambah yang tercipta akibat dari proses produksi, barang atau jasa, di suatu wilayah/regional pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan asal atau domisili pelaku produksi. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan angka

PDRB mencerminkan Pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam konteks Indonesia, penelitian Kustiani (2007) membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Daerah.

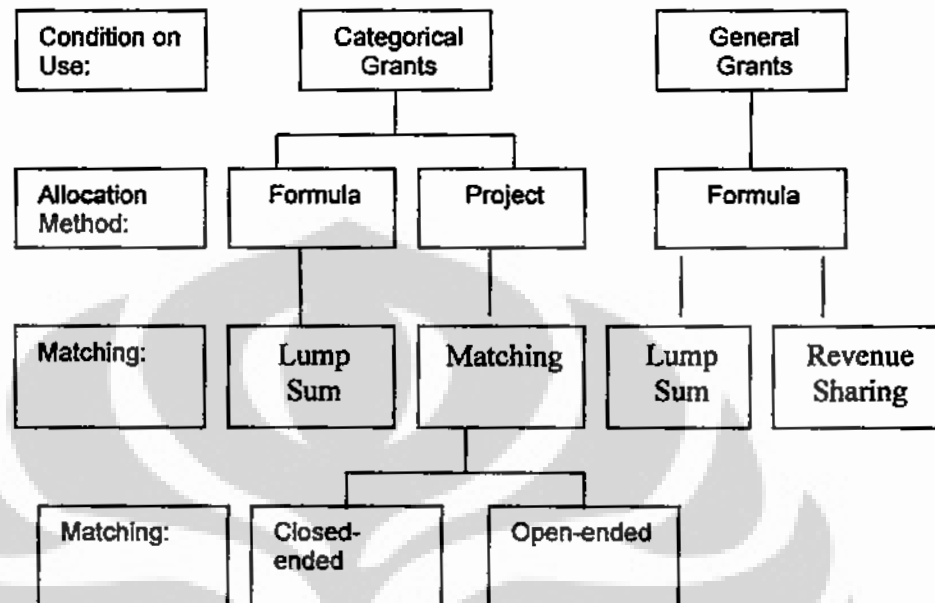
2.5.1.3 *Unconditional Grants*

Transfer atau *grant* dari Pemerintah Pusat secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu *conditional grant* dan *unconditional grant* (Rossen, 2005). Sementara Ulbrich (2003) membagi *grants* menjadi dua tipe, yaitu *general purpose grant* dan *categorical grant*.

Unconditional grant (disebut juga dengan *general purpose grant/block grant*) merupakan transfer dari Pusat ke Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antar daerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang layak. Atas *grant* yang diterimanya, pemerintah memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri alokasi anggarannya tanpa batasan/ketentuan penggunaan dari pemerintah pusat. Sedangkan *conditional grant* (disebut juga dengan *categorical grant/specific purpose grant/matching grant*) biasanya digunakan dalam rangka mengatasi persoalan efek pelayanan publik (*spatial effect*) antar daerah atau pun dalam rangka mengarahkan kembali prioritas pembangunan Pusat (*redirecting national priority*) yang kewenangannya telah diserahkan ke pemerintah daerah. Untuk *conditional/categorical grant*, pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan dalam pemanfaatannya. Pemerintah daerah harus membelanjakan dana transfer tersebut sesuai dengan penggunaan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah pusat (Ulbrich, 2003).

Kedua *grant* (*conditional dan unconditional grants*) tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah. Meski istilah belanja rutin dan pembangun sejak tahun 2003 melalui UU No. 17 Tahun 2003 telah dihilangkan karena pemerintah menggunakan pendekatan anggaran berbasis

kinerja dan menerapkan *unified budget*, namun demikian sebagai sifat belanja istilah tersebut tetap relevan untuk digunakan.

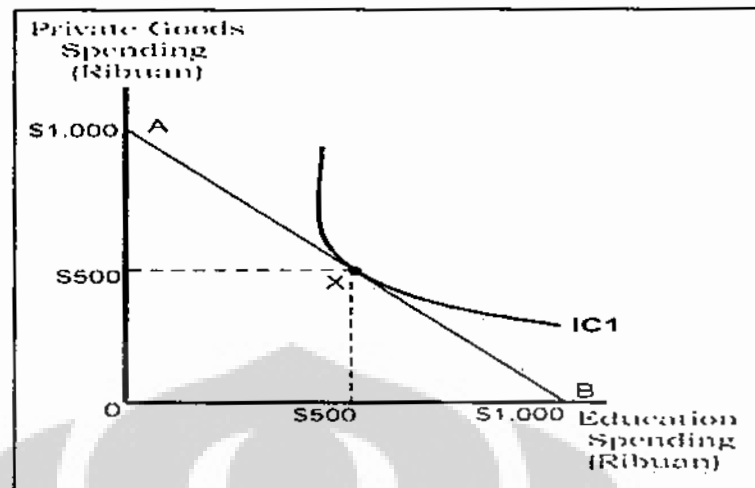


Sumber: diadaptasi dari Fisher (1996) dalam Moisiso (2002).

Gambar 2.1
Types Intergovernmental Grants

Pengaruh dari kedua jenis grants tersebut terhadap pengeluaran/belanja pemerintah daerah dijelaskan oleh Gruber (2007) dengan ilustrasi sebagai berikut.

Misalkan, Pemerintah Daerah Kota A menyediakan hanya satu jenis barang publik saja, yaitu pendidikan, untuk penduduknya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan pendanaan yang bisa berasal dari pajak kekayaan ataupun dari pajak penjualan. Gambar 2.2 menjelaskan kondisi di kota A sebelum sejumlah dana bantuan (*grants*) disediakan oleh tingkat pemerintah lainnya. Asumsikan, penduduk Kota A tersebut mempunyai total anggaran sebesar \$1.000.000,00 (satu juta dolar) untuk pendidikan (sebagai barang publik) dan barang swasta/pribadi lainnya (*private goods spending*)



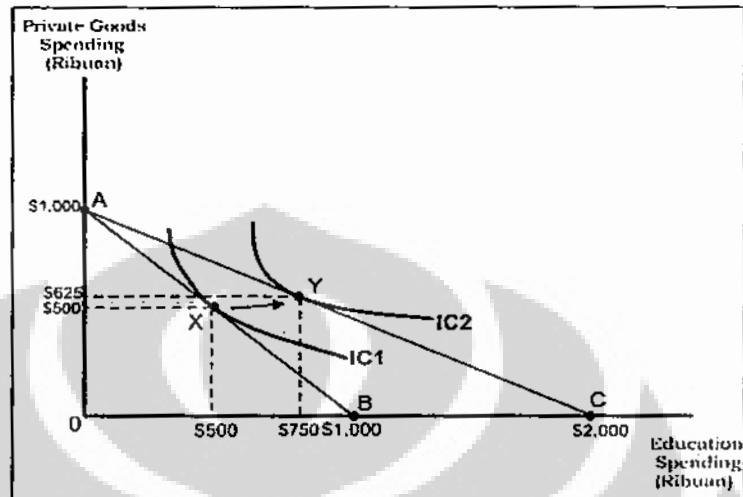
Sumber: Gruber, Jonathan., "Public Finance and Public Policy",
Second Edition. Worth Publiser, New york. 2007.

Gambar 2.2

Kondisi Awal Tanpa *Grants*

Titik A menunjukkan kondisi jika penduduk Kota A memilih untuk menggunakan seluruh anggaran yang dimiliki untuk pengeluaran/belanja berupa barang swasta/pribadi dan memilih tidak menggunakan anggaran untuk tujuan pendanaan pengeluaran/belanja di bidang pendidikan. Titik B menggambarkan situasi sebaliknya, yaitu jika penduduk Kota A menggunakan seluruh anggaran yang ada untuk membiayai pengeluaran/belanja pendidikan dan tidak menyisakan anggaran untuk barang swasta/pribadi. Masyarakat pemilih, yang memiliki hak memilih eksekutif dan legislatif dalam proses pemilu/politik, mempunyai beberapa pilihan dalam hal komposisi antara penyediaan barang publik dan penyediaan barang swasta/pribadi. Pilihan-pilihan tersebut diwakili oleh kurva indiferen IC_1 (*indiferrent curve*) yang menggambarkan tingkat kombinasi antara barang publik dengan barang swasta/pribadi yang memberikan keuntungan paling maksimum bagi penduduk kota A. Sebelum ada *grants*, penduduk kota A memilih untuk menghabiskan \$500.000 (lima ratus dolar) setiap tahunnya untuk pendidikan dan \$500.000 (lima ratus

dolar) lainnya untuk barang swasta/pribadi. Kombinasi yang ditunjukkan oleh titik X adalah tangen dari *budget constraint*.



Sumber: Gruber, Jonathan., "Public Finance and Public Policy",
Second Edition. Worth Publiser, New york. 2007.

Gambar 2.3

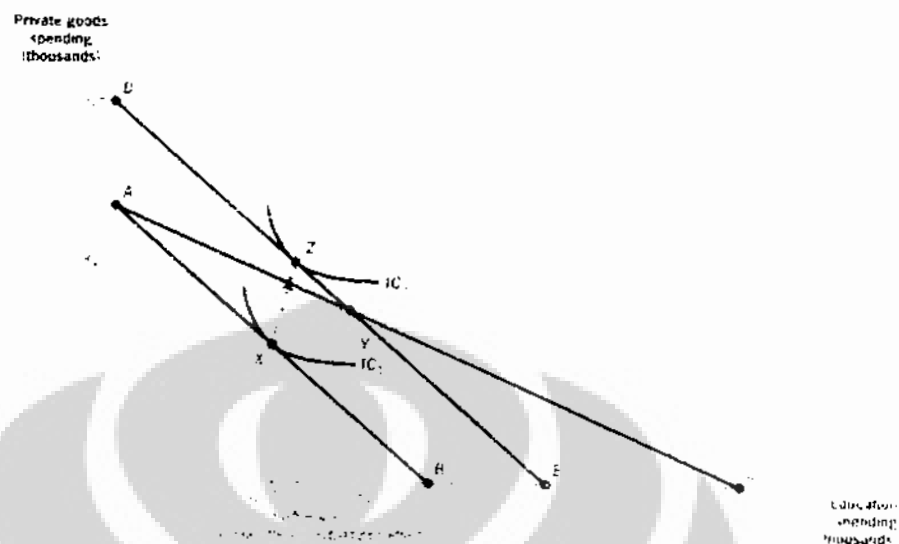
Kondisi Setelah Diterima Matching Grants

Dalam kaitannya dengan bantuan antar tingkat pemerintahan (*intergovernmental grants*), pemerintah pusat dapat memberikan transfer yang bersifat penyeimbang (*matching grants*) yaitu transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menutup sebagian atau seluruh kekurangan pembiayaan satu jenis urusan tertentu (BPPK, 2006). Sedangkan Gruber (2007) mendefinisikan *matching grants* sebagai sebuah *grants* dimana jumlah dari dana transfer yang diberikan berhubungan/terikat dengan sejumlah dana yang dibelanjakan oleh pemerintah lokal/daerah. Untuk memperjelas ilustrasi kasus yang tengah dikembangkan disini, misalkan saja pemerintah pusat menyediakan \$1 (satu dolar) untuk pendidikan sebagai bantuan atas setiap \$1 dolar (satu dolar) dana yang disediakan pemerintah Kota A untuk pengeluaran/belanja di bidang pendidikan. Sebagai dampaknya, transfer dari pemerintah pusat tersebut

akan mengurangi setengah biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah kota A. Sekarang, untuk setiap \$1 (satu dolar) biaya pendidikan di kota A hanya \$0,5 (setengah dolar) yang harus disediakan oleh pemerintah Kota A karena setengahnya lagi akan disediakan oleh pemerintah pusat. Perubahan ini akan menyebabkan *budget line* bergeser/berputar keluar dari garis AB menjadi AC dalam gambar 2.3.

Transfer ini secara jelas menambah biaya pendidikan melalui efek pendapatan dan efek substitusi. Dalam contoh diatas, total biaya pendidikan yang dihabiskan bertambah dari \$500.000 (lima ratus ribu dolar) menjadi \$750.000 pada titik Y. Pemerintah Kota A menyumbang \$375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dolar) untuk biaya pendidikan dan menerima \$375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu) lainnya dalam bentuk transfer pengimbang (*matching grants*). Dari \$1.000.000 (satu juta dolar) anggaran awal, Kota A sekarang mempunyai \$625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu dolar) untuk dibelanjakan dalam bentuk barang swasta/pribadi (awalnya \$500.000, sedang \$125.000 berasal dari dana yang tidak lagi dibelanjakan untuk pendidikan). Sebagai hasil adanya transfer penyeimbang ini, total anggaran yang dihabiskan untuk biaya pendidikan dan barang swasta/pribadi menjadi bertambah.

Pengaruh *unconditional grants* terhadap belanja daerah yang berbeda dibanding pengaruh *matching grants* dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. Seandainya, pemerintah pusat memberikan dana bantuan (*grants*) sebesar \$375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dolar) dalam bentuk *unconditional grants* sehingga pemerintah pusat tidak memberikan mandat tertentu berkenaan dengan penggunaan dana tersebut maka pemerintah Kota A sekarang memiliki anggaran sebesar \$1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dolar) yang dapat digunakan baik untuk pendanaan penyediaan barang publik dalam bentuk pendidikan ataupun pengeluaran/belanja barang swasta/pribadi. Perubahan anggaran ini ditunjukkan oleh garis dari AB ke DE pada gambar 2.4.



Sumber: Gruber, Jonathan., "Public Finance and Public Policy",
Second Edition. Worth Publiser, New york. 2007.

Gambar 2.4

Kondisi Setelah Diterima *Unconditional Grants*

Atas *unconditional grants* yang diterimanya tersebut, pemerintah Kota A memiliki pilihan untuk menggunakan sebagian dana tersebut dalam rangka menambah biaya pendidikan dan sebagian lainnya digunakan untuk menambah biaya penyediaan barang swasta/pribadi. Dalam kasus ini, dampak yang berbeda dapat timbul dari perilaku penganggaran pemerintah Kota A. Pemerintah Kota A dapat menggunakan \$75.000,00 (tujuh puluh lima ribu dolar) untuk mendanai pendidikan dan \$300.000,00 (tiga ratus ribu dolar) untuk pengeluaran/belanja barang swasta/pribadi. Sebagai akibatnya, karena transfer diberikan dalam bentuk *unconditional grants* maka pengeluaran/belanja untuk barang swasta/pribadi meningkat menjadi \$800.000 (delapan ratus ribu dolar). Sekarang, titik Z menunjukkan pilihan antara penyediaan barang publik dan barang swasta/pribadi dimana biaya pendidikan dianggarkan \$575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu dolar)

dan biaya penyediaan barang swasta/pribadi dianggarkan \$800.000 (delapan ratus ribu dolar).

Pertambahan biaya pendidikan pada *unconditional grants* sebesar \$75.000 (tujuh puluh lima ribu dolar) lebih rendah dibandingkan dengan *matching grants* (\$250.000) karena sekarang hanya efek pendapatan yang berdampak pada biaya pendidikan. Jika digunakan *matching grants* maka efek substitusi dan efek pendapatan, dapat dinikmati oleh Kota A. Efek pendapatan menambah biaya pendidikan dari \$500.000 (lima ratus ribu dolar) menjadi \$575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu dolar), grafiknya bergeser dari titik E ke titik Z. Efek substitusi akan menyebabkan penambahan terhadap *matching grants*, yaitu dengan meningkatkan belanja pendidikan dari \$575.000 menjadi \$750.000 seperti digambarkan dari pergeseran titik Z menuju titik Y.

Pada sisi lain, pemerintah Kota A menjadi lebih baik dengan menggunakan *unconditional grants* dibanding *matching grants*. Hal tersebut dapat dengan jelas terlihat pada gambar. Dengan *budget line* yang baru sebagai hasil dari transfer *unconditional grants* (Garis DE), pemerintah Kota A sudah bisa mengusahakan pilihannya pada titik Y, dimana belanja pendidikan meningkat hingga \$750.000 dan barang swasta/pribadi yang dibelanjakan meningkat hingga \$625.000.

Kesimpulan penting yang dapat ditarik dari ilustrasi tersebut adalah karena tidak ada batasan pada cara penggunaan dana maka transfer berbentuk *unconditional grants* akan mengakibatkan pergeseran (*shifting*) garis anggaran (*budget line*) sebagai dampak dari penambahan anggaran yang disebabkan oleh adanya transfer dana dari pemerintah pusat sehingga jumlah barang publik maupun barang swasta/pribadi yang dapat dipenuhi menjadi lebih banyak. Dengan demikian, tingkat kepuasan masyarakat pun menjadi lebih besar seiring dengan pergeseran keluar dari kurva indifferennya. Hal ini menjadi sebuah penjelasan mengapa penerima *grants* lebih memilih *unconditional grants* dibandingkan dengan transfer dalam bentuk lain (BPPK, 2006).

BAB III

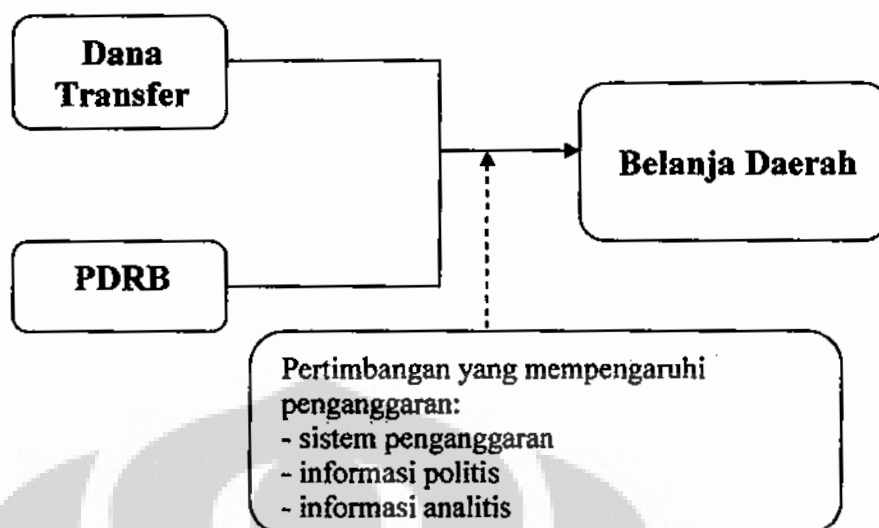
METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan populasi, sampel dan metode pemilihan sampel. Kemudian diuraikan teknik pengumpulan data dan definisi operasional serta pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, diuraikan spesifikasi model yang dikembangkan dan metode pengujian hipotesis penelitian.

3.1 Kerangka Umum

Penelitian ini dilakukan untuk menguji data dari 135 kabupaten/kota di Indonesia untuk periode pengamatan tahun 2003 hingga tahun 2006 (empat tahunan). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara ekonometrik dan ekonomi. Analisis ekonometrik dilakukan melalui analisis data dengan mengukur efektivitas dan efisiensi dari model yang digunakan, sementara analisis ekonomi dilakukan dengan menjelaskan hubungan tiap-tiap variabel dengan teori-teori ekonomi dan penelitian terdahulu yang mendasarinya.

Studi-studi literatur sebelumnya menunjukkan faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Dalam penelitian ini, faktor yang diduga berpengaruh terhadap belanja daerah, baik berupa transfer Pusat maupun dari pendapatan daerahnya sendiri yang diproksikan dengan PDRB, akan diuji. Selain dipengaruhi oleh besaran dana transfer dan pendapatan daerah, belanja daerah juga dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan tertentu dalam proses penganggarannya seperti sistem penganggaran, informasi politis dan informasi analitis (Widiastuti, 2007). Dari pemahaman tersebut disusunlah kerangka berfikir pengembangan model sebagaimana ditunjukkan dalam gambar III.1.



Gambar III.1
Kerangka Berfikir Pengembangan Model

Dalam gambar tersebut untuk menjelaskan pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah digunakan proksi data berupa PDRB. Hal ini dilakukan agar persamaan regresi linear berganda yang nantinya digunakan dalam model bersifat persamaan fungsional, bukan persamaan identitas.

Karena fokus penelitian ini diarahkan pada hubungan pengaruh antara dana transfer dalam bentuk *unconditional grants* dan PDRB terhadap belanja daerah serta membuktikan apakah *flypaper effect* terjadi pula untuk kondisi Indonesia, maka pertimbangan yang mempengaruhi penganggaran dipandang sebagai *error term* atau hal-hal lain yang tidak dijelaskan dalam model.

Informasi politis yang mencerminkan pendekatan pilihan publik (*public choice approach*) serta informasi analitis dan sistem penganggaran yang digunakan yang mencerminkan pendekatan institusional (*institutional approach*) tidak diteliti karena ketidakterediaan data. Penelitian berkenaan dengan pertimbangan yang mempengaruhi penganggaran membutuhkan data primer yang sulit dipenuhi oleh penelitian dalam tesis ini.

3.2 Spesifikasi Model

Regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk memprediksi apakah variabel PDRB dan *Unconditional Grants* secara serentak mempengaruhi belanja daerah dengan menggunakan *data panel*. Untuk menemukan apakah terjadi *flypaper effect*, maka pengaruh dana transfer dari pusat terhadap belanja daerah dibandingkan dengan dengan pengaruh PDRB terhadap belanja daerah. Dalam regresi berganda, dibandingkan koefisien regresi dan nilai *t-statistic* untuk masing-masing variabel. Apabila pengaruh dana transfer dari pusat terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PDRB, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

Model dikembangkan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dengan mengembangkan metode estimasi sebagai berikut:

3.2.1 Pengaruh *Unconditional Grants* Terhadap Belanja Daerah

Mengutip Holtz-Eakin et al (1994), Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pusat dengan belanja pemerintah daerah terutama hubungannya dengan belanja modal. Studi Legrenzi dan Milas (2001) dalam Maimunah dan Akbar (2008), menggunakan sampel *municipalities* di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer dari Pusat berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian lain yang berkaitan dengan hal ini dilakukan oleh Gamkhar dan Oates (1996) yang menganalisis respon pemda terhadap perubahan jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991 dimana pengurangan jumlah transfer dari *Federal Grants* menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

Abdullah dan Halim (2003) membuktikan bahwa Dana Perimbangan, untuk studi kasus di Jawa dan Bali, berpengaruh terhadap belanja daerah. Dalam hubungannya dengan kontribusi terhadap pengalokasian anggaran, Dana Perimbangan merupakan sumber utama pemerintah daerah meskipun bersifat *contingent* karena ditentukan oleh pemerintah pusat. Senada dengan hal tersebut, temuan Maimunah dan

Universitas Indonesia

Akbar (2008) membuktikan bahwa besarnya nilai DAU, sebagai salah satu komponen dana transfer untuk kasus di Pulau Sumatera, berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah. Hal ini membuktikan bahwa transfer pemerintah dalam bentuk DAU berperan penting bagi perekonomian suatu daerah. Diharapkan, transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan meningkatkan kemampuan belanja daerah sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

3.2.2 Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja Pemda dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis* (Aziz et al, 2000; Doi, 1998; Vo Furstenberg et al, 1986 dalam Abdullah dan Halim, 2003). Dalam hal ini pengeluaran Pemda atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Kustiani (2007) dalam penelitiannya tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja pada kinerja fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Jawa membuktikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto, sebagai proksi pendapatan daerah, berpengaruh terhadap belanja daerah. Selain itu, Adi (2006) juga membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah memberikan dampak yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Abdullah dan Halim (2003) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa dan Bali memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Menurut Abdullah dan Asmara (2006) dalam Abdullah dan Halim (2006) meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

3.2.3 Pengujian *Flypaper effect*

Studi Andersson (2002) tentang perubahan sistem *grants* terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Swedia menemukan bahwa kenaikan dalam *non-matching grant* akan menyebabkan kenaikan pengeluaran

Pemda, berbeda dengan akibat dari kenaikan pendapatan yang bersumber dari pajak. Kenaikan tarif pajak tinggi menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Menurut Andersson, efek dari *non-matching grant* lebih besar dibanding *matching grant* dan efek ini tergantung pada penurunan relatif atas *non-matching grant* untuk beberapa periode. Hasil ini mendukung hipotesis *flypaper effect*.

Deller et al (2002) menganalisis hubungan pendapatan yang berasal dari bagi hasil dengan menggunakan 581 kota dan kota-kota kecil di di Wisconsin, Amerika Serikat dan menemukan bahwa untuk setiap dolar kenaikan pendapatan per kapita, menyebabkan pengeluaran total per kapita meningkat sebesar 12–15 sen. Untuk setiap kenaikan dalam pendapatan bagi hasil per kapita, peningkatan pengeluaran per kapita mencapai 46–55 sen. Hasil ini konsisten dengan hipotesis *flypaper effect*.

Penelitian Legrenzi dan Milas juga memberikan bukti empiris tentang *flypaper effect* dalam jangka panjang untuk sampel *municipalities* di Italia. Mereka menyatakan bahwa pemerintah daerah secara konsisten menaikkan pengeluaran mereka sesuai kenaikan tranfer dari Pusat lebih dari kenaikan dalam pendapatan sendiri mereka. Dalam hubungan antara pendapatan dan belanja, Moisiso (2002) menemukan adanya *flypaper effect* yang menyatakan bahwa orang akan berhemat dalam membelanjakan pendapatan sendiri dibandingkan pendapatan yang diberikan pihak lain dalam bentuk *grants* atau transfer.

Slack (1980) menguji secara analitis dan empiris dengan menggunakan sampel *municipalities* di Kanada dan menemukan bahwa *Unconditional Grants* yang diberikan kepada *municipalities* disikapi oleh daerah penerima *grants* dengan cara menaikkan pengeluaran *municipalities* tetapi dengan jumlah yang lebih kecil dari *grants*. Sementara Deller dan Maher (2005) dengan fokus penelitian pada terjadinya *flypaper effect* menemukan adanya pengaruh *Unconditional Grants* pada kategori pengeluaran adalah lebih kuat pada kebutuhan non esensial atau kebutuhan luxury, seperti pengeluaran untuk taman dan rekreasi, daripada kebutuhan esensial atau normal, seperti pengeluaran untuk jasa keamanan.

Temuan-temuan sebelumnya tersebut menarik untuk dikonfirmasi, apakah untuk kondisi Indonesia *flypaper effect* juga terjadi? Dalam penelitian ini, agar dapat dikatakan telah terjadi *flypaper effect* maka hasil regresi yang diperoleh harus menunjukkan nilai koefisien *Unconditional Grants* yang lebih besar dari nilai koefisien PDRB dan keduanya signifikan, atau PDRB tidak signifikan.

Untuk tujuan pengujian hipotesis, penelitian ini mengajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1: Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan *Unconditional Grant (UG)* pengaruh terhadap Belanja Daerah (BD)

dan,

H2: Pengaruh *Unconditional Grant (UG)* terhadap Belanja Daerah (BD) lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah (BD)

Model estimator yang dikembangkan untuk menguji hipotesis diatas adalah sebagai berikut:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 UG_{it} + U_{it} \dots \dots \dots \text{persamaan 3.1}$$

dimana:

BD_{it} = belanja daerah pada tahun t.

UG_{it} = dana transfer dalam bentuk *unconditional grants* yang diterima daerah pada tahun t.

$PDRB_{it}$ = pendapatan daerah regional bruto satu daerah pada tahun t.

U_{it} = residual pada daerah pada tahun t

3.3. Populasi, Sampel dan Metode Pemilihan Sampel

Gujarati (2003) mendefinisikan populasi sebagai himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh dari suatu eksperimen. Dengan kata lain, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono dalam Riduan, 2004). Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Mempertimbangkan keterbatasan data yang tersedia berupa kelengkapan data yang memenuhi syarat untuk diteliti dan hanya meneliti data untuk daerah yang tidak mengalami pemekaran selama periode pengamatan, tidak semua kabupaten/kota di Indonesia diteliti. Oleh karenanya, ditarik sampel yang dipandang mampu mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti (Riduan, 2004). Dalam pengertian Gujarati (2006), sampel adalah setiap anggota dari populasi. Ide dasar pengambilan sampel (*sampling*) adalah bahwa dengan menyeleksi bagian/elemen dari populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh (Cooper dan Emory, 1997).

Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti karena dianggap memiliki posisi terbaik yang bisa memberi informasi yang diperlukan oleh peneliti (Sekaran, 1992; Cooper dan Schindler, 2003). Dalam penelitian ini hanya daerah yang memiliki data secara lengkap dan tidak mengalami pemekaran yang dimasukkan dalam penelitian. Terdapat berbagai macam teknik pengambilan sampel tergantung pada persyaratan, tujuannya, dan dana yang tersedia. Dalam penelitian ini digunakan metode pengambilan sampel probabilita (*probability sampling*) yang didasarkan pada konsep seleksi acak, yaitu prosedur yang terkontrol untuk menjamin bahwa setiap elemen populasi sudah tentu merupakan peluang seleksi bukan nol yang diketahui (*known non-zero chance of selection*) dimana setiap elemen populasi memiliki peluang seleksi sederajat (Cooper dan Emory, 1997).

Probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk sampel acak sederhana (*simple random sample*) dimana untuk setiap provinsi di Indonesia diambil beberapa kabupaten/kota dari jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. Diharapkan dengan cara ini, sampel dapat merepresentasikan dan menggambarkan karakteristik dari seluruh daerah/kota yang ada di Indonesia.

3.4. Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa realisasi APBD dari 135 kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2003 hingga tahun 2006 beserta rinciannya yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. Daftar kabupaten/kota yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini tersaji dalam Lampiran 1.

Jumlah Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga berlaku per kabupaten/kota bersumber dari Badan Pusat Statistik. Tahun anggaran 2003 hingga tahun 2006 dipilih untuk mewakili *data panel*. Data-data tersebut dipilih dengan pertimbangan merupakan data terbaru paling lengkap yang tersedia.

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanasi yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lain dengan cara menyoroti hubungan yang telah dirumuskan sebelumnya. Variabel yang digunakan adalah satu variabel terikat yaitu belanja daerah dan dua Variabel bebas yakni *Unconditional Grants* dan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) sebagai proksi dari pendapatan daerah¹.

1. Penggunaan Belanja Daerah (*y*)

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode *n* tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi belanja menurut klasifikasi jenis belanja berdasarkan format Kepmendagri 29 Tahun 2001 yang diperoleh dari laporan daerah kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. Hal ini dilakukan mengingat belanja berdasarkan format yang ada pada permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah

¹ Selain menggunakan variabel PDRB sebagai proksi dari pendapatan daerah, saya juga telah melakukan pengujian menggunakan variabel PAD sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya. Temuan penting dari pengujian ini adalah baik menggunakan pendekatan panel data maupun *cross-section*, PAD secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah apabila diuji secara serentak dengan *unconditional grants* sebagaimana ditunjukkan dalam lampiran 11 dan 12 penelitian ini.

dirubah dengan Permendagri 59 tahun 2007 selama periode pengamatan dalam penelitian ini belum dilaksanakan.

2. Penggunaan *Unconditional Grants* (x_1)

Unconditional grants adalah transfer dari Pusat ke Pemerintah Daerah yang penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Daerah dapat menentukan sendiri rencana pemanfaatannya sesuai kebutuhan masing-masing daerah sehingga pemerintah daerah lebih memiliki diskresi dalam penganggarannya. Di Indonesia, transfer pusat yang bersifat *unconditional grants* adalah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

3. Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto (x_2)

Pendapatan daerah dalam penelitian ini diprosikan dengan PDRB. Pendapatan Daerah Regional Bruto adalah jumlah keseluruhan nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah pada tahun tertentu. PDRB dapat dihitung baik dengan menggunakan pendekatan produksi, pendapatan maupun pengeluaran. Data PDRB dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode tahun 2003 hingga tahun 2006 dengan pendekatan harga berlaku.

3.6. Teknik Analisis Regresi Data Panel

Data panel diperoleh dengan menggabungkan data *cross sectional* dan *time series*. Penggunaan analisis data panel memungkinkan peneliti untuk menangkap karakteristik antar individu dan antar waktu yang bisa saja berbeda. Selain itu, penggunaan analisis data panel dimaksudkan untuk memperbanyak jumlah observasi penelitian pada saat jumlah observasi penelitian tidak cukup banyak jika akan digunakan analisis *time series* atau *cross sectional* saja.

Analisis regresi dengan menggunakan data panel mempunyai beberapa keuntungan. Menurut Hsiao (2005) dalam Wulandari (2009) dan Widarjono (2005) beberapa keuntungan tersebut adalah:

1. Data panel mampu menyediakan data yang lebih lengkap, karena merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Dengan

demikian, model regresi data panel yang selanjutnya, akan mampu meningkatkan presisi dari estimasi regresi.

2. Dengan menggabungkan informasi dari data *time series* dan data *cross section*, dapat mengatasi masalah yang timbul akibat penghilangan variabel (*omitted variable*)
3. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh regresi individu karena jumlah data yang digunakan lebih banyak.
4. Data panel mampu mengakomodasi heterogenitas variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model (*unobserved heterogeneity*)
5. Data panel mampu mengindikasikan dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diperoleh dengan data *cross sectional* murni atau *time series* murni.
6. Data panel mampu mengurangi kolinieritas antar variabel.
7. Suatu hal yang penting dalam data panel yang diabaikan dalam penggunaan OLS adalah heterogenitas antara unit-unit *cross section*. Asumsi yang mendasari OLS tersebut sangat jarang berlaku dalam kenyataan sehari-hari. Heterogenitas dapat terjadi pada *intersept*, *slope* atau kedua-duanya. Perbedaan antar individu dapat diperoleh dengan menggunakan data panel.

Greene (2005) dalam Wulandari (2009) menambahkan bahwa kelebihan analisis regresi panel yang fundamental adalah adanya fleksibilitas yang lebih besar bagi peneliti dalam memodelkan perbedaan perilaku di antara individu-individu. Sementara itu, Baltagi (2005) menyatakan studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan studi berulang data *cross sectional*.

Data panel merupakan gabungan data *cross section* dan *time series*. Dengan kata lain, data panel merupakan unit-unit individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, data panel dicirikan oleh T periode waktu ($t=1,2,\dots,T$) yang kecil dan N jumlah individu ($i=1,2,\dots,N$) yang besar. Namun tidak menutup kemungkinan sebaliknya, yaitu data panel terdiri dari periode waktu yang panjang dan jumlah individu yang kecil. Regresi menggunakan data panel disebut model regresi data panel.

Dalam model regresi klasik, gangguan (*error term*) selalu dinyatakan bersifat homoskedastik dan *serial uncorrelated*. Implikasinya, penggunaan metode OLS akan menghasilkan penduga yang bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Asumsi tersebut tidak dapat diterapkan pada metode data panel yang disusun berdasarkan beberapa individu untuk periode. Menurut Pyndick&Rubinfeld (1998) dalam Prachmasetiawan (2006), hal ini dikarenakan bertambahnya gangguan yang kini menjadi 3 macam, yaitu: gangguan antar waktu (*time series disturbance*), antar individu (*cross sectional disturbance*), dan gangguan antar waktu dan antar individu.

Melalui analisis data panel perilaku individu yang berbeda selama jangka waktu tertentu dapat ditangkap untuk memperoleh parameter estimasi. Spesifikasi model regresi data panel yang memuat efek yang spesifik individu adalah sebagai berikut :

$$y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots \text{persamaan 3.2}$$

Dimana y_{it} dan x_{it} masing-masing merupakan variabel tak bebas dan variabel bebas untuk setiap individu i pada periode t dimana $i=1,2,\dots, N$ dan $t=1,2,\dots,T$. ε_{it} merupakan *error term* pada model regresi data panel. Pada x_{it} ada sebanyak K *slope* (tidak termasuk *intersept*) yang menunjukkan jumlah variabel bebas yang digunakan dalam model. α_i merupakan efek individu yang dapat bernilai konstan sepanjang periode t atau bahkan berbeda-beda untuk setiap individu ke- i .

Pengujian dalam analisis data panel berbeda dengan pengujian dalam persamaan tunggal. Pengujian dalam persamaan tunggal dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi gejala heteroskedastik atau autokorelasi untuk satu individu. Perbaikan model dilakukan jika melanggar asumsi regresi linier klasik, sehingga diperoleh hasil estimasi yang bersifat *Best Linier Unbiased* (BLUE). Sedangkan pengujian dalam analisis panel menurut Ekananda (2005) dalam Wulandari (2009) dilakukan untuk menentukan estimator yang lebih baik, disesuaikan dengan kondisi matriks *varians-covarians residual*.

3.6.1 Metode Estimasi Regresi Data Panel

3.6.1.1 Model *Common Effects*

Model *common effects* menurut Pyndyck&Rubinfeld (1998) dalam Prachmasetiawan (2006), adalah pendekatan data panel yang paling sederhana, yakni hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross sectional* dalam bentuk *pool*, dan teknik estimasinya menggunakan pendekatan kuadrat terkecil/*pooled least square*. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

Adapun persamaan regresi dalam model *common effects* dapat ditulis sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} + \varepsilon_{it}, \text{ untuk } i=1,2,\dots, N \text{ dan } t=1,2,\dots, T \quad \dots \text{ persamaan 3.3}$$

Dimana N adalah jumlah unit *cross section* (individu), T adalah jumlah periode waktunya, sedangkan notasi lain sama dengan persamaan 3.2. Dengan asumsi komponen *error* dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit *cross sectional* dapat dilakukan.

Berdasarkan asumsi struktur matriks varian-kovarian *residual*, maka pada model *common effects*, terdapat 4 metode estimasi yang dapat digunakan yaitu:

1. *Ordinary Least Square* (OLS), jika struktur matrik varian-kovarian *residualnya* diasumsikan bersifat homoskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
2. *Generalized Least Square* (GLS)/*Weighted Least Square* (WLS): *Cross Sectional Weight*, jika matrik varian-kovarian *residualnya* diasumsikan bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
3. *Feasible Generalized Least Square* (FGLS)/ *Seemingly Uncorrelated Regression* (SUR) atau *Maximum Likelihood Estimator* (MLE), jika struktur matriks varian-kovarian *residualnya* diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation*.
4. *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) dengan proses *autoregressive* (AR) pada *error term-nya*, jika struktur matriks varian-

kovarian *residualnya* diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada korelasi antar waktu pada *residualnya*.

3.6.1.2 Model *Fixed Effects*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi melalui perbedaan *interseptnya* (α_i). Untuk mengestimasi model *fixed effects* dimana *intersept* berbeda antar individu, maka digunakan teknik variabel *dummy*. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots \text{persamaan 3.4}$$

Berdasarkan asumsi struktur matriks varian-kovarian *residual*, maka pada model *fixed effects*, terdapat 3 metode estimasi yang dapat digunakan, yaitu:

1. *Ordinary Least Square* (OLS/LSDV), jika struktur matriks varian-kovarian *residualnya* diasumsikan bersifat homoskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
2. *Weighted Least Square* (WLS), jika matriks varian-kovarian *residualnya* diasumsikan bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
3. *Seemingly Uncorrelated Regression* (SUR), jika struktur matriks varian-kovarian *residualnya* diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation*.

3.6.1.3 Model *Random Effects*

Pada model *random effects* diasumsikan bahwa terdapat perbedaan *intersept* untuk setiap individu dan *intersept* tersebut merupakan variabel *random* atau stokastik. Dengan demikian, dalam model *random effects* terdapat dua komponen *residual*, yaitu *residual* secara menyeluruh (ε_{it}) dan *residual* individu (u_{it}).

Adapun persamaan regresi untuk model *random effects* dapat ditulis sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + u_i + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots \text{persamaan 3.5}$$

$$y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + w_{it} \dots\dots\dots \text{persamaan 3.6}$$

dimana $w_{it} = u_i + \varepsilon_{it}$

Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi dalam model *random effects*. Asumsi-asumsi tersebut terdiri dari:

- $u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$
- $\varepsilon_{it} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$
- $E(u_i \varepsilon_{it}) = 0$, untuk semua i, t dan j
- $E(u_i u_j) = 0$, jika $(i \neq j)$

Hal ini berarti bahwa *error* tidak berkorelasi satu sama lain dan tidak ada autokorelasi antara *cross section* dan *time series*.

3.7 Pengujian Signifikansi Model Regresi Data Panel

Dari ketiga model yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu model *common effects*, *fixed effects* dan *random effects*, akan dipilih model yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Pemilihan model terpilih dapat melalui cara formal dan informal (*a priori*).

Secara informal, ada beberapa pertimbangan untuk menentukan model estimasi terbaik dari ketiga model estimasi data panel sebagaimana telah dijelaskan di atas. Widarjono (2005), menyatakan bahwa model *random effects* sangat berguna jika individu yang dijadikan sampel adalah terpilih secara random dan merupakan wakil dari populasi. Sementara itu, Judge dalam Wulandari (2009) menyatakan ada empat pertimbangan pokok yang dapat digunakan untuk memilih antara model *fixed effects* dan model *random effects*, yaitu:

1. Jika jumlah *time series* (T) lebih besar dari jumlah *cross section* (N), maka nilai taksiran parameter berbeda kecil, sehingga pilihan didasarkan pada kemudahan penghitungan, yaitu model *fixed effects*.
2. Bila N lebih besar dari T , maka penaksiran dengan metode *fixed effects* dan *random effects* akan menghasilkan perbedaan yang signifikan. Pada

model *random effects* diketahui bahwa $\alpha_i = \alpha - u_i$, dimana u_i merupakan komponen acak *cross section*. Sementara itu, pada model *fixed effects* α_i bersifat acak. Bila diyakini bahwa individu atau *cross section* tidak acak, maka model *fixed effects* lebih tepat, sebaliknya jika *cross section* acak, maka model *random effects* lebih tepat.

3. Jika komponen *error* u_i individu berkorelasi, maka penaksir dengan model *random effects* adalah bias dan penaksir dengan model *fixed effects* tidak bias.
4. Jika N besar dan T kecil serta asumsi model random terpenuhi, maka penaksir model *random effects* lebih efisien dari penaksir model *fixed effects*.

Secara formal, ada tiga prosedur pengujian yang akan digunakan untuk memilih model regresi data panel yang terbaik, yaitu uji statistik F yang digunakan untuk memilih antara model *common effects* dan *fixed effects*; uji *Langrange Multiplier* (LM) yang digunakan untuk memilih antara model *common effects* dan *random effects*; dan uji Hausman yang digunakan untuk memilih antar model *fixed effects* dan *random effects*. Setelah model estimasi regresi data panel terpilih, selanjutnya akan dilakukan pengujian untuk memilih estimator dengan struktur varian-kovarian dari residual yang lebih baik. Penjelasan mengenai ketiga pengujian tersebut akan dibahas pada bagian berikut.

3.7.1 Pengujian Signifikansi *Fixed Effects*

Uji Signifikansi F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel dengan *fixed effects* lebih baik dari model regresi data panel dengan *common effects*, yaitu dengan melihat *SSR* atau *Sum Square Residual*. Hipotesis nol yang digunakan adalah bahwa *intersept* dan *slope* adalah sama atau dengan kata lain model *common effects* lebih baik untuk digunakan.

Adapun statistik ujinya adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(SSR_1 - SSR_2)/(n-1)}{(SSR_2)/(nT - n - k)} \dots\dots\dots \text{persamaan 3.7}$$

dimana:

n = jumlah individu

k = jumlah parameter dalam model *fixed effects* (tidak termasuk *intersept*)

SSR_1 = *sum square residual* pada *common effects*

SSR_2 = *sum square residual* pada *fixed effects*

Nilai F-statistik hitung akan mengikuti distribusi F dengan derajat bebas (*df*) sebanyak $n-1$ untuk *numerator* dan $nT-n-k$ untuk *denominator*. Jika nilai statistik F hitung lebih besar dari F tabel pada tingkat signifikansi tertentu, maka hipotesis nul akan ditolak, yang berarti asumsi koefisien *intersept* dan *slope* adalah sama menjadi tidak berlaku, sehingga teknik regresi data panel dengan *fixed effects* lebih baik dari model regresi data panel *common effects*.

3.7.2 Pengujian Signifikansi *Random Effects*

Untuk mengetahui apakah model *random effects* lebih baik dari model *common effects*, dapat digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang dikembangkan oleh Bruesch-Pagan. Pengujian ini didasarkan pada nilai residual dari metode *common effects*. Hipotesis nul yang digunakan adalah bahwa *intersept* bukan merupakan variabel random atau stokastik. Dengan kata lain, varian dari *residual* u_i bernilai nol.

Uji LM ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat bebas sebesar 1. Jika hasil LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-square*, maka hipotesis nul akan ditolak, yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah metode *random effects* daripada *common effects*.

3.7.3 Pengujian Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang lebih baik digunakan diantara model *fixed effects* dan *random effects*. Hasil metode Hausman adalah bahwa perbedaan kovarians dari estimator yang efisien dengan metode estimator yang tidak efisien adalah nol.

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan derajat bebas sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel terikat. Jika nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-square*, maka hipotesis nul akan ditolak, yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah metode *fixed effects*.

3.8 Pemilihan Estimator dengan Struktur Varian-Kovarian *Residual*

Masalah lain dalam estimasi pada analisis data panel adalah menentukan struktur varian-kovarian dari *residual* yang lebih baik. Ada beberapa metode yang sesuai dengan asumsi pada struktur varian-kovarian, yaitu asumsi struktur homoskedastik, asumsi struktur heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*, asumsi struktur heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation* (*Seemingly Uncorrelated Regression/SUR*), serta asumsi struktur adanya autokorelasi antar waktu pada *error term* pada struktur varian-kovarian residual.

Pengujian asumsi di atas berbeda dengan pengujian dalam persamaan tunggal, dimana dalam analisis tunggal, dilakukan pengujian apakah terjadi gejala heteroskedastik atau autokorelasi untuk satu individu. Selanjutnya dari hasil pengujian tersebut, dilakukan perbaikan (*remedial*) model agar didapatkan hasil estimasi yang *BLUE*. Namun, dalam analisis data panel pengujian dilakukan untuk mendapatkan estimator yang baik untuk tujuan estimasi. Estimator tersebut disesuaikan dengan kondisi matriks varian-kovarian *residual*.

3.8.1 Pemilihan Estimator Struktur Homoskedastik atau Heteroskedastik (Uji LM)

Pada pengujian ini, hipotesis nul yang digunakan adalah bahwa struktur varian-kovarian *residual* bersifat homoskedastik. Sementara hipotesis alternatifnya adalah bahwa struktur varian-kovarian *residual* bersifat heteroskedastik.

Statistik uji LM mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan derajat bebas sebanyak $n-1$. Jika nilai statistik LM lebih besar dari nilai

kritis statistik *chi-square*, maka hipotesis nul ditolak, yang berarti varian-kovarian *residual* bersifat heteroskedastik.

3.8.2 Pemilihan Estimator Struktur Heteroskedastik dan Tidak Ada *Cross Sectional Correlation* dengan uji *Lambda LM*

Pengujian ini dilakukan apabila hasil pengujian LM pada poin sebelumnya menunjukkan hasil bahwa struktur varian-kovarian *residual* bersifat heteroskedastik. Pada pengujian ini, hipotesis nul yang digunakan adalah bahwa struktur varian-kovarian *residual* bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*. Sementara hipotesis alternatifnya adalah struktur varian-kovarian *residual* bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation* (*Seemingly Uncorrelated Regression/SUR*)

Statistik uji yang digunakan mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat bebas sebanyak $n(n-1)/2$. Jika nilai statistik λ_{LM} lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-square*, maka hipotesis nul akan ditolak, yang berarti varian-kovarian *residual* bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation* (*Seemingly Uncorrelated Regression/SUR*).

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa realisasi Anggaran Belanja Daerah, *Unconditional Grants* dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Kabupaten/Kota di Indonesia untuk tahun 2003 hingga tahun 2006 bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan RI.
2. *Unconditional Grants* yang merupakan total seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten/Kota di Indonesia untuk tahun 2003 hingga tahun 2006 bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan RI.
3. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tahun 2003 hingga tahun 2006 dengan pendekatan harga berlaku bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Sampel dari penelitian ini adalah kabupaten/kota di Indonesia yang memenuhi kriteria, yaitu datanya lengkap dan tidak mengalami pemekaran selama periode yang diamati. Daftar kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini disajikan dalam lampiran 1.

4.2 Hasil Pengujian Estimasi Data Panel

Model estimator yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana telah disajikan bab II selanjutnya diuji melalui tahapan-tahapan pengujian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya pada bab III. Pengolahan data menggunakan alat bantu perangkat lunak berupa program Eviews 5.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengujian dalam analisis data panel berbeda dengan pengujian dalam persamaan tunggal. Pengujian dalam

persamaan tunggal dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi gejala heteroskedastik atau autokorelasi untuk satu individu. Perbaikan model dilakukan jika melanggar asumsi regresi linier klasik, sehingga diperoleh hasil estimasi yang bersifat *Best Linier Unbiased* (BLUE). Sedangkan pengujian dalam analisis panel dilakukan untuk menentukan estimator yang lebih baik, disesuaikan dengan kondisi matriks *varians-covarians residual*

Model estimator data panel dapat dilakukan dengan pendekatan estimasi *common effect* dan estimasi parameter, baik menggunakan pendekatan *fixed effect* maupun *random effect*. Model estimator terbaik sebagai hasil pengembangan dari metode OLS dalam penelitian ini adalah model *fixed effect* dengan struktur varian-kovarian residual heteroskedatik. Pengujian model estimator data panel untuk masing-masing pendekatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Hasil Pengujian Pendekatan Estimasi Efek Biasa (*Common Effect*)

Pendekatan estimasi efek biasa merupakan pendekatan estimasi yang mengasumsikan bahwa data panel yang digunakan menunjukkan kondisi yang sesungguhnya, sehingga konstan α dan koefisien regresor β sama untuk semua objek dan semua periode waktu ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_i$, dan $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_i$), dan residual menjelaskan perbedaan konstan (*intersep*) dan koefisien regresor semua objek dan sepanjang waktu.

Pengolahan data sampel menggunakan Eviews untuk menguji pendekatan estimasi efek biasa (*common effect*) menghasilkan tabel *output* sebagaimana tersaji dalam tabel 4.1.

Pendekatan *common effect* dalam tabel tersebut memberikan hasil yang signifikan secara statistik baik untuk variabel PDRB maupun *Unconditional Grants*. Nilai koefisien determinan (R^2) sebesar 0,938 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hubungan antara PDRB dan *Unconditional Grants* terhadap Belanja Daerah sebesar 93,86%.

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Pendekatan *Common Effect*

Dependent Variable: BELANJA?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 12/16/09 Time: 23:33				
Sample: 2003 2006				
Included observations: 4				
Cross-sections included: 135				
Total pool (balanced) observations: 540				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB?	4687.588	340.6477	13.76081	0.0000
UG?	1.094602	0.009873	110.8652	0.0000
R-squared	0.938583	Mean dependent var		3.72E+11
Adjusted R-squared	0.938469	S.D. dependent var		2.03E+11
S.E. of regression	5.05E+10	Akaike info criterion		52.13013
Sum squared resid	1.37E+24	Schwarz criterion		52.14603
Log likelihood	=14073.14	Durbin-Watson stat		0.851310

Sumber: Hasil olah data.

4.2.2 Hasil Pengujian Pendekatan Estimasi Efek Individu (*individual effect*) dari parameter (α dan β)

Pendekatan estimasi efek individu merupakan pendekatan estimasi dengan memperhatikan sifat dari efek individu α , tanpa memperhatikan struktur kovarian residual ($\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \dots \neq \alpha_i$, dan $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \dots \neq \beta_i$). Model ini dapat menunjukkan perbedaan konstan antarobjek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Dalam pengujian ini, mula-mula dilakukan pengujian untuk estimasi efek individu dengan pendekatan *fixed effect* kemudian dilanjutkan dengan pendekatan *random effect* sehingga bisa diperoleh estimator terbaik.

Pengolahan data sampel untuk menguji estimasi efek individu (*individual effect*) dengan pendekatan *fixed effect* menghasilkan ringkasan tabel *output* sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Pendekatan *Fixed Effect*
(asumsi struktur var-cov residual homoskedastik)

Dependent Variable: BELANJA?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 12/16/09 Time: 23:35
 Sample: 2003 2006
 Included observations: 4
 Cross-sections included: 135
 Total pool (balanced) observations: 540

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.65E+10	5.96E+09	11.16005	0.0000
PDRB?	6765.284	701.1530	9.648799	0.0000
UG?	0.860107	0.020197	42.58513	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.982601	Mean dependent var	3.72E+11
Adjusted R-squared	0.976730	S.D. dependent var	2.03E+11
S.E. of regression	3.10E+10	Akaike info criterion	51.36884
Sum squared resid	3.88E+23	Schwarz criterion	52.45762
Log likelihood	13732.59	F-statistic	167.3509
Durbin-Watson stat	2.513301	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil olah data.

Dari tabel 4.2 diatas, pengujian menggunakan pendekatan *fixed effect* memberikan hasil yang signifikan secara statistik baik untuk variabel konstanta, PDRB maupun *Unconditional Grants*. Model estimator dalam pendekatan ini mampu menjelaskan pengaruh PDRB dan *Unconditional Grants* sebesar 98,26%. Hasil lengkap dari output Eviews disajikan dalam lampiran 5.

Pendekatan *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan pendekatan *fixed effect* dengan tidak menggunakan variabel semu. Sebagai gantinya, pendekatan *random effect* random menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarobjek sehingga

meningkatkan efisiensi proses pendugaan kuadrat terkecil. Pengolahan data sampel menggunakan Eviews untuk menguji estimasi efek individu (*individual effect*) dengan pendekatan *random effect* menghasilkan tabel *output* sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Pengujian Pendekatan *Random Effect*

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/16/09 Time: 23:36

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

Cross-sections included: 135

Total pool (balanced) observations: 540

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.26E+10	5.55E+09	9.486854	0.0000
PDRB?	6467.930	427.2318	15.13916	0.0000
UG?	0.910834	0.017264	52.75816	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3.58E+10	0.5713
Idiosyncratic random			3.10E+10	0.4287
Weighted Statistics				
R-squared	0.911756	Mean dependent var	1.48E+11	
Adjusted R-squared	0.911428	S.D. dependent var	1.06E+11	
S.E. of regression	3.17E+10	Sum squared resid	5.39E+23	
F-statistic	2774.214	Durbin-Watson stat	1.815748	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.941335	Mean dependent var	3.72E+11	
Sum squared resid	1.31E+24	Durbin-Watson stat	0.747952	

Sumber: Hasil olah data.

Sebagaimana pendekatan *fixed effect*, hasil pengujian dengan menggunakan pendekatan *random effect* juga memberikan hasil statistik

yang signifikan untuk semua variabel yang diuji. Koefisien determinan sebesar 0.911756 menunjukkan arti bahwa model estimator mampu menjelaskan hubungan PDRB dan *Unconditional Grants* terhadap belanja daerah secara baik. Model mampu menjelaskan hubungan antar variabel tersebut sebesar 91,18%. Hasil lengkap dari output Eviews disajikan dalam lampiran 6.

4.2.3 Hasil Pengujian Uji F

Untuk memilih estimator terbaik antara model *common effect* dan *fixed effect* digunakan uji statistik F. Uji Signifikansi F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel dengan *fixed effects* lebih baik dari model regresi data panel dengan *common effects*, yaitu dengan melihat *SSR* atau *Sum Square Residual*-nya. Hipotesis pembuktian dalam Uji F ini dinyatakan sebagai berikut:

Ho: $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$; nilai F-statistik < nilai F-tabel; *common effect*

Ha: $\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots \neq \alpha_n$; sekurang-kurangnya ada 1 *intersept* yang berbeda

Hasil penghitungan F-Statistik dan F-Tabel disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Pengujian F

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.713124	(134,403)	0.0000
Cross-section Chi-square	633.500566	134	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Panel Least Squares

Date: 12/16/09 Time: 23:37

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

Cross-sections included: 135

(lanjutan)

Total pool (balanced) observations: 540

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.29E+10	4.68E+09	7.034496	0.0000
PDRB?	5504.540	346.3166	15.89453	0.0000
UG?	0.993146	0.017246	57.58630	0.0000
R-squared	0.943765	Mean dependent var	3.72E+11	
Adjusted R-squared	0.943555	S.D. dependent var	2.03E+11	
S.E. of regression	4.83E+10	Akaike info criterion	52.04569	
Sum squared resid	1.25E+24	Schwarz criterion	52.06953	
Log likelihood	14049.34	F-statistic	4506.097	
Durbin-Watson stat	0.816778	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Hasil olah data.

Dengan Wilayah Kritis : $F_{(1, 538)} = \dots$ Statistik Uji dengan

rumus $F = \frac{(SSR_1 - SSR_2)/(n-1)}{(SSR_2)/(nT - n - k)}$ menghasilkan nilai sebesar 4506,097

sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak atau dengan kata lain sekurang-kurangnya ada satu intersept yang berbeda. Hasil output Eviews sebagaimana ditunjukkan lampiran 7 menegaskan pula kesimpulan ini.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dinyatakan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 99%, *intersept* untuk setiap kabupaten tidak sama, yang artinya model *fixed effects* lebih tepat digunakan daripada model *common effects*

4.2.4 Hasil Pengujian HAUSMAN

Karena pada uji F ternyata model *fixed effects* lebih tepat untuk digunakan, maka langkah selanjutnya adalah menguji model manakah yang lebih tepat digunakan, yaitu antara *fixed effects* ataukah *random effects*. Hipotesis pembuktian dalam Uji Hausman ini dinyatakan sebagai berikut:

H_0 : Ada gangguan antarobyek; *random effects*

H_a : Tidak ada gangguan antarobyek; *fixed effects*

Universitas Indonesia

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.737691	2	0.0000

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
			309088.4789	
PDRB?	6765.284064	6467.929732	78	0.5928
UG?	0.860107	0.910834	0.000110	0.0000

Cross-section random effects test equation:
 Dependent Variable: BELANJA?
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/16/09 Time: 23:37
 Sample: 2003 2006
 Included observations: 4
 Cross-sections included: 135
 Total pool (balanced) observations: 540

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.65E+10	5.96E+09	11.16005	0.0000
PDRB?	6765.284	701.1530	9.648799	0.0000
UG?	0.860107	0.020197	42.58513	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.982601	Mean dependent var	3.72E+11
Adjusted R-squared	0.976730	S.D. dependent var	2.03E+11
S.E. of regression	3.10E+10	Akaike info criterion	51.36884
Sum squared resid	3.88E+23	Schwarz criterion	52.45762
Log likelihood	-13732.59	F-statistic	167.3509
Durbin-Watson stat	2.513301	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil olah data.

Hasil output Eviews yang disajikan dalam lampiran 8 menunjukkan kesimpulan yang dapat diambil bahwa pada tingkat kepercayaan sebesar 99%, model estimasi yang tepat digunakan adalah *fixed effects*.

4.2.5 PENGUJIAN STRUKTUR VARIAN-COVARIAN RESIDUAL ASUMSI HOMOSKEDASTIK

Pada pengujian sebelumnya, yaitu Uji F dan Uji Hausman, ternyata model yang tepat digunakan adalah *fixed effects*. Selanjutnya, perlu dicari struktur varian-covarian dari residual untuk menentukan apakah bersifat homoskedastik atau heterokedastik. Dengan mengetahui struktur var-cov residual maka akan dapat diketahui estimator yang terbaik. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini dinyatakan sebagai berikut:

Ho : $\sigma^2 = \sigma^2$ (yaitu struktur homoskedastik)

Ha : $\sigma^2 \neq \sigma^2$ (yaitu struktur heteroskedastik)

Tabel 4.6

Hasil Pengujian LM

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 12/17/09 Time: 01:22

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

Cross-sections included: 135

Total pool (balanced) observations: 540

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.08E+10	4.27E+09	14.23482	0.0000
PDRB?	6325.034	885.6396	7.141769	0.0000
UG?	0.887032	0.010074	88.05329	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

(lanjutan)

Weighted Statistics			
R-squared	0.992994	Mean dependent var	6.94E+11
Adjusted R-squared	0.990629	S.D. dependent var	4.74E+11
S.E. of regression	3.07E+10	Sum squared resid	3.79E+23
F-statistic	419.9673	Durbin-Watson stat	2.283182
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.992806	Mean dependent var	3.72E+11
Sum squared resid	3.90E+23	Durbin-Watson stat	2.489622

Sumber: Hasil olah data.

Keputusan yang diambil dari hasil output ini adalah menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti bahwa struktur varian-covarian dari residual bersifat heterokedastik sebagaimana ditunjukkan secara lengkap dalam lampiran 9.

Kesimpulan yang diambil dari pengujian ini adalah pada tingkat kepercayaan sebesar 95%, dapat disimpulkan bahwa model estimasi *fixed effects* dengan struktur varian-kovarian heteroskedastik lebih baik daripada model estimasi *fixed effects* dengan struktur homoskedastik.

Setelah mengetahui struktur var-cov residual bersifat heteroskedastik, pengujian berikutnya adalah mengetahui apakah selain bersifat heteroskedastik, struktur var-cov residual mengandung *cross sectional correlation* atau tidak. Tetapi dikarenakan kondisi data yaitu jumlah *cross section* lebih besar dari pada *time series*, maka pengujian tersebut tidak dapat dilakukan. Sehingga model akhir yang digunakan adalah *fixed effect* dengan struktur var-cov residual bersifat heteroskedastik.

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi besaran belanja daerah untuk menentukan apakah dalam kaitannya dengan penerimaan transfer dari pemerintah pusat, berupa *unconditional grants*, pemerintah daerah akan berlaku asimetris dengan cara ketika penerimaan

daerah berasal dari transfer maka stimulasi belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah sendiri. Dalam hal ini pemerintah daerah akan memperbesar belanja daerahnya apabila sumber pendanaannya berasal dari transfer pusat jika dibandingkan apabila sumber pendanaannya berasal dari pendapatan daerah sendiri.

Hasil olah data dengan alat bantu perangkat lunak Eviews sebagaimana ditunjukkan dalam lampiran 9 memberikan model akhir yang terbentuk dari persamaan yang diuji sebagai berikut:

$$\text{Belanja}_i = (6,08(10^{10}) + \dots + 6.325,03\text{PDRBi} + 0,89\text{UGi} \dots \text{persamaan 5.1}$$

Nilai *adjusted R-Square* sebesar 0.9906 yang dihasilkan dari output Eviews menyatakan bahwa variabel bebas dalam model yaitu PDRB dan *Unconditional Grants* di suatu daerah tertentu mampu menjelaskan keragaman besarnya belanja daerah tersebut sebesar 99,06 persen, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel independen di luar model. Dari nilai *F-Statistic* sebesar 419,97 dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 99 persen, PDRB dan *Unconditional Grants* secara bersama-sama mempengaruhi belanja daerah. Dapat disimpulkan, PDRB dan *Unconditional Grants* berpengaruh positif terhadap belanja daerah².

Penerapan persamaan akhir ini terhadap 135 kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam penelitian memberi hasil akhir sebanyak 135 buah persamaan yang mewakili karakteristik masing-masing kabupaten/kota. Sebagai contoh, pada kasus kabupaten Aceh Selatan persamaan diatas menjadi sebagai berikut:

$$\text{Belanja}_{\text{Aceh Selatan}} = (6,08(10^{10}) + (-3,32.10^{10}) + 6.325,03\text{PDRBi} + 0,89\text{UGi}$$

$$\text{Belanja}_{\text{Aceh Selatan}} = (2,76.10^{10}) + 6325,03\text{PDRBi} + 0,89\text{UGi}$$

Contoh lainnya pada Kabupaten Cianjur akan memberi hasil sebagai berikut:

$$\text{Belanja}_{\text{Cianjur}} = (6,08(10^{10}) + (5,75.10^{10}) + 6.325,03\text{PDRBi} + 0,89\text{UGi}$$

² Hasil ini berbeda dibandingkan hasil uji dengan menggunakan data *cross section*. Pengujian data *cross section* menunjukkan bahwa *unconditional grants* berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah baik dengan maupun tanpa lag, sementara PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah apabila diuji tanpa lag. Jika digunakan lag satu tahun, PDRB memiliki signifikansi pengaruh terhadap belanja daerah sebagaimana terlihat dalam lampiran 10.

$$\text{Belanja}_{\text{Cianjur}} = (11,83 \cdot 10^{10}) + 6325,03 \text{PDRBi} + 0,89 \text{UGi}$$

Dari hasil persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa jika terjadi peningkatan PDRB sebesar satu juta rupiah maka akan terjadi kenaikan total belanja daerah sebesar Rp6.325,03 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima koma nol tiga rupiah) atau untuk setiap peningkatan satu rupiah dalam PDRB akan menyebabkan kenaikan belanja sebesar 0,006325 rupiah. Ketika terjadi kenaikan *Unconditional Grants* sebesar satu rupiah maka akan terjadi peningkatan belanja daerah sebesar 0,887032 rupiah. Jika pengaruh dari kedua variabel bebas tersebut digabungkan maka dapat dinyatakan bahwa untuk setiap kenaikan satu rupiah PDRB dan *Unconditional Grants* akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,893 rupiah.

Interpretasi seperti tersebut diatas dilakukan karena *run* data dalam penelitian ini menggunakan PDRB dalam satuan jutaan rupiah sedangkan *unconditional grants* dan belanja daerah menggunakan satuan rupiah. Dengan demikian, pengaruh *Unconditional Grants* terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PDRB terhadap belanja daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ditemukan adanya fenomena *flypaper effect*.

Selain itu, dengan memperhatikan koefisien *fixed effects* dari masing-masing daerah dapat disimpulkan bahwa rata-rata belanja tertinggi ditunjukkan oleh Kabupaten Badung dan rata-rata belanja terendah terjadi di Kabupaten Bandung.

Hipotesa 1 penelitian ini diterima, yaitu terdapat pengaruh positif dari PDRB dan *unconditional grants* terhadap belanja daerah. Pengaruh positif PDRB terhadap belanja daerah serupa dengan penelitian Adi (2006) dan Kustiani (2007). Sebagaimana dinyatakan oleh Adi (2006), pertumbuhan ekonomi suatu daerah memberikan dampak yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan belanja pemerintah daerah. Selain itu, hipotesis ini juga menunjukkan pengaruh positif *unconditional grants* terhadap Belanja Daerah. Hasil ini sejalan dengan temuan Holtz-Eakin et al (1994), Abdullah

dan Halim (2003), Maimunah dan Akbar (2008), serta Harianto dan Adi (2007) bahwa transfer pusat dalam bentuk dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja pemerintah daerah sekalipun dana tersebut bersifat *contingent* karena ditentukan oleh pemerintah pusat.

Secara implisit penelitian ini mengkonfirmasi perilaku perencanaan anggaran daerah yang akan memperhatikan besaran dana transfer dari pemerintah pusat, baik berbentuk DAU maupun DBH, dalam pembuatan kebijakan berkaitan dengan belanja daerah. Kenaikan dalam alokasi belanja daerah dipengaruhi oleh kenaikan besaran transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Penelitian Gamkhar dan Oates (1996) menemukan bahwa pengurangan jumlah transfer dari pemerintah federal akan menyebabkan penurunan dalam belanja daerah. Pola yang serupa dengan hal tersebut namun dengan tanda hubungan yang berbeda tampak dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa setiap kenaikan dalam *unconditional grants* yang diterima daerah akan diikuti dengan kenaikan pada belanja daerah.

Hipotesis 2 diterima, yang berarti bahwa pengaruh *Unconditional Grant* lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah dapat dibuktikan. Hasil ini konsisten dengan temuan Andersson (2002), Deller et al (2002), Legrenzi dan Milas (2001), Zampelli (1986), Abdullah dan Halim (2003) serta Maemunah dan Akbar (2008).

Secara rata-rata, nilai konstanta yang tinggi dalam persamaan akhir model penelitian ini menunjukkan besarnya kebutuhan belanja tetap (*fixed cost*) pemerintah daerah, terlepas dari ada atau tidaknya peningkatan dalam PDRB yang akan mempengaruhi pendapatan daerah dan *Unconditional Grants* yang diterima dari pemerintah pusat. Sebagai dampak dari tingginya kebutuhan belanja yang bersifat *fixed cost* maka alokasi belanja untuk kepentingan publik menjadi terbatas karena tergerus untuk pemenuhan kebutuhan operasional tetap tersebut. Tingginya kebutuhan operasional tetap ini dapat berasal dari rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2004), umumnya pemerintah daerah belum menjalankan fungsi dan perannya secara efisien. Fenomena umum yang terjadi di berbagai unit kerja pemerintah daerah adalah pemborosan dalam penggunaan anggaran. Kondisi tersebut muncul karena masih kuatnya pengaruh anggaran tradisional (*traditional budgeting*) dalam penganggaran daerah meskipun secara formal melalui Kepmendagri No 29 Tahun 2001, yang ditegaskan kembali dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, pemerintah daerah diharuskan menerapkan model penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Pendekatan yang lazim dipraktikkan dalam proses penganggaran daerah adalah penggunaan pendekatan *incrementalism* dalam penentuan besaran dana yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Pendekatan *incrementalism* mendasarkan metode penentuan besaran anggaran yang direncanakan kepada perubahan atas satu atau lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk, tanpa memedulikan keterkaitan/pengaruh dari variabel tersebut terhadap program dan kegiatan yang direncanakan. Apabila inflasi meningkat maka besaran alokasi dana untuk program dan kegiatan yang direncanakan otomatis juga meningkat. Selain itu, ciri lain yang melekat pada anggaran tradisional adalah *line item budget*, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mendasarkan pada *budget structur* atau pos anggaran yang telah ada sebelumnya. Pendekatan *line item budget* menyulitkan untuk menghilangkan pos-pos anggaran yang telah ada meskipun keberadaan pos anggaran tersebut secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja.

Lebih lanjut, Mardiasmo (2004) mengatakan bahwa lemahnya perencanaan belanja daerah tersebut memunculkan kemungkinan *underfinancing* maupun *overfinancing* dimana dampak dari keduanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja pada pemerintah daerah. Unit kerja yang mengalami *underfinancing* akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik, sementara unit kerja yang mengalami *overfinancing* berhadapan dengan tingkat efisiensi yang rendah.

Secara teoritis, terdapat hubungan antara PDRB dengan belanja daerah. PDRB yang tinggi mencerminkan potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi daerah. Apabila ekonomi daerah berkembang dengan baik, maka pungutan pajak dan retribusi daerah pun dipastikan dapat meningkat sehingga akan memperbesar pendapatan daerah.

Penjelasan atas rendahnya pengaruh PDRB terhadap belanja daerah diduga timbul karena masih kuatnya ketergantungan daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat. Kuncoro (2004) menyebutkan adanya tiga faktor penyebab atas ketergantungan tersebut. Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan daerah. Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung, ditarik oleh pusat. Ketiga, kendati pajak daerah cukup beragam, hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.

Ditinjau dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, distribusi kewenangan perpajakan antara pemerintah daerah dan dengan pemerintah pusat terjadi ketimpangan yang relatif besar. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis yang berdampak pada biaya yang relatif mahal, dan kemampuan masyarakat (Bappekki, 2006). Menurut Tjip Ismail (2005) dalam Irianto (2009), pajak dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan yang digali dari daerah itu sendiri hanya memberikan kontribusi sekitar 45% untuk provinsi dan 15% untuk kabupaten/kota terhadap total APBD. Sedangkan Kuncoro (2007) menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah maksimum sebesar 20%.

Relatif kecilnya peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total APBD tersebut mendorong timbulnya perilaku pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui penetapan pajak daerah dan retribusi daerah secara berlebihan. Hal tersebut dimungkinkan sebab pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk memungut pajak dan retribusi daerah

(*taxing power*), selain pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Bahkan dalam banyak kasus, pemerintah daerah memanfaatkan keleluasaan tersebut untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah tanpa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan seringkali bertentangan dengan kepentingan umum yang menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi. Hal tersebut terjadi karena banyak pemerintah daerah terobsesi semata-mata kepada peningkatan PAD dan belum melihat dari aspek ekonomi yang lebih luas seperti penciptaan iklim investasi yang kondusif yang akan mendorong pengembangan kegiatan ekonomi basis sehingga PDRB daerah akan meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pula penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Justru yang terjadi adalah orientasi jangka pendek dari upaya meningkatkan PAD tersebut berakibat kontradiktif terhadap peningkatan aktivitas perekonomian daerah dalam jangka panjang yang terwakili oleh tingkat PDRB daerah tersebut.

Pajak daerah dan retribusi daerah seharusnya mampu membiayai belanja pemerintah daerah. Perbedaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan perbedaan penerimaan yang selanjutnya menghasilkan pula perbedaan belanjanya. Di sisi lain, perbedaan pendapatan asli daerah antar pemerintah daerah tidak selalu mewakili potensinya, akibat adanya persaingan pajak antar daerah. Demikian pula, perbedaan belanja antar pemerintah daerah tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakatnya akibat adanya persaingan pengeluaran antar daerah.

Penjelasan lain yang dapat diberikan atas lebih besarnya pengaruh *Unconditional Grant* terhadap belanja daerah daripada pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap belanja daerah adalah hal tersebut mungkin timbul karena dalam perumusan kebijakan belanja daerah, para perencana anggaran kurang memperhitungkan aspek ekonomi makro yang terjadi di daerahnya. Para perencana anggaran tampaknya lebih memperhatikan proses politik dalam penyusunan anggaran daerah sehingga kurang memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomisasi. Willoughby seperti dikutip dalam McCue (1999) mengatakan bahwa para

perencana anggaran yang memiliki jam terbang tinggi dan berstatus senior, oleh karenanya memiliki peranan yang cukup kuat dalam proses perencanaan anggaran, lebih merespon isu-isu politis dan menyesuaikan keputusannya dalam perencanaan anggaran dengan pengaruh politis tersebut serta lebih menggunakan informasi politis dalam pengambilan keputusan daripada memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks Indonesia, apa yang disebutkan Willoughby tersebut tidak dapat dikesampingkan mengingat kuatnya muatan proses politik dalam penganggaran daerah. Penentuan kebijakan belanja daerah sangat kuat dipengaruhi oleh kebijakan elit daerah sehingga para perencana anggaran lebih memperhatikan informasi yang dikemukakan oleh para pembuat kebijakan seperti kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala daerah, dan/atau DPRD.

Hasil estimasi dalam penelitian ini juga konsisten dengan temuan Abdullah dan Halim (2003), Alderete (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007), serta Maimunah dan Akbar (2008) yang menyatakan indikasi kuat terjadinya *flypaper effect* dalam kasus-kasus penelitian mereka dimana stimulus terhadap belanja daerah yang ditimbulkan oleh transfer pusat (*grants*) lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan daerah sendiri.

Temuan Dollery dan Worthington (1995) menggunakan data di Australia menegaskan bahwa keberadaan *flypaper effect* menyebabkan transfer dana bantuan dari yurisdiksi pemerintah federal pada yurisdiksi pemerintah lokal akan mengalami ilusi fiskal. Senada dengan Dollery dan Worthington, Ndadari dan Adi (2008) dengan teknik manipulasi belanja (*expenditure manipulation*) pada kasus di Indonesia juga menemukan bahwa terdapat kecenderungan adanya ilusi fiskal dalam bentuk pada saat pemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat dana tersebut digunakan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing daerah.

Hasil estimasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan *unconditional grants* sebesar satu rupiah akan direspon oleh

daerah dengan meningkatkan belanja daerahnya sebesar 0,887032 rupiah sementara peningkatan satu rupiah PDRB akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,006325 rupiah. Terlihat dengan jelas, dalam kasus ini, indikasi ketidakhati-hatian dari penggunaan dana transfer pusat yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah sehingga belum mencerminkan pencapaian tujuan efisiensi ekonomi dalam penerapan desentralisasi fiskal.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, transfer antarpemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Sayangnya, alokasi transfer di negara-negara berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah tersebut. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengembangkan basis pajak dan retribusi daerah secara lebih optimal. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Keadaan tersebut juga dapat kita temui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia.

Dalam jangka panjang ketergantungan tersebut harus dikurangi guna menciptakan kemandirian daerah dalam mengelola fungsi pemerintahan dan keuangan daerah. Merujuk kepada pendapat Glasson (1987) dalam Elmi (2002), seharusnya pemerintah daerah menggunakan dana transfer yang diterimanya untuk dialokasikan pada belanja daerah yang menitikberatkan upaya memajukan perekonomian daerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi basis. Kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*), menurut Glasson, adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, dan menjualnya atau memasarkan produk-produknya keluar daerah. Sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis (*non basic activities*) adalah usaha ekonomi yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam wilayah ekonomi daerah yang bersangkutan saja. Menurut pendapat ini, meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi basis di

dalam suatu daerah akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di daerah itu dan akan mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi bukan basis (*effect multiplier*). Sebaliknya apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis, akan berakibat berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan selanjutnya akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh kegiatan bukan basis. Dengan demikian, kemajuan perekonomian suatu daerah yang akan berdampak positif pada pendapatan daerah mensyaratkan upaya-upaya daerah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi basis. Dalam konteks ini, ketersediaan anggaran untuk mendanai kebutuhan belanja dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi basis menjadi relevan untuk diperhatikan.

Dominannya peran transfer dana bantuan terhadap pendapatan daerah dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan dampak yang baik bagi penggunaan terhadap aliran transfer itu sendiri. Bukti-bukti empiris dalam bentuk *flypaper effect* dan ilusi fiskal telah banyak menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berdampak negatif dengan hasil pengelolaannya. Kuncoro (2007) menyebutkan bahwa peningkatan alokasi transfer dari pemerintah pusat akan diikuti dengan pertumbuhan belanja daerah yang lebih tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya indikasi ketidakhati-hatian dari perilaku belanja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan belanja operasional. Menurut Moisis (2002), pemerintahan daerah akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan usaha (*effort*) sendiri dibandingkan jika pendapatan tersebut diperoleh dari pihak lain seperti *grants*/transfer.

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN SERTA IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Simpulan

Kebijakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang tidak dapat ditawarkan. Namun demikian, pelaksanaan dari kebijakan ini haruslah tetap mengacu kepada salah satu pertimbangan pokok dari penerapan desentralisasi fiskal menurut perspektif kepentingan ekonomi, yaitu sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik. Oleh karenanya, diperlukan evaluasi secara terus menerus apakah tujuan dari upaya untuk mencapai efisiensi ekonomi (*maximizing social welfare*) dalam penyediaan barang publik pada tingkat lokal melalui kebijakan desentralisasi fiskal dapat dipenuhi ataukah tidak. Fenomena *flypaper effect* merupakan bentuk pembuktian adanya indikasi ketidakhatian yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah atas pemanfaatan dana transfer yang diterimanya dari pemerintah pusat. Fenomena ini menunjukkan perilaku asimetris dari pemerintah daerah dalam merespon dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, diperoleh simpulan berupa:

1. Hasil pengujian membuktikan bahwa *Unconditional grants* dan PDRB berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Simpulan ini merupakan implikasi dari penerimaan atas hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini.
2. Pengujian atas hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa fenomena *flypaper effect* berkaitan dengan respon atas dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan respon PDRB terhadap belanja daerah dapat dibuktikan telah terjadi. Temuan ini menegaskan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa pemerintah

daerah terindikasi belum mampu memanfaatkan secara hati-hati (*prudent*) dana transfer yang diterimanya. Hal ini mengindikasikan bahwa salah satu tujuan dari penerapan desentralisasi fiskal menurut perfektiv ekonomi belum dapat dicapai.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih mengandung keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Model yang digunakan masih sangat sederhana. Model tersebut belum mampu menggambarkan dengan baik variabel-variabel yang mempengaruhi belanja daerah sehingga belum dapat memberikan penjelasan yang komprehensif berkaitan dengan perilaku pemerintah daerah dalam merespon dana transfer yang diterimanya dari pemerintah pusat. Akan lebih baik, jika dalam penelitian selanjutnya dimasukkan pula variabel pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi penganggaran daerah seperti jenis sistem penganggaran yang digunakan, informasi politis berupa pelibatan proses politik dalam penganggaran, dan informasi analitis yaitu analisis atas biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) yang digunakan para perencana anggaran dalam memutuskan kebijakan berkaitan dengan belanja daerah. Informasi analitis bermanfaat untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dari keputusan yang diambil dalam perencanaan anggaran.
- b. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini tidak dapat memberikan gambaran yang akurat tentang perilaku perencana anggaran dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan belanja daerah. Kuatnya proses dan kepentingan politik dalam penyusunan APBD memerlukan pendekatan yang lebih *feasible* melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer melalui pelibatan para perencana penganggaran di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD.

5.3 Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini berimplikasi kepada para perencana anggaran daerah untuk memperbaiki cara daerah dalam merespon dana transfer berupa *unconditional grants* yang diterima dari pemerintah pusat. Diperlukan kesadaran yang tinggi bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang saat ini diterapkan dimaksudkan untuk mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap sehingga memahami preferensi masyarakatnya dengan baik. Upaya yang lebih serius untuk mencapai tujuan tersebut harus terus-menerus ditempuh oleh pemerintah daerah. Selain itu perlu disadari bahwa desentralisasi fiskal hanyalah sebuah alat/instrumen dalam rangka menciptakan efisiensi secara ekonomi berkenaan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, keberhasilan mewujudkan tujuan-tujuan dari penerapan desentralisasi fiskal sangat tergantung dari cara pemerintah daerah mengartikulasikan hal tersebut melalui kebijakan-kebijakan daerah yang berimplikasi pada penggunaan belanja daerah.

Bagi para pengambil kebijakan ditingkat Pusat dan akademisi, hasil penelitian ini mengundang pemikiran untuk mengevaluasi kembali apakah konsep dan praktik yang selama ini berjalan telah sesuai dengan tujuan awal dari penerapan desentralisasi fiskal. Diperlukan upaya-upaya korektif dan inovatif untuk memperbaiki deviasi yang terjadi terutama berkaitan dengan indikasi ketidakhati-hatian berkaitan dengan perilaku belanja yang ditunjukkan oleh daerah dalam merespon transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk *unconditional grants* sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abimanyu, Anggito & Andi Megantara, Editor. 2009. Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Kompas. Jakarta.
- Abdullah, Syukry dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi*, VI, 1140-1159.
- Andersson, Lars. 2002. The Effect of Swedish Local Public Expenditure of a Change in Swedish Intergovernmental Grants System. University of Lund. *Working Paper*.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Depkeu. 2006. *Pengantar Keuangan Publik*. LPKPAP Press. Jakarta.
- Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (Bapekki). Depkeu. 2006. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia.
- Baltagi, B.H. 2005. *Econometric Analysis of Data Panel*. England: John Wiley & Sons Ltd.
- Bird, Richard M dan Francois Vaillancourt. 1998. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Bradford, D & Wallace Oates. 1971. Toward a Predictive Theory of Intergovernmental Grants. *American Economic Review* 61 (2): 440-448.
- Brotodihardjo, Santoso, R, S.H. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco. Bandung.
- Cooper dan Emory. 1997. *Metode Penelitian Bisnis*. Erlangga. Jakarta.
- Worldbank. Desember 2008. Mengoptimalkan kontribusi desentralisasi bagi pembangunan: metodologi kerangka kerja pengukuran kinerja Pemda. Decentralization Support Facility Report.
- Deller, Steven, Craig Maher dan Victor Lledo. 2002. Wisconsin Local Government, State Share Revenue and The Illusive Flypaper Effect. *University of Wisconsin-Madison*, Working Paper.
- Deller, Steven, Craig Maher. 2005. Categorical Municipal Expenditures With a Focus on The Flypaper Effect. *Public Budgeting/Fall*.

Universitas Indonesia

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2003. White Paper Corrected. Tidak dipublikasikan.
- _____.2008. Pelengkap Buku Pegangan: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
- Dollery, Brian dan Andrew Worthington.1995. Federal Expenditure and Fiscal Illusion: A Test of the Flypaper Hypothesis in Australia. *Publius*, Vol. 25, No.1, pp. 23-34.
- Elmi, Bachrul. 2002. Studi Peningkatan Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Lampung Utara. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2003.
- Gan Jun, Hong Fei dan Gang Chen, 2005: Intergovernmental Fiscal Transfer System – A New Model From A Comparison Between Sweden and China, *Kristianstad University*, Mei.
- Gamkhar, Shama dan Wallace Oates. 1996. Asymetries in Response to Increase and Decrease in Intergovernmental Grants; Some Empirical Findings. *National Tax Journal*. 49 (4) 501-512.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basics Econometrics. International Edition*. McGraw-Hill Companies, Inc. Singapore.
- Ghazali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi III. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Gruber, Jonathan. 2007. *Public Finance and Public Policy*. Second Edition. Worth Publiser, New york.
- Haris, Syamsuddin. Editor. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta. LIPI Press.
- Hines, J.R. dan Richard H. Thaler. 1995. Anomalities: The Flypaper Effect. *Journal of Economic Perspectives* 9 (4); 217-226.
- Hyman, David N. 2002. *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*. Seven Edition. United States: South-Western, Thompson Learning.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rossen dan Scuyler Tilly.1994. Intertemporal Analysis of State in Local Government Spending: Theory and Test. *Journal of Urban Economics*. 35:159-174.

- _____. Whitney Newey, dan Harvey Rossen. 1985. Implementing Causality Test with Panel Data, With an Example From Local Public Finance. *NBER Technical Working Paper* No. 48.
- Irianto, Edi Slamet. 2009. *Pajak dan Negara Demokrasi: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Laksbang Mediatama.
- Kuncoro, Haryo. 2007. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Atas Perubahan Besaran Transfer dari Pemerintah Pusat. *The 1st Accounting Conference Faculty of Economic Universitas Indonesia*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Kustiani, Nur Aisyah. 2007. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. *Tesis pada Program Studi Akuntansi UGM* (tidak dipublikasikan).
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi, 2008, Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS Surabaya*, 6 September 2008.
- Legrenzi, Gabriela dan Costas Milas. 2001. Non-linier and Asymetric Adjustment in Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from the Italian Municipalities. University of Milan. *Working Paper*.
- Logan, R. Robert, 1986. Fiscal Illusion and the Grantor Government. *Journal of Political Economy*, Vol. 94., No.6, pp. 1304-1318.
- Maemunah, Mutiara dan Rusdi Akbar. 2008. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.11. No.1. Januari 2008. Hal 37-51.
- Mankiw, Gregory. 2003. *Macroeconomics*. 5th Edition. Worth Publishers. New York.
- Mardiasmo. 2004a. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2004b. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- McCue, Clifford P. 1999. The Impact of Objective and Emphatic Disposition on Local Government Budget Analyst's Spending Preferences. *Public Budgeting and Finance* 19, no. 1, Spring, 89-114.

- Moisio, Antti. 2002. *Essays on Finish Municipal Finance and Intergovernmental Grants*. Helsinki: *Government Institut for Economic Research*.
- Oates, E. Wallace. 1979. "On the Nature and Measurement of Fiscal Illusion: A Survey". *Taxation and Fiscal Federalism*, pp. 65-85..
- _____. 1999. An Essay of Fiscal Federalism. *Journal of Economics Literature* 37: 1120-1149.
- Puspa Dewi Ekaristi, 2007. Kecenderungan Adanya Fiscal Illusion dalam APBD: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah. *Skripsi Program SI FE UKSW* (tidak dipublikasikan).
- Prachmasetiawan, Fayota. 2006. *Pergerakan Pembentukan Modal Tetap Bruto Sektor di Indonesia serta Variabel-Variabel Ekonomi Makro yang Mempengaruhinya*. [skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Priyo Hari Adi, 2006, Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Riduan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung. Alfabeta.
- Republik Indonesia. 2006. *Buku Pegangan: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*.
- _____. UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- _____. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Revisi Pertama atas UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999.

- ___ . UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Revisi Pertama atas UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999.
 - ___ . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - ___ . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
 - ___ . Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- Rossen, Harvey. 2005. *Public Finance*. Sixth Edition. McGraw-Hill. New York.
- Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, & Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta. Penerbit Kompas.
- Singgih, Riphath & Heru Subiyantoro, Editor. 2003. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Kompas. Jakarta.
- Scheider, Mark. 1986. Changing Intergovernmental Aid and Local Government expenditure Patterns. *Polity*, Vol. 19, No. 2, pp. 254-269.
- Slack, Enid. 1980. Local Fiscal Response to Intergovernmental Transfer. *The Review of Economics and Statistics* 63: 364-370.
- Ter-Minassian, Teresa. 1997. *Fiscal Federalism in Theory and Practice*. International Monetary Fund. Washington D.C.
- Ulbrich, Holley. 2003. *Public Finance in Theory and Practice*. United States: South-Western. Thompson Learning.
- Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UI.
- Widiastuti, Budiasih. 2007. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Penggunaan Informasi Analitis dan Politis Dalam Penyusunan Anggaran: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis pada Program Studi Akuntansi UGM* (tidak dipublikasikan).
- Winarno, Wing Wahyu. 2007. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Wulandari. 2009. *Identifikasi Lokasi Pemusatan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemakmuran Provinsi Riau Tahun 1995-2007*. [skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.

Yustika, Achmad Erani. Editor. 2008. *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Banyumedia. Malang.

Zampelli, Ernest M. 1986. Resource Fungibility, The Flypaper Effect, and The Expenditure Impact of Grants-in-Aid. *The Review of Economics and Statistics* 67:33-40.



Universitas Indonesia

Lampiran 1: Data Belanja Daerah

No	Kabupaten/Kota	BELANJA TOTAL			
		2003	2004	2005	2006
1	Kab. Aceh Selatan	203,467,997,445	213,086,108,662	212,317,980,852	280,454,286,500
2	Kab. Aceh Utara	665,092,404,308	733,629,734,258	686,384,978,312	886,037,422,478
3	Kota Banda Aceh	223,030,268,943	220,369,147,255	250,740,945,308	374,536,574,886
4	Kota Lhokseumawe	153,965,253,702	189,199,734,376	198,482,178,553	269,751,313,103
5	Kab. Labuhan Batu	354,608,751,700	405,279,763,622	366,735,809,288	482,000,855,189
6	Kab. Lima Puluh Kota	215,282,056,500	234,789,674,973	217,137,621,619	319,017,645,258
7	Kab. Agam	247,621,902,898	253,393,779,339	254,591,705,114	352,148,302,931
8	Kab. Padang Pariaman	227,124,608,481	242,391,715,264	261,912,438,597	339,566,722,127
9	Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawah Lunto	249,348,834,221	246,549,176,047	270,884,408,077	392,517,880,132
10	Sijunjung	230,427,103,655	231,513,524,877	165,317,794,606	231,594,737,533
11	Kab. Tanah Datar	220,971,299,307	236,854,713,773	260,501,517,565	362,173,528,129
12	Kota Bukit Tinggi	135,956,749,436	157,666,273,334	156,261,074,578	224,543,362,613
13	Kota Padang Panjang	94,077,210,903	110,155,024,463	127,151,472,374	156,853,074,368
14	Kota Padang	388,433,101,568	406,617,350,386	456,459,673,454	614,440,064,378
15	Kota Sawah Lunto	107,735,362,117	117,766,800,625	127,990,659,618	191,842,036,479
16	Kota Solok	84,696,824,678	99,045,647,939	111,524,413,273	170,079,333,105
17	Kota Dumai	256,094,623,023	326,607,322,624	344,837,451,963	541,906,904,837
18	Kota Pekanbaru	427,604,044,014	484,116,881,429	579,617,248,825	861,442,478,375
19	Kab. Muara Enim Kab. Ogan	342,939,202,042	383,550,927,345	398,845,492,585	523,205,068,476
20	Komering Ilir Kab. Ogan	410,141,950,459	441,199,417,108	336,447,894,965	575,762,938,873
21	Komering Ulu	440,246,859,342	456,305,841,491	246,971,194,881	461,743,651,768
22	Kota Palembang	576,954,151,947	607,393,411,380	650,848,528,287	837,624,831,285
23	Kota Lubuk Linggau	139,168,409,214	164,303,098,136	187,814,542,051	284,140,226,313
24	Kota Bengkulu	200,961,692,235	213,124,810,294	214,966,790,509	318,014,653,545
25	Kab. Bandung	974,697,274,256	1,131,347,500,322	1,116,463,018,122	1,428,504,346,044
26	Kab. Bekasi	615,168,210,457	645,172,902,227	709,698,694,507	914,577,975,386
27	Kab. Bogor	803,164,134,063	974,948,086,640	1,036,793,638,002	1,317,209,232,168
28	Kab. Ciamis	573,681,697,337	543,539,159,986	553,932,205,272	765,512,787,755
29	Kab. Cianjur	509,480,762,482	549,469,746,310	593,350,788,002	843,913,476,455
30	Kab. Cirebon	530,394,006,695	563,389,101,002	615,216,649,732	897,216,871,516
31	Kab. Karawang	577,980,632,584	590,640,015,978	641,560,660,475	943,631,279,053
32	Kab. Majalengka	396,736,823,637	428,868,138,114	464,530,878,622	669,936,064,616
33	Kab. Sumedang	436,761,773,033	440,904,717,966	491,442,388,923	680,870,120,376
34	Kab. Tasikmalaya	451,462,120,846	501,801,907,736	520,600,935,557	768,323,437,486
35	Kota Bandung	945,824,118,037	975,023,708,153	1,063,935,147,031	1,266,047,202,038
36	Kota Bekasi	544,235,548,575	599,613,637,735	728,857,950,813	882,004,547,483
37	Kota Depok	369,955,270,133	445,993,759,881	464,519,874,442	538,073,189,349
38	Kota Sukabumi	202,054,109,112	215,174,584,558	223,062,128,746	314,571,533,503
39	Kab. Banjarnegara	331,694,773,347	344,791,092,232	378,293,970,144	506,621,230,571
40	Kab. Banyumas	471,777,489,245	488,534,615,537	530,107,401,000	719,957,771,996
41	Kab. Batang	296,802,726,358	325,408,820,632	308,154,566,810	404,498,739,494

(lanjutan)

42	Kab. Brebes	470,672,925,657	475,275,796,252	464,410,664,392	599,590,060,416
43	Kab. Jepara	370,344,030,830	385,527,376,770	400,645,112,519	539,719,314,322
44	Kab. Kebumen	431,376,490,593	427,806,043,000	413,258,856,921	618,432,099,034
45	Kab. Kendal	407,490,038,631	396,809,054,666	367,266,316,501	552,963,070,961
46	Kab. Kudus	329,560,865,239	335,573,020,784	427,004,400,912	476,423,462,345
47	Kab. Magelang	390,323,605,243	417,632,227,154	437,500,556,088	622,366,920,130
48	Kab. Pati	419,773,703,274	437,343,084,178	451,685,459,719	575,823,830,400
49	Kab. Pekalongan	304,568,124,707	311,462,405,221	331,532,725,716	446,989,523,789
50	Kab. Sukoharjo	336,907,115,882	328,493,079,279	329,114,344,786	486,776,428,653
51	Kab. Tegal	445,003,505,592	439,398,557,073	427,668,987,504	605,018,460,007
52	Kab. Temanggung	321,522,391,734	307,170,941,343	256,108,688,418	423,688,683,555
53	Kota Magelang	178,912,850,744	175,413,688,838	172,093,791,351	242,473,466,291
54	Kota Pekalongan	168,958,372,426	180,287,993,207	179,365,494,329	259,991,665,632
55	Kota Salatiga	161,956,862,130	168,950,587,817	172,199,400,471	225,668,718,901
56	Kota Semarang	663,887,745,711	661,416,258,853	684,142,487,549	927,235,654,556
57	Kab. Bantul	389,277,630,535	396,426,751,200	416,685,981,657	545,132,135,934
58	Kab. Kulon Progo	280,647,401,211	311,321,679,215	285,578,026,460	458,909,862,112
59	Kab. Sleman	447,510,459,807	480,259,487,283	507,779,543,760	609,765,408,528
60	Kota Yogyakarta	305,351,032,428	370,340,575,770	397,401,269,021	496,768,977,052
61	Kab. Bangkalan	302,412,328,271	381,168,166,831	360,323,197,941	500,510,391,073
62	Kab. Banyuwangi	494,763,614,355	481,882,143,681	497,608,732,079	681,285,786,185
63	Kab. Bondowoso	321,468,537,304	312,932,018,248	314,999,276,831	410,793,561,724
64	Kab. Gresik	391,295,404,691	438,442,594,932	455,254,096,896	624,696,025,113
65	Kab. Lamongan	388,427,177,978	415,059,538,274	446,670,852,065	623,534,414,105
66	Kab. Madiun	310,290,460,938	317,094,198,091	311,928,777,549	445,617,463,078
67	Kab. Malang	627,317,446,126	599,157,809,984	645,714,729,154	908,075,765,061
68	Kab. Mojokerto	406,067,985,182	382,994,933,800	352,018,247,498	474,040,861,478
69	Kab. Ngawi	284,301,484,362	283,922,113,088	328,398,846,209	483,372,063,713
70	Kab. Pasuruan	537,671,565,294	580,236,005,087	533,839,339,509	654,679,934,932
71	Kab. Sidoarjo	591,920,738,747	610,660,499,924	692,530,164,225	972,843,838,618
72	Kab. Situbondo	313,908,758,228	285,821,968,496	283,956,872,986	387,323,650,432
73	Kab. Tuban	394,829,122,615	421,354,415,086	427,850,767,372	571,662,006,753
74	Kota Blitar	162,663,851,025	174,803,910,780	179,119,538,440	242,664,495,120
75	Kota Malang	330,152,763,997	382,175,130,464	418,372,786,500	511,284,964,424
76	Kota Pasuruan	177,980,486,482	167,196,022,261	175,387,909,593	211,195,266,798
77	Kab. Kapuas Hulu	265,428,413,492	249,322,658,155	260,879,944,475	495,719,197,247
78	Kab. Pontianak	303,572,139,328	310,862,886,301	347,932,805,683	521,758,889,734
79	Kab. Sambas	261,566,817,065	257,370,511,168	272,411,883,537	423,856,267,045
80	Kab. Sintang	314,875,437,049	320,632,051,283	255,349,306,009	468,406,607,985
81	Kab. Barito Selatan	157,374,409,587	192,094,223,033	188,318,602,973	313,061,259,934
82	Kab. Kotawaringin Barat	167,386,727,501	199,424,984,422	240,359,251,663	353,891,444,644
83	Kota Palangka Raya	193,237,843,715	193,418,291,949	215,193,585,415	305,986,271,715
84	Kab. Banjar	241,715,906,086	254,591,583,572	269,126,778,245	408,212,918,738
85	Kab. Barito Kuala	173,027,970,022	195,246,476,873	206,903,414,824	278,952,826,835
86	Kab. Hulu Sungai Tengah	173,218,654,681	178,144,117,641	194,078,073,312	306,202,848,084

(lanjutan)

87	Kab. Tabalong	204,545,426,290	204,767,463,550	225,869,472,646	348,401,008,331
88	Kab. Tanah Laut	165,222,402,535	176,501,081,591	202,379,929,323	298,316,123,506
89	Kab. Tapin	156,568,536,689	170,579,000,722	173,737,652,148	293,662,962,456
90	Kota Banjarmasin	289,322,244,160	302,955,697,979	302,054,133,533	384,551,321,269
91	Kota Samarinda	661,714,203,354	605,084,557,860	554,177,192,217	857,009,843,643
92	Kab. Baru	140,348,015,377	187,367,664,637	181,792,280,184	215,219,807,415
93	Kab. Bone	324,034,789,042	347,192,375,292	365,797,586,757	581,926,694,496
94	Kab. Jeneponto Kab. Sidenreng Rappang	188,235,351,624	180,504,782,388	208,953,140,813	300,674,199,737
95	Rappang	183,069,671,968	223,394,140,120	239,964,808,496	331,902,293,682
96	Kab. Sinjai	177,210,894,268	185,045,006,342	182,664,324,583	326,369,374,186
97	Kab. Soppeng	171,391,423,496	177,112,413,279	201,594,107,533	320,928,895,458
98	Kab. Takalar	178,542,444,618	171,239,466,424	187,871,481,018	278,439,464,475
99	Kab. Tana Toraja	247,078,905,015	263,273,891,108	278,130,456,765	383,733,389,838
100	Kab. Wajo	244,634,761,562	204,366,146,323	237,661,913,518	284,445,178,117
101	Kota Pare-Pare	155,444,738,909	173,248,838,966	166,118,581,362	249,092,369,900
102	Kota Makassar	530,280,693,013	548,737,082,621	586,282,186,677	811,194,389,066
103	Kota Palopo	70,667,369,152	120,130,945,811	158,990,254,050	231,733,324,216
104	Kab. Buton	241,653,132,728	267,890,313,712	227,038,883,707	305,135,836,474
105	Kab. Badung	458,479,948,712	549,833,710,273	700,381,721,188	639,925,841,619
106	Kab. Bangli	181,840,561,513	183,671,006,887	195,920,876,903	278,759,659,122
107	Kab. Jembrana	215,715,913,661	211,700,295,185	225,850,900,993	329,935,103,829
108	Kab. Karangasem	247,036,264,352	254,458,476,164	255,389,807,090	392,602,790,160
109	Kab. Klungkung	173,409,926,250	205,544,107,254	197,088,628,335	287,674,954,490
110	Kab. Tabanan	328,842,879,024	317,446,233,142	324,659,537,513	457,480,990,557
111	Kota Denpasar	357,368,802,882	349,241,459,388	349,909,726,218	512,994,264,849
112	Kab. Bima	261,742,827,032	255,999,546,183	287,157,744,466	401,020,285,524
113	Kab. Lombok Barat	303,035,449,404	302,164,027,993	311,404,402,799	462,060,899,133
114	Kab. Lombok Tengah	286,603,897,151	313,133,095,467	330,666,289,119	437,550,994,559
115	Kab. Lombok Timur	362,624,834,293	386,694,890,276	386,598,410,394	540,823,547,573
116	Kab. Sumbawa	311,495,872,395	305,482,824,012	249,096,251,185	350,876,418,928
117	Kota Mataram	216,162,852,002	216,061,578,411	235,579,051,672	319,398,823,034
118	Kota Bima	99,272,835,305	117,012,334,315	150,092,113,053	228,680,481,263
119	Kab. Ende	197,230,160,461	228,741,826,870	213,245,220,039	285,326,167,694
120	Kab. Kupang	209,394,570,706	238,569,788,429	245,161,512,739	318,889,148,715
121	Kab. Manggarai	305,568,823,227	227,408,751,405	257,594,117,314	385,172,681,733
122	Kab. Sikka	179,927,470,229	188,956,475,628	199,929,349,471	310,760,634,580
123	Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan	181,368,654,072	200,556,061,401	197,322,474,877	298,115,955,536
124	Kab. Timor Tengah Utara	249,317,292,470	273,624,779,922	271,237,060,509	371,789,536,411
125	Kab. Maluku Tenggara Barat	193,149,758,488	187,156,754,703	188,203,987,565	264,198,864,634
126	Kota Ambon	195,970,133,533	205,734,844,998	216,228,016,029	292,484,845,658
127	Kab. Fak-Fak	234,378,437,047	253,007,825,431	238,495,637,346	350,092,409,443
128	Kota Temate	284,067,053,419	268,296,044,931	238,941,430,395	398,029,320,338
129		180,051,455,236	183,413,454,277	199,968,415,653	277,847,438,407

(lanjutan)

130	Kab. Lebak	328,074,920,392	334,735,922,045	379,746,820,913	564,769,798,743
131	Kab. Serang	504,107,223,885	530,240,058,519	539,834,141,932	762,283,131,568
132	Kota Cilegon	230,623,285,126	238,985,972,606	289,852,110,570	404,438,185,238
133	Kota Tangerang	542,254,102,865	559,340,892,207	586,791,556,362	798,035,323,534
134	Kota Pangkal Pinang	133,929,047,952	150,278,874,150	160,927,418,554	224,761,689,433
135	Kota Gorontalo	166,694,065,623	181,786,217,188	200,265,945,364	268,980,319,526



Lampiran 2: Data PDRB

No	Kabupaten/Kota	PDRB (jutaan)			
		2003	2004	2005	2006
1	Kab. Aceh Selatan	1,264,798.94	1,389,127.72	1,491,324.52	1,629,827.66
2	Kab. Aceh Utara	15,569,521.41	15,056,380.21	10,816,900.73	11,704,135.56
3	Kota Banda Aceh	1,644,289.23	1,816,930.39	1,913,509.10	2,389,815.70
4	Kota Lhokseumawe	9,086,905.32	10,326,546.97	11,039,714.97	12,493,939.13
5	Kab. Labuhan Batu	8,325,972.49	9,433,928.49	10,918,368.82	12,584,460.07
6	Kab. Lima Puluh Kota	2,341,457.35	2,631,984.28	3,080,907.08	3,650,211.43
7	Kab. Agam	2,555,713.48	2,867,878.81	3,377,957.22	3,924,766.90
8	Kab. Padang Pariaman	2,129,810.87	2,382,875.33	2,987,169.75	3,890,122.59
9	Kab. Pesisir Selatan	1,758,364.42	1,945,314.40	2,274,857.20	2,654,284.26
10	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	2,117,278.63	1,291,210.77	1,531,897.95	1,816,580.00
11	Kab. Tanah Datar	2,187,406.79	2,447,852.53	2,866,854.86	3,394,755.57
12	Kota Bukit Tinggi	829,317.11	920,856.82	1,086,485.21	1,268,658.90
13	Kota Padang Panjang	350,560.19	393,385.53	468,223.65	549,189.83
14	Kota Padang	10,312,735.98	11,508,984.85	13,266,059.83	15,294,258.13
15	Kota Sawah Lunto	516,909.24	570,068.69	619,543.77	676,876.48
16	Kota Solok	438,682.30	492,616.68	574,524.42	675,828.39
17	Kota Dumai	3,281,489.00	3,903,778.83	4,213,146.52	4,933,768.75
18	Kota Pekanbaru	9,005,345.73	11,317,386.14	13,886,876.06	16,961,564.59
19	Kab. Muara Enim	7,509,230.00	8,405,577.00	10,818,482.00	13,191,094.00
20	Kab. Ogan Komering Ilir	4,319,603.84	3,126,162.00	3,564,496.00	4,106,422.00
21	Kab. Ogan Komering Ulu	5,534,343.22	2,760,564.00	3,208,606.00	3,652,873.00
22	Kota Palembang	16,815,477.91	19,287,616.00	24,595,161.72	29,589,817.00
23	Kota Lubuk Linggau	905,294.22	1,022,036.00	1,155,493.00	1,297,623.00
24	Kota Bengkulu	1,911,171.00	2,159,290.00	2,677,466.00	3,043,244.85
25	Kab. Bandung	28,254,991.71	29,369,511.73	34,896,555.58	29,431,046.08
26	Kab. Bekasi	43,060,017.56	48,186,121.23	57,017,160.45	66,239,906.50
27	Kab. Bogor	26,990,272.23	4,515,746.82	38,182,119.76	44,792,697.65
28	Kab. Ciamis	6,692,906.63	7,529,932.01	9,247,507.49	10,781,601.90
29	Kab. Cianjur	8,230,557.09	9,311,862.52	10,776,519.05	12,500,528.11
30	Kab. Cirebon	7,135,184.52	7,828,405.40	9,760,060.84	11,289,660.24
31	Kab. Karawang	17,879,183.49	20,884,035.65	25,804,277.61	31,503,238.21
32	Kab. Majalengka	3,822,014.61	4,357,110.75	5,135,156.69	5,904,319.41
33	Kab. Sumedang	5,338,797.54	5,943,299.64	7,048,210.76	8,066,643.34
34	Kab. Tasikmalaya	5,256,443.57	5,744,963.73	7,253,242.01	8,183,081.48
35	Kota Bandung	24,153,671.20	28,263,062.89	35,112,107.22	43,491,378.40
36	Kota Bekasi	13,214,641.49	15,620,224.44	19,226,331.12	22,855,154.21
37	Kota Depok	5,565,095.82	6,331,423.87	7,541,666.15	8,967,779.01
38	Kota Sukabumi	1,668,626.64	1,893,746.85	2,402,017.43	2,863,431.70
39	Kab. Banjarnegara	2,896,595.96	3,216,818.03	3,719,943.76	4,156,373.77
40	Kab. Banyumas	4,365,914.66	4,835,240.50	5,580,804.33	6,428,219.55
41	Kab. Batang	2,461,452.48	2,660,659.53	3,110,086.51	3,503,532.46
42	Kab. Brebes	5,384,513.23	5,986,162.75	7,325,401.19	8,402,067.26
43	Kab. Jepara	4,010,481.68	4,383,716.46	5,018,164.15	5,677,316.95

(lanjutan)

44	Kab. Kebumen	2,890,492.69	3,060,653.43	3,502,963.09	4,082,203.22
45	Kab. Kendal	5,140,628.45	5,505,722.11	6,062,143.00	6,867,673.66
46	Kab. Kudus	14,323,382.79	16,504,028.86	19,822,794.34	21,378,989.39
47	Kab. Magelang	3,753,850.89	4,119,373.21	4,640,401.55	5,252,845.84
48	Kab. Pati	4,224,828.34	4,648,350.18	5,200,371.82	6,033,083.05
49	Kab. Pekalongan	3,070,695.31	3,361,348.34	3,990,049.28	4,568,470.99
50	Kab. Sukoharjo	4,378,598.57	4,806,448.20	5,545,486.86	6,277,623.81
51	Kab. Tegal	3,060,373.06	3,421,779.18	3,836,595.41	4,380,578.68
52	Kab. Temanggung	2,311,178.83	2,541,689.78	2,816,682.42	3,214,621.57
53	Kota Magelang	1,048,964.64	1,145,468.49	1,306,877.50	1,420,428.21
54	Kota Pekalongan	1,907,337.03	2,058,518.21	2,400,562.15	2,709,378.04
55	Kota Salatiga	837,790.17	921,316.45	1,021,876.47	1,105,964.15
56	Kota Semarang	17,920,411.28	19,913,232.06	22,859,480.31	25,998,715.49
57	Kab. Bantul	3,745,732.44	4,238,738.19	4,898,268.43	5,725,365.81
58	Kab. Kulon Progo	1,639,205.45	1,832,452.56	2,074,362.56	2,414,959.90
59	Kab. Sleman	5,908,413.33	6,604,996.97	7,669,099.31	8,902,448.99
60	Kota Yogyakarta	5,266,753.67	5,875,889.88	6,770,089.07	7,763,932.53
61	Kab. Bangkalan	3,158,367.69	3,504,532.56	4,221,322.94	4,917,789.08
62	Kab. Banyuwangi	8,770,178.81	9,747,445.33	11,618,853.39	13,440,414.97
63	Kab. Bondowoso	2,061,637.85	2,318,449.73	2,747,605.84	3,194,870.04
64	Kab. Gresik	13,552,849.85	14,907,074.73	17,977,114.17	20,990,490.43
65	Kab. Lamongan	4,333,447.08	4,849,741.57	5,723,710.84	6,613,517.74
66	Kab. Madiun	2,591,001.32	2,891,413.99	3,438,442.32	3,940,742.15
67	Kab. Malang	12,543,700.32	13,898,795.32	16,503,680.66	19,015,576.65
68	Kab. Mojokerto	5,357,575.34	6,076,126.73	7,252,945.07	8,479,282.24
69	Kab. Ngawi	2,914,310.63	3,265,122.01	3,831,351.83	4,445,555.03
70	Kab. Pasuruan	5,966,006.69	6,726,331.91	8,003,359.39	9,371,024.86
71	Kab. Sidoarjo	23,112,613.64	26,298,350.11	31,568,491.22	36,559,900.17
72	Kab. Situbondo	3,279,729.69	3,691,380.53	4,399,492.91	5,104,295.42
73	Kab. Tuban	5,721,790.90	6,474,337.73	7,689,120.48	8,994,582.68
74	Kota Blitar	616,253.18	692,434.82	831,512.61	979,832.97
75	Kota Malang	11,389,475.23	13,052,546.83	15,580,940.08	18,191,418.82
76	Kota Pasuruan	994,292.62	1,130,651.78	1,362,884.98	1,602,038.06
77	Kab. Kapuas Hulu	1,229,361.73	1,258,386.37	1,334,506.27	1,566,806.22
78	Kab. Pontianak	5,144,271.11	5,513,725.98	6,132,101.73	7,555,118.47
79	Kab. Sambas	2,554,661.72	2,878,056.20	3,260,754.82	3,618,691.19
80	Kab. Sintang	1,502,480.48	1,116,455.34	1,240,079.82	1,379,806.25
81	Kab. Barito Selatan	878,141.84	1,002,357.36	1,150,237.63	1,316,883.76
82	Kab. Kotawaringin Barat	2,000,181.43	2,176,597.43	2,617,576.07	2,930,376.41
83	Kota Palangka Raya	1,347,639.42	1,535,115.04	1,743,643.10	2,045,243.28
84	Kab. Banjar	2,606,222.94	2,883,532.30	3,261,767.92	3,739,481.54
85	Kab. Barito Kuala	2,460,501.37	2,591,297.67	2,687,633.48	2,585,754.53
86	Kab. Hulu Sungai Tengah	881,651.65	953,626.18	1,072,300.64	1,218,716.41
87	Kab. Tabalong	2,235,989.37	2,495,301.60	2,744,387.69	3,122,077.93
88	Kab. Tanah Laut	1,889,109.01	2,094,755.61	2,373,099.61	2,808,656.82

(lanjutan)

89	Kab. Tapin	747,656.42	831,587.85	937,701.93	1,074,031.43
90	Kota Banjarmasin	3,970,130.96	4,343,980.34	5,007,117.57	5,575,753.62
91	Kota Samarinda	9,852,072.89	11,558,177.06	13,125,819.87	14,599,048.72
92	Kab. Baru	621,853.19	701,643.70	795,558.06	892,995.85
93	Kab. Bone	2,755,785.97	2,978,646.53	3,327,715.77	3,860,830.96
94	Kab. Jeneponto	864,011.51	943,237.62	1,022,019.21	1,144,418.55
95	Kab. Sidenreng Rappang	1,190,279.13	1,301,045.56	1,505,466.36	1,729,724.60
96	Kab. Sinjai	930,097.34	1,061,512.95	1,204,362.91	1,393,405.06
97	Kab. Soppeng	1,003,839.31	1,135,236.01	1,233,100.51	1,393,497.64
98	Kab. Takalar	754,453.33	837,581.77	966,665.52	1,111,427.94
99	Kab. Tana Toraja	1,122,847.51	1,227,230.75	1,401,505.30	1,562,712.50
100	Kab. Wajo	1,908,595.55	2,079,375.86	2,499,662.44	2,891,508.38
101	Kota Pare-Pare	596,394.15	679,187.09	786,090.78	891,232.63
102	Kota Makassar	11,131,684.21	13,143,238.54	15,744,193.91	18,165,878.32
103	Kota Palopo	689,432.80	774,339.19	894,664.41	1,022,050.15
104	Kab. Buton	1,059,973.77	647,594.81	861,350.36	1,022,138.82
105	Kab. Badung	5,247,925.98	5,891,231.65	7,004,646.18	7,706,844.58
106	Kab. Bangli	1,037,547.54	1,133,502.15	1,328,706.37	1,444,016.88
107	Kab. Jembrana	1,590,570.77	1,759,029.43	2,041,833.38	2,228,014.77
108	Kab. Karangasem	1,722,019.71	1,903,889.76	2,206,742.52	2,423,402.61
109	Kab. Klungkung	1,147,862.00	1,281,627.17	1,495,041.45	1,643,385.12
110	Kab. Tabanan	2,106,119.86	2,313,145.83	2,796,748.42	3,087,180.45
111	Kota Denpasar	4,720,100.63	5,376,838.54	6,295,930.94	7,000,481.89
112	Kab. Bima	1,380,951.89	1,525,621.34	1,662,975.45	1,842,922.66
113	Kab. Lombok Barat	2,197,906.72	2,478,858.30	2,887,603.85	3,277,549.62
114	Kab. Lombok Tengah	1,930,122.01	2,131,039.63	2,498,798.37	2,792,881.65
115	Kab. Lombok Timur	2,691,583.28	3,007,908.19	3,422,077.23	3,800,882.98
116	Kab. Sumbawa	6,346,159.03	1,795,531.41	2,078,960.54	2,342,371.29
117	Kota Mataram	1,655,006.29	1,894,372.02	2,292,383.15	2,600,304.35
118	Kota Bima	416,337.18	460,296.03	524,086.75	584,474.12
119	Kab. Ende	681,476.60	757,160.40	824,930.55	902,748.35
120	Kab. Kupang	716,675.05	772,512.22	840,065.34	2,412,217.60
121	Kab. Manggarai	1,287,699.66	970,728.38	1,056,064.44	1,149,025.64
122	Kab. Sikka	766,548.04	851,687.38	939,228.99	1,045,038.56
123	Kab. Sumba Timur	614,999.31	672,770.66	742,612.40	808,271.24
124	Kab. Timor Tengah Selatan	913,911.17	1,020,344.55	1,140,971.29	1,263,155.28
125	Kab. Timor Tengah Utara	446,918.73	489,353.53	524,443.58	585,845.08
126	Kab. Maluku Tenggara Barat	446,838.17	488,772.73	548,776.67	597,308.30
127	Kota Ambon	1,466,715.48	1,613,730.64	1,819,984.16	2,089,100.34
128	Kab. Fak-Fak	533,516.00	600,921.47	693,210.94	800,291.33
129	Kota Temate	398,647.62	398,647.62	470,650.31	517,921.16
130	Kab. Lebak	3,833,969.09	4,198,602.73	4,869,177.00	5,437,899.90
131	Kab. Serang	8,998,669.84	9,974,639.69	11,192,422.57	12,603,637.47
132	Kota Cilegon	10,373,670.83	11,605,573.30	13,007,055.85	14,498,733.29
133	Kota Tangerang	24,180,995.40	26,616,348.10	30,443,826.59	35,604,678.01

(lanjutan)

134	Kota Pangkal Pinang	1,369,431.98	1,537,132.19	1,814,375.59	1,988,785.94
135	Kota Gerontale	550,843.88	644,910.97	728,725.39	846,915.51



Lampiran 3: Data Unconditional Grants

No	Kabupaten/Kota	Unconditional Grants			
		2003	2004	2005	2006
1	Kab. Aceh Selatan	169,168,930,759.00	172,192,296,480.00	208,246,568,774.00	310,043,329,864
2	Kab. Aceh Utara	450,955,047,101.00	439,261,931,426.00	746,879,933,999.00	664,115,397,357
3	Kota Banda Aceh	171,803,342,251.00	183,438,294,154.00	212,835,661,622.00	314,789,679,755
4	Kota Lhokseumawe	147,720,611,399.00	163,799,275,908.00	174,997,259,957.00	233,891,758,597
5	Kab. Labuhan Batu	309,906,071,840.00	317,106,123,504.00	347,465,965,512.00	554,151,562,134
6	Kab. Lima Puluh Kota	174,231,329,760.00	184,542,541,803.00	198,137,660,881.00	332,065,926,785
7	Kab. Agam	200,653,662,680.00	206,354,400,178.00	219,278,033,832.00	367,889,945,791
8	Kab. Padang	180,701,508,225.00	208,470,813,147.00	210,401,910,047.00	337,127,600,826
9	Kab. Pariaman	194,907,744,679.00	208,321,987,238.00	223,849,703,045.00	368,136,090,157
10	Kab. Pesisir Selatan	185,458,297,138.00	185,708,771,156.00	122,377,499,968.00	230,044,506,667
11	Kab. Sawah Lunto	201,933,362,492.00	193,914,009,995.00	204,309,436,784.00	319,015,512,953
12	Sijunjung	117,307,049,666.00	119,218,704,023.00	125,733,568,234.00	196,201,575,647
13	Kab. Tanah Datar	94,131,306,287.00	100,187,743,982.00	106,370,669,904.00	166,226,829,749
14	Kota Bukit Tinggi	289,745,001,311.00	299,725,418,642.00	319,701,498,856.00	544,000,278,501
15	Kota Padang Panjang	92,784,298,180.00	94,914,113,051.00	103,299,988,748.00	166,884,991,684
16	Kota Sawah Lunto	96,673,031,962.00	107,850,473,412.00	105,371,967,578.00	173,917,014,203
17	Kota Solok	254,425,281,519.00	324,477,672,977.00	427,995,438,945.00	571,292,859,383
18	Kota Dumai	336,173,300,675.00	424,253,953,392.00	527,583,734,295.00	706,739,387,741
19	Kota Pekanbaru	298,335,971,647.00	308,497,863,602.00	365,561,610,893.00	517,582,525,900
20	Kab. Muara Enim	386,448,916,020.00	413,423,513,689.00	331,779,805,011.00	518,048,741,714
21	Kab. Ogan Komering Ilir	387,649,511,279.00	424,365,433,871.00	251,487,728,527.00	399,299,848,407
22	Kab. Ogan Komering Ulu	441,417,165,210.00	452,689,881,390.00	498,374,072,046.00	710,766,172,438
23	Kota Palembang	122,613,965,291.00	150,599,961,955.00	202,136,054,372.00	259,885,405,135
24	Kota Lubuk Linggau	173,116,313,787.00	169,296,266,943.00	181,396,851,748.00	292,528,971,116
25	Kota Bengkulu	871,550,066,852.00	925,668,008,260.00	902,504,418,304.00	1,273,235,416,457
26	Kab. Bandung	428,445,873,783.00	471,347,039,568.00	569,051,337,006.00	583,004,421,588
27	Kab. Bekasi	639,705,186,383.00	799,387,141,081.00	784,152,080,768.00	967,326,732,762
28	Kab. Bogor	474,067,522,906.00	478,446,650,163.00	468,791,781,138.00	751,858,670,173
29	Kab. Ciamis	433,964,330,270.00	465,081,470,974.00	499,675,242,864.00	745,326,523,079
30	Kab. Cianjur	474,780,160,092.00	458,893,458,555.00	503,833,208,680.00	712,928,489,870
31	Kab. Cirebon	483,257,099,521.00	479,915,695,556.00	531,708,578,208.00	718,025,861,565
32	Kab. Karawang	328,040,278,655.00	351,275,055,750.00	384,299,513,618.00	576,049,317,365
33	Kab. Majalengka	321,148,571,793.00	338,016,236,286.00	355,581,422,914.00	547,156,555,151
34	Kab. Sumedang	446,612,333,695.00	431,414,067,438.00	448,731,673,080.00	694,196,486,886
35	Kab. Tasikmalaya	621,457,511,355.00	825,251,878,252.00	685,900,870,210.00	851,606,383,243
36	Kota Bandung	455,788,176,098.00	507,969,281,889.00	566,756,727,901.00	716,987,482,518
37	Kota Bekasi	337,704,962,337.00	316,544,622,860.00	340,252,422,959.00	420,686,089,723
38	Kota Depok	147,650,647,940.00	153,463,887,492.00	160,663,851,964.00	247,383,368,284
39	Kota Sukabumi	271,671,578,565.00	278,795,088,187.00	302,094,700,602.00	451,287,405,302
	Kab. Banjarmasin				

(lanjutan)

40	Kab. Banyumas	405,784,189,760.00	405,081,255,764.00	439,778,861,150.00	646,156,556,626.00
41	Kab. Batang	241,209,055,394.00	240,211,067,057.00	244,220,409,256.00	358,091,379,416.00
42	Kab. Brebes	382,689,117,021.00	404,520,012,985.00	434,119,416,166.00	652,553,958,331.00
43	Kab. Jepara	269,995,539,265.00	282,248,222,425.00	303,337,296,751.00	440,438,924,589.00
44	Kab. Kebumen	332,295,941,588.00	362,417,044,092.00	386,871,640,102.00	567,118,967,218.00
45	Kab. Kendal	290,627,190,619.00	309,816,606,173.00	310,947,956,080.00	437,359,483,519.00
46	Kab. Kudus	249,487,178,910.00	260,674,949,035.00	262,536,280,042.00	404,676,132,101.00
47	Kab. Magelang	328,665,733,338.00	329,031,820,993.00	370,968,189,125.00	532,847,818,094.00
48	Kab. Pati	322,353,225,202.00	339,585,725,238.00	362,510,909,921.00	541,635,873,854.00
49	Kab. Pekalongan	239,475,539,491.00	250,181,100,144.00	272,006,978,755.00	401,086,911,121.00
50	Kab. Sukoharjo	295,045,966,400.00	306,936,878,782.00	300,231,950,309.00	452,975,109,068.00
51	Kab. Tegal	328,105,781,691.00	390,633,918,574.00	365,831,445,343.00	541,073,938,910.00
52	Kab. Temanggung	240,142,722,197.00	244,980,824,477.00	251,939,007,000.00	379,072,708,488.00
53	Kota Magelang	130,982,208,053.00	135,006,370,037.00	138,598,015,188.00	229,789,752,924.00
54	Kota Pekalongan	137,405,838,218.00	141,000,439,313.00	149,917,311,719.00	228,698,410,726.00
55	Kota Salatiga	117,263,541,634.00	120,273,859,865.00	139,529,527,997.00	200,094,351,453.00
56	Kota Semarang	455,813,711,986.00	512,059,137,250.00	565,792,831,241.00	787,564,046,779.00
57	Kab. Bantul	309,812,676,886.00	334,327,319,011.00	333,008,983,889.00	492,863,134,017.00
58	Kab. Kulon Progo	247,520,353,664.00	228,186,429,536.00	245,292,261,028.00	361,879,066,201.00
59	Kab. Sleman	361,090,652,369.00	345,865,157,863.00	364,766,017,189.00	534,908,371,448.00
60	Kota Yogyakarta	244,897,197,328.00	255,447,270,347.00	240,677,428,477.00	356,977,140,985.00
61	Kab. Bangkalan	272,142,116,768.00	271,323,552,344.00	301,013,000,048.00	453,876,549,105.00
62	Kab. Banyuwangi	387,566,872,480.00	405,732,365,242.00	434,585,057,069.00	673,842,211,181.00
63	Kab. Bondowoso	247,703,684,740.00	267,599,835,024.00	268,197,582,036.00	384,925,081,790.00
64	Kab. Gresik	283,945,218,440.00	305,650,916,680.00	329,723,440,394.00	471,869,954,207.00
65	Kab. Lamongan	316,853,982,428.00	324,227,179,732.00	354,489,500,014.00	540,000,058,616.00
66	Kab. Madiun	246,673,228,627.00	253,134,432,451.00	268,213,646,052.00	413,966,736,005.00
67	Kab. Malang	502,683,386,208.00	527,135,866,421.00	556,237,586,422.00	847,610,285,341.00
68	Kab. Mojokerto	275,268,049,303.00	307,018,250,584.00	302,606,304,181.00	452,281,044,334.00
69	Kab. Ngawi	280,672,121,417.00	306,433,242,593.00	322,538,425,001.00	501,992,185,352.00
70	Kab. Pasuruan	438,185,934,245.00	437,847,799,215.00	428,316,825,777.00	514,428,788,959.00
71	Kab. Sidoarjo	459,008,700,298.00	442,641,954,669.00	493,309,960,057.00	682,673,877,371.00
72	Kab. Situbondo	217,473,902,950.00	225,064,302,663.00	242,740,439,351.00	374,263,832,103.00
73	Kab. Tuban	309,765,447,915.00	332,919,389,480.00	354,423,692,539.00	507,389,647,196.00
74	Kota Blitar	123,107,910,949.00	136,941,389,715.00	133,897,079,424.00	187,583,341,935.00
75	Kota Malang	243,600,168,488.00	253,031,474,512.00	264,076,556,810.00	413,828,602,133.00
76	Kota Pasuruan	143,850,706,825.00	138,567,563,257.00	139,522,259,619.00	201,344,716,901.00
77	Kab. Kapuas Hulu	253,139,923,957.00	225,486,924,482.00	261,785,190,134.00	472,938,132,597.00
78	Kab. Pontianak	252,856,910,437.00	268,626,553,870.00	285,344,582,988.00	469,196,124,402.00
79	Kab. Sambas	215,367,030,896.00	227,418,725,473.00	234,271,556,739.00	389,188,128,041.00
80	Kab. Sintang	277,115,390,103.00	298,453,419,754.00	216,177,663,846.00	475,722,397,142.00
81	Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Barat	138,830,979,731.00	162,757,504,657.00	184,028,431,602.00	310,831,277,115.00
82	Kota Palangka Raya	130,450,067,638.00	158,851,196,682.00	184,426,218,298.00	316,527,106,628.00
83	Kota Palangka Raya	175,160,581,750.00	178,123,610,687.00	177,286,943,355.00	292,918,429,253.00
84	Kab. Banjar	194,257,940,240.00	212,794,968,535.00	242,381,815,671.00	370,732,797,797.00

(lanjutan)

85	Kab. Barito Kuala	149,770,864,737.00	156,673,155,594.00	174,463,781,582.00	278,018,079,794
86	Kab. Hulu Sungai Tengah	156,606,327,503.00	162,952,032,640.00	185,529,615,129.00	286,922,131,180
87	Kab. Tabalong	172,915,638,332.00	179,185,291,668.00	235,202,674,149.00	343,097,948,923
88	Kab. Tanah Laut	137,642,469,544.00	153,086,922,542.00	197,416,702,515.00	332,351,328,170
89	Kab. Tapin	139,629,562,424.00	146,872,677,846.00	164,893,943,843.00	260,488,440,881
90	Kota Banjarmasin	221,296,797,499.00	228,324,076,460.00	247,857,773,499.00	374,983,206,259
91	Kota Samarinda	487,044,009,588.00	489,861,621,423.00	651,695,834,378.00	853,498,011,471
92	Kab. Baru	134,908,584,800.00	147,538,642,857.00	154,338,834,950.00	228,553,600,578
93	Kab. Bone	277,805,728,909.00	298,916,902,726.00	305,823,925,437.00	482,167,997,255
94	Kab. Jeneponto Kab. Sidenreng Rappang	152,630,018,014.00	161,202,920,096.00	180,154,478,365.00	270,846,156,232
95	Kab. Sinjai	162,289,838,475.00	168,882,521,370.00	190,665,329,015.00	282,281,959,100
96	Kab. Soppeng	143,756,026,859.00	149,896,368,366.00	163,090,693,120.00	308,020,464,927
97	Kab. Takalar	166,462,268,527.00	166,444,229,649.00	183,164,911,889.00	294,924,668,750
98	Kab. Tana Toraja	149,529,639,940.00	153,980,647,845.00	166,436,369,200.00	256,954,426,905
99	Kab. Wajo	212,859,915,018.00	217,078,181,121.00	231,047,586,467.00	358,103,926,403
100	Kota Pare-Pare	199,510,778,219.00	200,773,284,753.00	234,146,704,568.00	335,946,034,074
101	Kota Makassar	129,535,884,440.00	133,350,578,584.00	139,296,376,025.00	207,693,712,266
102	Kota Palopo	376,787,711,345.00	385,881,307,253.00	411,094,900,016.00	606,278,299,314
103	Kab. Buton	51,706,692,965.00	100,310,473,048.00	132,299,122,125.00	199,175,772,624
104	Kab. Badung	227,344,357,053.00	234,687,255,529.00	149,873,196,137.00	277,889,706,669
105	Kab. Bangli	201,772,619,143.00	216,071,527,873.00	222,565,554,455.00	239,015,601,031
106	Kab. Jembrana	129,494,285,166.00	137,392,323,074.00	144,881,999,080.00	227,943,383,637
107	Kab. Karangasem	149,167,306,821.00	156,738,557,874.00	172,854,485,291.00	270,258,524,842
108	Kab. Klungkung	180,484,566,017.00	182,591,886,096.00	196,876,528,286.00	303,367,383,935
109	Kab. Tabanan	131,187,727,494.00	144,084,142,848.00	149,542,519,021.00	237,024,580,221
110	Kota Denpasar	222,059,116,761.00	226,634,969,483.00	234,245,896,835.00	351,950,750,600
111	Kab. Bima	231,350,005,297.00	216,075,444,500.00	240,366,428,210.00	353,197,626,184
112	Kab. Lombok Barat	183,263,521,404.00	198,993,090,981.00	227,229,551,876.00	354,919,228,433
113	Kab. Lombok Tengah	242,777,558,625.00	260,430,543,029.00	272,510,030,913.00	398,907,066,868
114	Kab. Lombok Timur	261,609,339,014.00	261,560,042,527.00	291,445,335,146.00	414,686,390,358
115	Kab. Sumbawa	298,820,483,378.00	317,988,180,074.00	335,920,812,387.00	500,351,225,182
116	Kota Mataram	261,814,325,069.00	277,034,148,740.00	209,603,414,576.00	300,451,143,987
117	Kota Bima	171,670,217,167.00	179,141,939,706.00	194,837,693,637.00	292,375,452,954
118	Kab. Ende	72,411,567,971.00	106,590,314,486.00	139,004,560,198.00	205,174,220,024
119	Kab. Kupang	169,623,133,543.00	176,404,320,093.00	179,986,593,001.00	269,238,341,057
120	Kab. Manggarai	204,313,219,732.00	224,863,129,649.00	228,891,124,881.00	336,003,315,429
121	Kab. Sikka	259,720,511,632.00	187,237,837,331.00	222,297,425,993.00	342,876,176,687
122	Kab. Sumba Timur	155,590,792,540.00	164,028,660,543.00	174,669,838,477.00	262,580,070,938
123	Kab. Timor Tengah Selatan	164,993,779,999.00	175,267,920,817.00	182,205,584,578.00	279,261,234,235
124	Kab. Timor Tengah Utara	214,601,359,555.00	229,695,138,487.00	227,981,619,253.00	343,188,444,063
125	Kab. Maluku Tenggara Barat	160,456,184,577.00	169,181,456,352.00	172,752,686,166.00	255,826,413,247
126		178,079,727,632.00	190,962,730,316.00	204,926,548,264.00	342,586,820,974

(lanjutan)

127	Kota Ambon	192,913,895,722.00	209,576,059,179.00	201,306,149,427.00	315,186,129,016
128	Kab. Fak-Fak	249,298,315,072.00	173,472,218,778.00	186,924,017,143.00	330,108,725,522
129	Kota Temate	158,677,846,744.00	154,994,239,808.00	170,526,394,188.00	246,149,210,446
130	Kab. Lebak	262,761,536,281.00	283,607,182,895.00	312,889,272,072.00	493,349,204,373
131	Kab. Serang	399,883,952,729.00	426,991,325,032.00	430,890,723,887.00	610,557,467,870
132	Kota Cilegon	149,130,788,787.00	149,036,492,281.00	162,549,703,750.00	239,568,350,248
133	Kota Tangerang	337,136,754,664.00	451,677,515,333.00	399,362,827,506.00	488,073,955,178
134	Kota Pangkal Pinang	121,296,708,491.00	118,578,679,759.00	134,452,033,911.00	208,817,983,752
135	Kota Gorontalo	132,373,578,348.00	143,830,829,273.00	148,998,097,867.00	222,612,155,031



Lampiran 4: Output Pendekatan Common Effects

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 12/16/09 Time: 23:33

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

Cross-sections included: 135

Total pool (balanced) observations: 540

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB?	4687.588	340.6477	13.76081	0.0000
UG?	1.094602	0.009873	110.8652	0.0000
R-squared	0.938583	Mean dependent var		3.72E+11
Adjusted R-squared	0.938469	S.D. dependent var		2.03E+11
S.E. of regression	5.05E+10	Akaike info criterion		52.13013
Sum squared resid	1.37E+24	Schwarz criterion		52.14603
Log likelihood	14073.14	Durbin-Watson stat		0.851310

Lampiran 5: Output Pendekatan Fixed Effects (Asumsi struktur var-cov residual homoskedastik)

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 12/16/09 Time: 23:35

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

Cross-sections included: 135

Total pool (balanced) observations: 540

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.65E+10	5.96E+09	11.16005	0.0000
PDRB?	6765.284	701.1530	9.648799	0.0000
UG?	0.860107	0.020197	42.58513	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_1--C	-3.38E+10			
_2--C	9.16E+10			
_3--C	-2.30E+09			
_4--C	-9.12E+10			
_5--C	-6.28E+10			
_6--C	-3.09E+10			
_7--C	-2.27E+10			
_8--C	-1.94E+10			
_9--C	-5.27E+09			
_10--C	-1.88E+10			
_11--C	-1.24E+10			
_12--C	-2.49E+10			
_13--C	-4.78E+10			

(lanjutan)

_14--C	2.31E+09
_15--C	-3.26E+10
_16--C	-5.79E+10
_17--C	-6.61E+10
_18--C	6.23E+09
_19--C	-5.90E+09
_19--C	-5.90E+09
_20--C	-5.35E+09
_21--C	-3.25E+09
_22--C	-3.81E+10
_23--C	-2.18E+10
_24--C	3.91E+10
_25--C	-1.49E+11
_26--C	8.69E+10
_27--C	1.75E+10
_28--C	2.75E+10
_29--C	6.23E+10
_30--C	-1.64E+10
_31--C	3.89E+10
_32--C	6.55E+10
_33--C	1.48E+10
_34--C	1.33E+11
_35--C	1.90E+10
_36--C	3.58E+10
_37--C	4.80E+09
_38--C	1.98E+10
_39--C	4.24E+10
_40--C	1.43E+10
_41--C	-1.28E+10

(lanjutan)

_42--C	4.66E+10
_43--C	2.88E+10
_44--C	3.47E+10
_45--C	-4.93E+10
_46--C	3.46E+10
_47--C	3.39E+10
_48--C	6.77E+09
_49--C	-2.31E+10
_50--C	3.84E+10
_51--C	2.22E+09
_52--C	-1.90E+10
_53--C	-2.60E+10
_54--C	-1.50E+10
_55--C	2.19E+10
_56--C	2.28E+10
_57--C	2.13E+10
_58--C	5.02E+10
_59--C	4.64E+10
_60--C	1.37E+10
_61--C	-1.02E+10
_62--C	4.85E+09
_63--C	-2.25E+09
_64--C	3.53E+10
_65--C	3.83E+09
_66--C	4.74E+08
_67--C	3.82E+09
_68--C	-5.45E+10
_69--C	6.82E+10
_70--C	4.95E+09

(lanjutan)

_71--C	-9.43E+09
_72--C	1.51E+10
_73--C	-7.00E+09
_74--C	-1.20E+10
_75--C	-2.62E+10
_76--C	-1.87E+10
_77--C	-1.06E+10
_78--C	-1.28E+10
_79--C	-8.08E+09
_80--C	-3.24E+10
_81--C	-1.26E+10
_82--C	-2.79E+10
_83--C	-1.36E+10
_84--C	-3.36E+10
_85--C	-3.09E+10
_86--C	-3.86E+10
_87--C	-4.75E+10
_89--C	-2.70E+10
_90--C	-9.34E+09
_91--C	-1.38E+10
_92--C	-3.35E+10
_93--C	2.29E+10
_94--C	-1.81E+10
_95--C	-4.50E+09
_96--C	-2.09E+10
_97--C	-3.12E+10
_98--C	-2.50E+10
_99--C	-1.56E+09
_100--C	-4.82E+10

(lanjutan)

_101--C	-1.66E+10
_102--C	7.14E+10
_103--C	-3.08E+10
_104--C	-3.49E+09
_105--C	2.87E+11
_106--C	-2.36E+09
_107--C	5.36E+09
_108--C	2.13E+10
_109--C	-2.29E+09
_110--C	5.06E+10
_111--C	6.25E+10
_112--C	1.68E+10
_113--C	7.26E+09
_114--C	-4.65E+09
_115--C	1.84E+10
_116--C	-9.04E+09
_117--C	-1.42E+10
_118--C	-3.36E+10
_119--C	-1.17E+10
_120--C	-3.53E+10
_121--C	2.26E+09
_122--C	-1.54E+10
_123--C	-2.43E+10
_124--C	-7.11E+08
_125--C	-2.48E+10
_126--C	-3.95E+10
_127--C	-6.93E+09
_128--C	2.43E+10
_129--C	-1.62E+10

(lanjutan)

_130--C	1.35E+10
_131--C	4.36E+10
_132--C	-9.79E+09
_133--C	-2.95E+09
_134--C	-3.53E+10
_135--C	-6.05E+09

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.982601	Mean dependent var	3.72E+11
Adjusted R-squared	0.976730	S.D. dependent var	2.03E+11
S.E. of regression	3.10E+10	Akaike info criterion	51.36884
Sum squared resid	3.88E+23	Schwarz criterion	52.45762
Log likelihood	13732.59	F-statistic	167.3509
Durbin-Watson stat	2.513301	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 6: Output Pendekatan Random Effects

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/16/09 Time: 23:36

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

Cross-sections included: 135

Total pool (balanced) observations: 540

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.26E+10	5.55E+09	9.486854	0.0000
PDRB?	6467.930	427.2318	15.13916	0.0000
UG?	0.910834	0.017264	52.75816	0.0000
Random Effects				
(Cross)				
_1--C	-2.56E+10			
_2--C	6.76E+10			
_3--C	8.16E+08			
_4--C	-7.01E+10			
_5--C	-5.49E+10			
_6--C	-2.31E+10			
_7--C	-1.71E+10			
_8--C	-1.40E+10			
_9--C	-2.83E+09			
_10--C	-1.14E+10			
_11--C	-7.92E+09			
_12--C	-1.50E+10			

(lanjutan)

_13--C	-3.34E+10
_14--C	1.27E+09
_15--C	-2.05E+10
_16--C	-4.21E+10
_17--C	-5.98E+10
_18--C	-1.16E+09
_19--C	-9.95E+09
_19--C	-9.95E+09
_20--C	-7.49E+09
_21--C	-7.85E+09
_22--C	-2.80E+10
_23--C	-1.48E+10
_24--C	9.69E+09
_25--C	-1.23E+11
_26--C	5.79E+10
_27--C	5.33E+09
_28--C	1.45E+10
_29--C	4.35E+10
_30--C	-1.97E+10
_31--C	2.81E+10
_32--C	5.18E+10
_33--C	4.21E+09
_34--C	1.00E+11
_35--C	8.10E+09
_36--C	2.85E+10
_37--C	8.72E+09
_38--C	1.53E+10
_39--C	2.84E+10
_40--C	1.29E+10

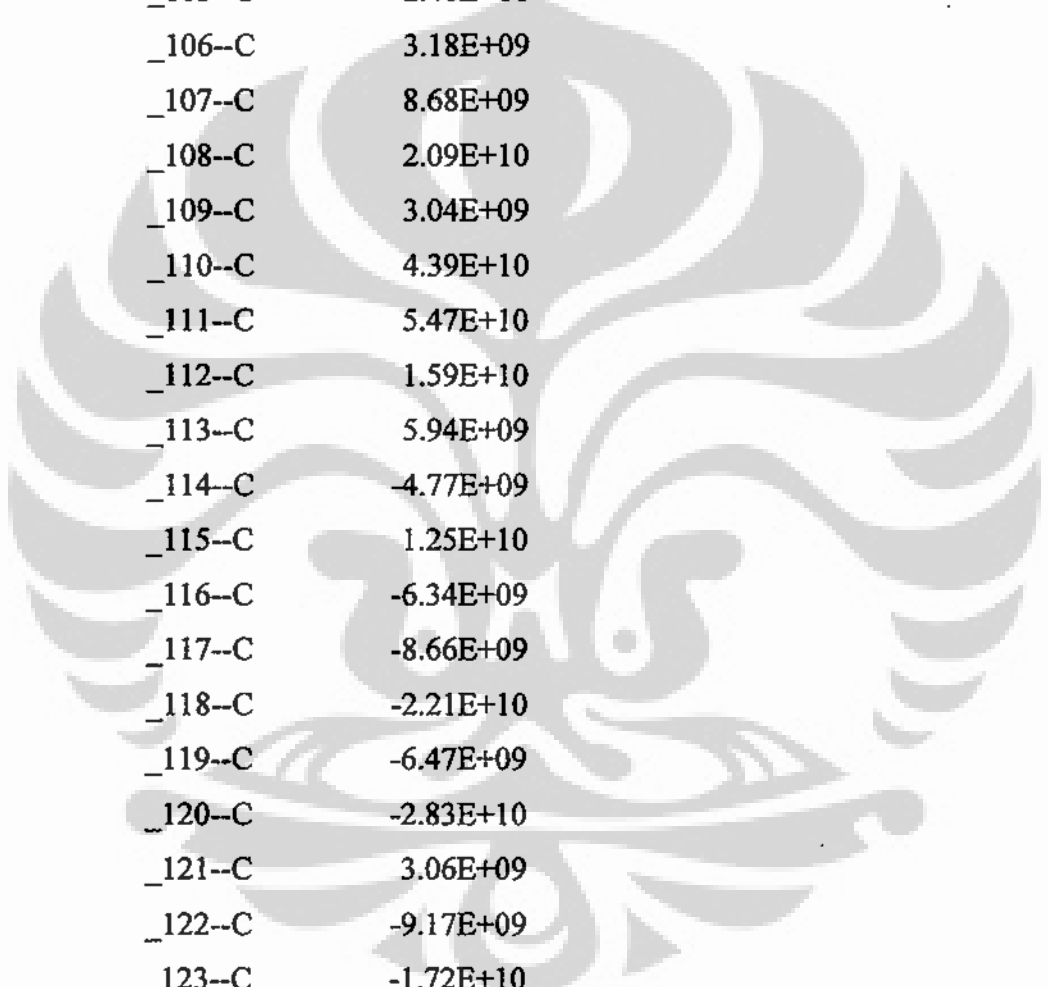
(lanjutan)

_41--C	-1.74E+10
_42--C	3.83E+10
_43--C	1.92E+10
_44--C	2.80E+10
_45--C	-3.79E+10
_46--C	2.53E+10
_47--C	2.48E+10
_48--C	5.91E+09
_49--C	-2.09E+10
_50--C	2.76E+10
_51--C	2.32E+09
_52--C	-1.08E+10
_53--C	-1.66E+10
_54--C	-6.84E+09
_55--C	1.08E+10
_56--C	1.64E+10
_57--C	1.86E+10
_58--C	3.86E+10
_59--C	4.07E+10
_60--C	1.04E+10
_61--C	-1.45E+10
_62--C	3.95E+09
_63--C	-8.43E+08
_64--C	2.64E+10
_65--C	3.10E+09
_66--C	-1.00E+10
_67--C	2.33E+09
_68--C	-4.84E+10
_69--C	5.16E+10

(lanjutan)

_70--C	1.03E+09
_71--C	-6.54E+09
_72--C	1.01E+10
_73--C	-2.19E+08
_74--C	-7.32E+09
_75--C	-1.67E+10
_76--C	-1.67E+10
_77--C	-9.30E+09
_78--C	-9.69E+09
_79--C	-8.32E+09
_80--C	-2.38E+10
_81--C	-6.75E+09
_82--C	-2.02E+10
_83--C	-9.85E+09
_84--C	-2.41E+10
_85--C	-2.25E+10
_86--C	-3.01E+10
_87--C	-3.65E+10
_89--C	-1.84E+10
_90--C	-6.44E+09
_91--C	-2.34E+10
_92--C	-2.34E+10
_93--C	1.72E+10
_94--C	-1.15E+10
_95--C	-3.29E+08
_96--C	-1.38E+10
_97--C	-2.29E+10
_98--C	-1.69E+10
_99--C	-1.71E+08

(lanjutan)



_100--C	-3.87E+10
_101--C	-8.66E+09
_102--C	5.64E+10
_103--C	-1.92E+10
_104--C	-5.24E+08
_105--C	2.46E+11
_106--C	3.18E+09
_107--C	8.68E+09
_108--C	2.09E+10
_109--C	3.04E+09
_110--C	4.39E+10
_111--C	5.47E+10
_112--C	1.59E+10
_113--C	5.94E+09
_114--C	-4.77E+09
_115--C	1.25E+10
_116--C	-6.34E+09
_117--C	-8.66E+09
_118--C	-2.21E+10
_119--C	-6.47E+09
_120--C	-2.83E+10
_121--C	3.06E+09
_122--C	-9.17E+09
_123--C	-1.72E+10
_124--C	5.20E+08
_125--C	-1.72E+10
_126--C	-3.12E+10
_127--C	-3.52E+09
_128--C	2.23E+10

(lanjutan)

_129--C	-9.67E+09
_130--C	9.74E+09
_131--C	3.11E+10
_132--C	-9.35E+08
_133--C	-1.38E+09
_134--C	-2.38E+10
_135--C	-1.44E+08

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	3.58E+10	0.5713
Idiosyncratic random	3.10E+10	0.4287

Weighted Statistics

R-squared	0.911756	Mean dependent var	1.48E+11
Adjusted R-squared	0.911428	S.D. dependent var	1.06E+11
S.E. of regression	3.17E+10	Sum squared resid	5.39E+23
F-statistic	2774.214	Durbin-Watson stat	1.815748
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.941335	Mean dependent var	3.72E+11
Sum squared resid	1.31E+24	Durbin-Watson stat	0.747952

Lampiran 7: Output Uji F

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.713124	(134,403)	0.0000
Cross-section Chi-square	633.500566	134	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Panel Least Squares

Date: 12/16/09 Time: 23:37

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

Cross-sections included: 135

Total pool (balanced) observations: 540

Variable	Coefficie			Prob.
	nt	Std. Error	t-Statistic	
C	3.29E+10	4.68E+09	7.034496	0.0000
PDRB?	5504.540	346.3166	15.89453	0.0000
UG?	0.993146	0.017246	57.58630	0.0000
R-squared	0.943765	Mean dependent var		3.72E+11
Adjusted R-squared	0.943555	S.D. dependent var		2.03E+11
S.E. of regression	4.83E+10	Akaike info criterion		52.04569
Sum squared resid	1.25E+24	Schwarz criterion		52.06953

(lanjutan)

Log likelihood	14049.34	F-statistic	4506.097
Durbin-Watson stat	0.816778	Prob(F-statistic)	0.000000



Lampiran 8: Output Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.737691	2	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB?	6765.284064	6467.929732	309088.478978	0.5928
UG?	0.860107	0.910834	0.000110	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Panel Least Squares

Date: 12/16/09 Time: 23:37

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

Cross-sections included: 135

Total pool (balanced) observations: 540

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.65E+10	5.96E+09	11.16005	0.0000
PDRB?	6765.284	701.1530	9.648799	0.0000

(lanjutan)

UG?	0.860107	0.020197	42.58513	0.0000
-----	----------	----------	----------	--------

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.982601	Mean dependent var	3.72E+11
Adjusted R-squared	0.976730	S.D. dependent var	2.03E+11
S.E. of regression	3.10E+10	Akaike info criterion	51.36884
Sum squared resid	3.88E+23	Schwarz criterion	52.45762
Log likelihood	-13732.59	F-statistic	167.3509
Durbin-Watson stat	2.513301	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 9: Model Akhir Fixed Effect Struktur Var-Covar Residual
Asumsi Heteroskedastik

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 12/17/09 Time: 01:22

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

Cross-sections included: 135

Total pool (balanced) observations: 540

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.08E+10	4.27E+09	14.23482	0.0000
PDRB?	6325.034	885.6396	7.141769	0.0000
UG?	0.887032	0.010074	88.05329	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_1—C	-3.32E+10			
_2—C	8.76E+10			
_3—C	-1.69E+09			
_4—C	-8.56E+10			
_5—C	-6.28E+10			
_6—C	-2.99E+10			
_7—C	-2.22E+10			
_8—C	-1.88E+10			
_9—C	-5.33E+09			
_10—C	-1.72E+10			
_11—C	-1.17E+10			
_12—C	-2.25E+10			

(lanjutan)

_13—C	-4.51E+10
_14—C	3.77E+09
_15—C	-2.98E+10
_16—C	-5.52E+10
_17—C	-6.92E+10
_18—C	4.13E+09
_19—C	-9.65E+09
_19—C	-9.65E+09
_20—C	-7.84E+09
_21—C	-1.78E+09
_22—C	-3.69E+10
_23—C	-2.05E+10
_24—C	3.12E+10
_25—C	-1.34E+11
_26—C	8.37E+10
_27—C	1.23E+10
_28—C	2.32E+10
_29—C	5.75E+10
_30—C	-1.50E+10
_31—C	3.57E+10
_32—C	6.36E+10
_33—C	9.78E+09
_34—C	1.33E+11
_35—C	1.73E+10
_36—C	3.51E+10
_37—C	6.69E+09
_38—C	1.83E+10
_39—C	3.76E+10
_40—C	1.40E+10

(lanjutan)

_41--C	-1.67E+10
_42--C	4.57E+10
_43--C	2.49E+10
_44--C	3.40E+10
_45--C	-4.37E+10
_46--C	3.18E+10
_47--C	3.13E+10
_48--C	6.28E+09
_49--C	-2.42E+10
_50--C	3.47E+10
_51--C	1.60E+09
_52--C	-1.70E+10
_53--C	-2.37E+10
_54--C	-1.27E+10
_55--C	2.15E+10
_56--C	2.07E+10
_57--C	2.06E+10
_58--C	4.82E+10
_59--C	4.76E+10
_60--C	1.24E+10
_61--C	-1.25E+10
_62--C	3.82E+09
_63--C	1.49E+09
_64--C	3.31E+10
_65--C	2.98E+09
_66--C	-3.40E+09
_67--C	3.50E+09
_68--C	-5.67E+10
_69--C	6.49E+10

(lanjutan)

_70--C	9.59E+09
_71--C	-9.06E+09
_72--C	1.38E+10
_73--C	-4.88E+09
_74--C	-7.82E+09
_75--C	-2.41E+10
_76--C	-2.06E+10
_77--C	-1.08E+10
_78--C	-1.29E+10
_79--C	-1.03E+10
_80--C	-3.16E+10
_81--C	-1.12E+10
_82--C	-2.70E+10
_83--C	-1.34E+10
_84--C	-3.19E+10
_85--C	-3.01E+10
_86--C	-3.80E+10
_87--C	-4.63E+10
_89--C	-2.57E+10
_90--C	-8.79E+09
_91--C	-1.94E+10
_92--C	-3.19E+10
_93--C	2.09E+10
_94--C	-1.71E+10
_95--C	-3.60E+09
_96--C	-1.98E+10
_97--C	-3.04E+10
_98--C	-2.38E+10
_99--C	-2.14E+09

(lanjutan)

_100--C	-4.80E+10
_101--C	-1.47E+10
_102--C	7.15E+10
_103--C	-2.80E+10
_104--C	-3.39E+09
_105--C	2.90E+11
_106--C	-4.34E+08
_107--C	6.85E+09
_108--C	2.21E+10
_109--C	-4.46E+08
_110--C	5.05E+10
_111--C	6.37E+10
_112--C	1.67E+10
_113--C	6.24E+09
_114--C	-6.21E+09
_115--C	1.57E+10
_116--C	-9.03E+09
_117--C	-1.32E+10
_118--C	-3.12E+10
_119--C	-1.10E+10
_120--C	-3.57E+10
_121--C	1.63E+09
_122--C	-1.44E+10
_123--C	-2.37E+10
_124--C	-1.38E+09
_125--C	-2.40E+10
_126--C	-3.97E+10
_127--C	-6.65E+09
_128--C	2.40E+10

(lanjutan)

_129--C	-1.53E+10
_130--C	1.21E+10
_131--C	4.14E+10
_132--C	-3.37E+09
_133--C	4.32E+09
_134--C	-3.28E+10
_135--C	-4.41E+09

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.992994	Mean dependent var	6.94E+11
Adjusted R-squared	0.990629	S.D. dependent var	4.74E+11
S.E. of regression	3.07E+10	Sum squared resid	3.79E+23
F-statistic	419.9673	Durbin-Watson stat	2.283182
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.992806	Mean dependent var	3.72E+11
Sum squared resid	3.90E+23	Durbin-Watson stat	2.489622

Model akhir yang terbentuk (fixed effects struktur var-cov residual heteroskedastik)

$$\text{Belanja}_i = (6,08(10^{10}) + \dots + 6.325,03\text{PDRBi} + 0,89\text{UGi}$$

Contoh :

$$(1) \text{Belanja}_{\text{Aceh Selatan}} = (6,08(10^{10}) + (-3,32 \cdot 10^{10}) + 6.325,03\text{PDRBi} + 0,89\text{UGi}$$

$$\text{Belanja}_{\text{Aceh Selatan}} = (2,76 \cdot 10^{10}) + 6325,03\text{PDRBi} + 0,89\text{UGi}$$

$$(2) \text{Belanja}_{\text{Cianjur}} = (6,08(10^{10}) + (5,75 \cdot 10^{10}) + 6.325,03\text{PDRBi} + 0,89\text{UGi}$$

$$\text{Belanja}_{\text{Cianjur}} = (11,83 \cdot 10^{10}) + 6325,03\text{PDRBi} + 0,89\text{UGi}$$

Lampiran 10: Output Hasil Uji dengan Menggunakan Data *Cross-Sectional*

10.1 Statistika Deskriptif

Data dari 224 kabupaten kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam penelitian dengan menggunakan data cross-sectional ini menghasilkan statistik deskriptif yang mencakup nilai minimum dan maximum, rata-rata (*mean*), dan deviasi standar (*standard deviation*) atas variabel-variabel yang diteliti. Variabel tersebut meliputi belanja daerah, unconditional grants, dan PDRB. Statistika deskriptif disajikan dalam tabel berikut.

Tabel
Statistika Deskriptif

Keterangan	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviasi
Belanja 2005	118.047.221.052	773.196.820.788	425.327.161.378	140.618.176.556
UG 2005	45.978.238.339	335.920.812.387	183.128.953.436	60.297.173.098
PDRB 2005	102.213.498.832	4.250.723.986.435	1.671.291.506.834	1.048.668.950.377
Belanja 2006	230.508.984.190	1.091.431.395.390	650.289.150.177	191.178.688.801
UG 2006	166.226.829.749	501.992.185.352	300.641.053.544	84.672.451.053
PDRB 2006	118.758.211.289	4.917.789.075.319	1.886.204.771.924	1.216.052.380.283

Sumber: hasil estimasi (dalam rupiah)

10.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

10.2.1. Hasil Uji Multikolinieritas

Hipotesis pengujian multikolinieritas untuk nilai VIF adalah sebagai berikut:

H_0 : nilai VIF > 10; ada multikolinieritas

H_1 : tidak ada multikolinieritas

Hipotesis pengujian multikolinieritas untuk nilai Tolerance adalah sebagai berikut:

H_0 : nilai Tol < 0,1; ada multikolinieritas

H_1 : tidak ada multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dengan nilai Toleran dan VIF dengan menggunakan alat bantu SPSS menghasilkan output sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel
Hasil Uji Multikolinieritas

Keterangan	Persamaan Dengan Lag	Persamaan Tanpa Lag
Tolerance	0,563	0,656
VIF	1,776	1,525
Kesimpulan	Tol >0,1 & VIF < 10 Tolak H ₀	Tol >0,1 & VIF < 10 Tolak H ₀

Sumber: hasil estimasi

Dari kedua tabel di atas, baik untuk variabel data tahun 2006 maupun variabel data tahun 2005, terlihat bahwa seluruh nilai pada *Tolerance* tidak ada yang lebih kecil dari 0,1 (<0,1) dan nilai pada VIF di bawah 2 (jauh di bawah 10), sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi *collinearity* terpenuhi. Dengan demikian, model tidak mengandung multikolinieritas.

10.2.2. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil pengujian dengan menggunakan Uji Durbin-Watson memberikan output sebagai berikut.

Tabel
Statistik Durbin-Watson untuk Model Tanpa Lag

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,941 ^a	,886	,885	6.478E+010	1,491

a. Predictors: (Constant), pdrb2, ug2

b. Dependent Variable: belanja2

Tabel
Statistik Durbin-Watson untuk Model Dengan Lag

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,855 ^a	,731	,728	9.963E+010	1,162

a. Predictors: (Constant), pdrb1, ug1

b. Dependent Variable: belanja2

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson untuk data tahun 2006 adalah sebesar 1,491 dan untuk tahun 2005 adalah sebesar 1,162. Nilai-nilai tersebut berada diantara -2 sampai dengan 2, dengan demikian asumsi independensi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi auto korelasi antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya.

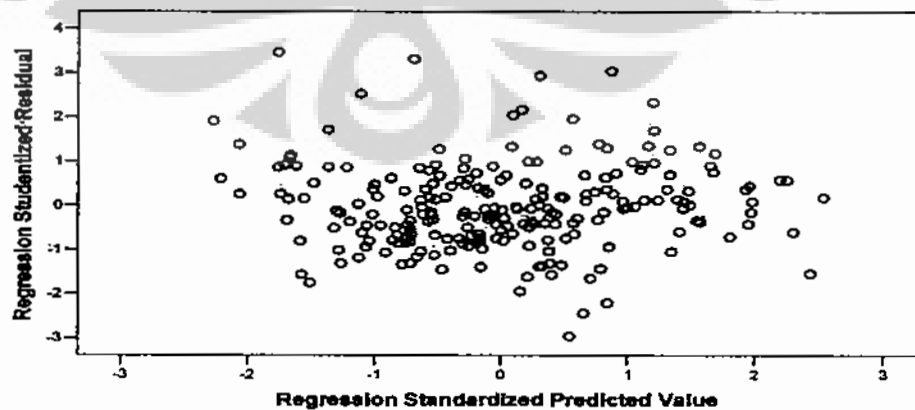
10.2.3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Grafik

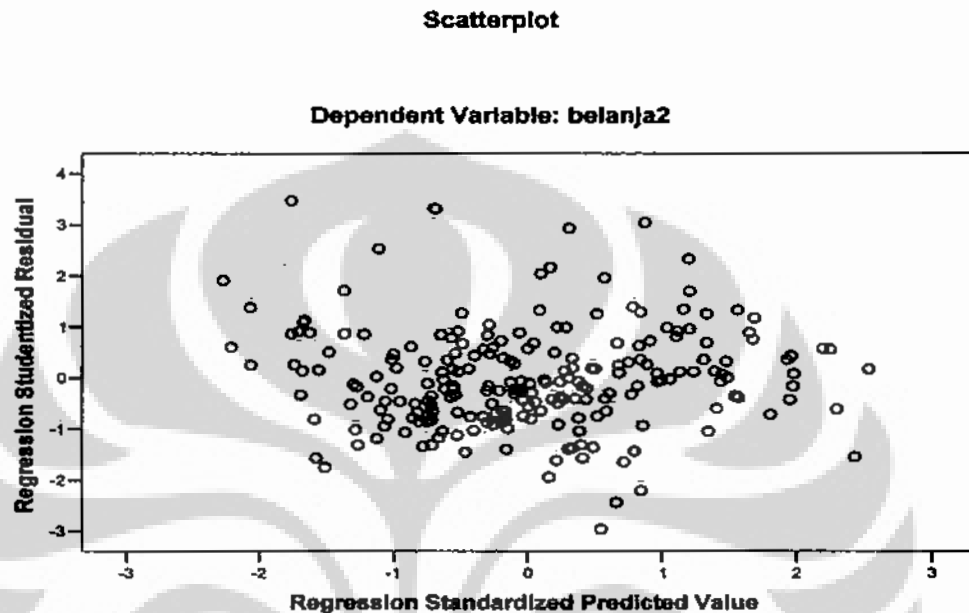
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan *Scatterplot* Untuk Model Tanpa Lag

Scatterplot

Dependent Variable: belanja2



Grafik 4.2
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot
Untuk Model Dengan Lag

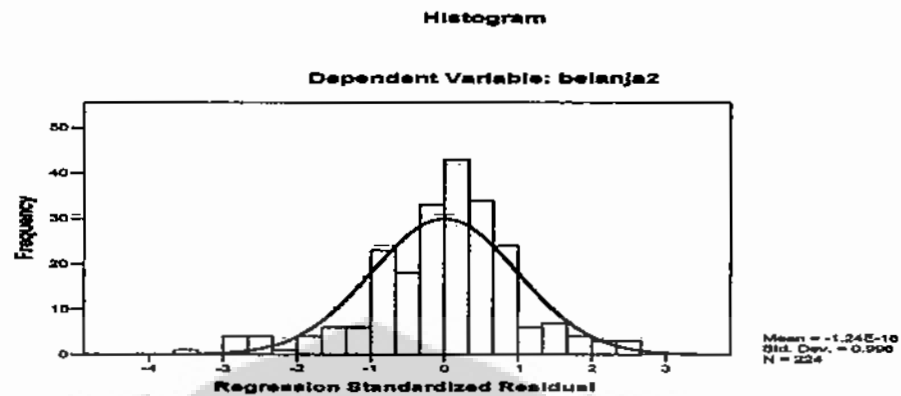


Kedua grafik *scatter plot* tersebut menunjukkan bahwa data menyebar secara acak/random baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, asumsi homokedastisitas terpenuhi.

10.2.4. Hasil Uji Normalitas

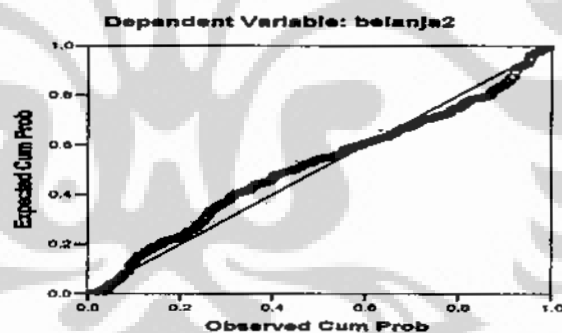
Uji normalitas dengan teknik *multivariate normality* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hal ini dilakukan karena regresi mensyaratkan distribusi *error* yang normal, artinya nilai error terdistribusi secara simetris di sekitar $\text{mean}=0$.

Histogram pada gambar di bawah ini yang berbentuk lonceng sempurna memperlihatkan bahwa data tahun 2006 yang dipergunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal

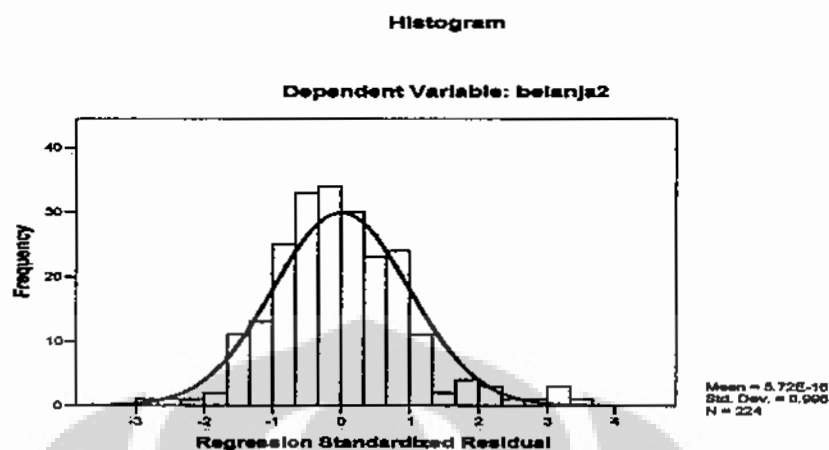


Normalitas data untuk tahun 2006 diperkuat pula dengan grafik normal PP-Plot dimana sebaran data menyebar disekitar garis lurus sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat *normality multivariate* terpenuhi.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

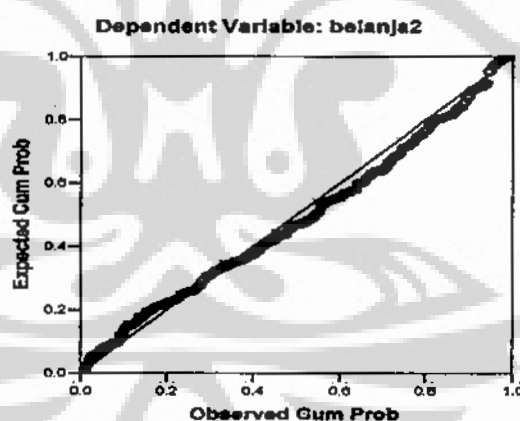


Sebagaimana data tahun 2006, data yang diamati untuk periode tahun 2005 juga menunjukkan bahwa histogram yang berbentuk simetris tidak menceng ke kanan maupun ke kiri sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini memperlihatkan nilai residual telah terdistribusi secara normal sehingga syarat *multivariate normality* terpenuhi.



Serupa dengan data tahun 2006, grafik normal *Probability Plot* data pengamatan untuk periode tahun 2005 juga menunjukkan sebaran data yang berada disekitar garis diagonal, sebagaimana terlihat pada gambar berikut, yang memperkuat kesimpulan sebelumnya

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



10.3. Hasil Pengujian Hipotesis

10.3.1. Uji Kesesuaian Model (R^2)

Uji kesesuaian model untuk regresi yang memakai variabel data Belanja, *Unconditional Grants*, dan PDRB untuk tahun 2006 menghasilkan output SPSS sebagai berikut:

Tabel
Hasil Uji Kesesuaian Model Tanpa Lag

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,941 ^a	,886	,885	6.478E+010	1,491

a. Predictors: (Constant), pdrb2, ug2

b. Dependent Variable: belanja2

Dari tabel di atas terlihat bahwa R^2 untuk data tahun 2006 sebesar 0,914. Nilai R^2 tersebut mengandung arti bahwa variabel *unconditional grants* dan PDRB memberikan pengaruh sebesar 91,4 persen terhadap total belanja daerah. Dengan demikian, merujuk kepada hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Belanja Daerah untuk tahun 2006 (tahun berjalan) dapat dijelaskan sebesar 91,4 % oleh variabel *unconditional grants* dan variabel PDRB tahun berjalan. Dapat disimpulkan bahwa model yang dipergunakan dalam persamaan tersebut mampu menjelaskan dengan sangat baik pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya.

Sedangkan hasil Uji kesesuaian model untuk regresi yang memakai variabel data Belanja daerah untuk tahun 2006 (tahun berjalan) serta *Unconditional Grants* dan PDRB untuk tahun 2005 (tahun sebelumnya) tersaji sebagai berikut:

Tabel
Hasil Uji Kesesuaian Model Dengan Lag

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,855 ^a	,731	,728	9.963E+010	1,162

a. Predictors: (Constant), pdrb1, ug1

b. Dependent Variable: belanja2

Hal yang sama juga terdapat pada data yang menggunakan variabel independen tahun 2005. Tabel output di atas memperlihatkan nilai R^2 sebesar 85,5 % yang berarti bahwa belanja daerah pada tahun 2006 dijelaskan oleh *Unconditional*

Grants dan PDRB untuk tahun 2005 sebesar 85,5 persen. Sedangkan sisanya sekitar 15 persen dipengaruhi oleh hal lain di luar model.

10.3.2. Uji Signifikansi Model Secara Serempak.

Selanjutnya diuji pengaruh *Unconditional Grants* dan PDRB secara bersama-sama terhadap belanja daerah, baik pada tahun 2006 maupun tahun 2005.

Hipotesis Pengaruh *Unconditional Grant* tahun berjalan (Ug_{2006}) terhadap Belanja Daerah tahun berjalan ($Belanja_{2006}$) lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto tahun berjalan ($PDRB_{2006}$) terhadap Belanja Daerah tahun berjalan ($Belanja_{2006}$) diuji. Dari hasil uji secara serempak antara variabel *unconditional grants* dan PDRB untuk tahun 2006 terhadap belanja daerah tahun 2006 didapatkan hasil sebagaimana tabel berikut.

Tabel
Hasil Uji Model Tanpa Lag

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1E+010	2E+010		,657	,512		
	ug2	2,133	,083	,945	33,716	,000	,658	1,525
	pdrb2	-,001	,004	-,006	-,212	,832	,656	1,525

a. Dependent Variable: belanja2

Dari tabel output di atas terlihat bahwa nilai signifikansi untuk konstanta, variabel *unconditional grants*, dan variabel PDRB tahun 2006 masing-masing sebesar 0,512; 0,000; dan 0,832. Dengan melihat nilai signifikansi ini, maka dapat diambil keputusan bahwa variabel *unconditional grants* berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (nilai signifikansi di bawah 0,05 pada tingkat $\alpha=5\%$). Sedangkan variabel PDRB dan konstanta tidak berpengaruh secara signifikan, karena nilai signifikansinya di atas 0,05 pada tingkat $\alpha=5\%$.

Hal yang mirip diperlihatkan pada model regresi yang menggunakan data *unconditional grants* dan PDRB tahun 2005, dimana variabel PDRB memang tetap tidak berpengaruh terhadap belanja daerah karena nilai signifikansinya sebesar 0,672

pada $\alpha=5\%$ (di atas 0,05). Sedangkan variabel *unconditional grants* dan konstanta masing-masing berpengaruh secara statistik terhadap belanja daerah karena nilainya 0,000 sebagai terlihat dalam tabel berikut.

Tabel
Hasil Uji Model dengan Lag

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2E+011	2E+010		7,043	,000		
	ug1	2,751	,147	,868	18,660	,000	,563	1,776
	pdrb1	-,004	,008	-,020	-,424	,672	,563	1,776

a. Dependent Variable: belanja2

Lampiran 11: Output Hasil Uji Persamaan dengan Menggunakan Variabel PAD (Data *Cross-Sectional*)

Data awal menunjukkan adanya varian yang tidak konstan atau berubah-ubah residual dari persamaan yang diuji sehingga dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas yang mengakibatkan varian dari koefisien cenderung akan besar. Akibat dari varian koefisien regresi yang lebih besar mengandung konsekuensi yaitu interval kepercayaan semakin lebar sehingga uji hipotesis baik Uji-t maupun Uji-F akan terpengaruh yang mengakibatkan uji hipotesis menjadi tidak akurat yang pada akhirnya akan membawa dampak pada ketidakakuratan kesimpulan yang diambil.

Hal penting, pada data *cross-section*, adanya heteroskedasticitas sangat sulit untuk dihindari, artinya, hampir semua data *cross-section* pasti terjadi heteroskedastisitas. Padahal asumsi klasik mensyaratkan adanya homoscedastisitas. Untuk mengatasinya, dalam penelitian ini dilakukan transformasi dalam bentuk logaritma natural (Ln). Selain itu, asumsi autokorelasi dalam data *cross-sectional* terkadang dianggap tidak terlalu penting karena uji autokorelasi lebih ditekankan pada data *time series*.

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln Bel_t = \alpha + \beta_1 \ln UG_t + \beta_2 \ln PAD_t + \beta_3 \ln UG_{t-1} + \beta_4 \ln PAD_{t-1} + \varepsilon$$

dimana:

$\ln BEL_t$ = Logaritma natural dari belanja daerah tahun ke-t .

$\ln UG_t$ = Logaritma natural dari Unconditional Grants tahun ke-t.

$\ln pad_t$ = Logaritma natural dari Pendapatan Asli Daerah tahun ke-t

$\ln UG_{t-1}$ = Logaritma natural dari Unconditional Grants tahun ke-t-1.

$\ln pad_{t-1}$ = Logaritma natural dari Pendapatan Asli Daerah tahun ke-t-1.

Model regresi yang dihasilkan

Setelah uji korelasi signifikan dan berbagai uji asumsi terpenuhi pada data belanja daerah, *Unconditional Grants*, dan PAD, maka langkah selanjutnya adalah melihat pola hubungan antara *Unconditional Grants* dan PAD terhadap belanja

daerah. Untuk itu dilakukan pengolahan data menggunakan regresi linier berganda data tahun 2005, 2006, dan gabungan 2005 dan 2006 sesuai dengan hipotesis yang telah disusun.

a. Uji Kesesuaian Model (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengukur kebaikan atau kesesuaian suatu model persamaan regresi. Koefisien determinasi (*Goodness of Fit*), yang dinotasikan dengan R^2 menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam model regresi.

Untuk regresi yang memakai data Belanja, UG, dan PAD tahun 2006 (tanpa lag):

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,947 ^a	,897	,895	,14698	1,482

a. Predictors: (Constant), Inpad2, InUG2

b. Dependent Variable: InBEL2

Untuk regresi yang memakai data Belanja 2006, UG 2005, dan PAD 2005 (dengan lag):

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,965 ^a	,931	,930	,12000	1,295

a. Predictors: (Constant), Inpad1, InUG1

b. Dependent Variable: InBEL2

Dari tabel di atas terlihat bahwa R^2 untuk data tahun 2006 sebesar 0,897 dan R^2 untuk data tahun 2005 sebesar 0,931. R^2 yang sebesar 0,897 pada tahun 2006 berarti bahwa variabel ug dan PAD memberikan pengaruh sebesar 89,7 persen terhadap total belanja daerah. Hal yang sama juga terdapat pada data tahun 2005 yang berarti bahwa belanja daerah pada tahun 2005 dijelaskan oleh ug dan PAD sebesar 93,1 persen. Sedangkan sisanya sekitar 15 persen dipengaruhi oleh hal-hal lain.

Besarnya nilai R^2 yang lebih besar dari 90 persen ini menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan sudah sangat bagus (fit).

b. Uji Signifikansi Model Secara Bersama-sama.

Model Regresi tanpa Lag:

$$BID_t = \beta_0 + \beta_1 UnG_t + \beta_2 PAD_t + \epsilon$$

Ha: Ada pengaruh antara *Unconditional Grant* tahun berjalan (UnG_t) dan PAD tahun berjalan (PAD_t) terhadap Belanja Daerah tahun berjalan (BID_t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.282	.428		-.614	.541		
	lnUG2	1,022	,034	,938	29,901	,000	,936	1,068
	lnpad2	,009	,009	,033	1,037	,302	,936	1,068

a. Dependent Variable: lnBEL2

Dari hasil uji secara bersama-sama antara variabel ug dan PAD tahun 2006 didapatkan hasil sebagaimana tabel di atas. Dari tabel output di atas terlihat bahwa nilai signifikansi untuk konstanta, variabel ug , dan PAD tahun 2006 masing-masing sebesar 0,541, 0,000 dan 0,302. Dengan melihat nilai signifikansi ini, maka dapat diambil keputusan bahwa variabel ug berpengaruh positif terhadap belanja daerah (nilai signifikansi di bawah 0,05). Sedangkan variabel PAD dan konstanta tidak berpengaruh secara signifikan, karena nilai signifikansinya di atas 0,05. namun demikian, satu hal yang harus dipahami adalah bahwa walaupun secara statistik PAD ini tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, namun bukan berarti bahwa PAD ini tidak ada pengaruhnya. Kemungkinan ini disebabkan karena memang proporsi PAD sangat kecil apabila dibandingkan dengan total belanja daerah. Sehingga model persamaan regresi yang dihasilkan menjadi;

$$\text{Ln Belanja 2006} = 1,002 \cdot \text{LnUG2006}$$

Model Regresi dengan menggunakan Lag:

$$BID_t = \beta_0 + \beta_1 UnG_{t-1} + \beta_2 PAD_{t-1} + \varepsilon$$

Ha: Ada pengaruh antara *Unconditional Grant* tahun sebelumnya (UnG_{t-1}) dan PAD tahun sebelumnya (PAD_{t-1}) terhadap Belanja Daerah tahun berjalan (BID_t)

Untuk tahun 2005

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	,970	,309		3,138	,002		
	lnUG1	,960	,026	,960	37,191	,000	,922	1,085
	lnpad1	,005	,008	,017	,643	,521	,922	1,085

a. Dependent Variable: lnBEL2

Hal yang mirip diperlihatkan pada model regresi yang menggunakan data UG dan PAD tahun 2005, dimana variabel PAD memang tetap tidak berpengaruh terhadap belanja daerah karena nilai signifikansinya sebesar 0,521 (di atas 0,05). Sedangkan variabel UG dan konstanta masing-masing berpengaruh secara statistik terhadap belanja daerah karena nilainya 0,000 dan 0,002 dengan demikian, persamaan regresi yang terbentuk menjadi:

$$\text{Ln Belanja 2006} = 0,970 + 0,960 \cdot \text{LnUG 2005}$$

Contoh interpretasi (dalam persen);

Jika UG naik 1 persen, maka, maka belanja naik 0,96 persen.

Lampiran 12: Output Hasil Uji Persamaan dengan Menggunakan Variabel PAD (Data Panel)

Langkah awal dimulai dengan melakukan run data untuk semua model: *common*, *fixed*, dan *random*.

1. Commons Effects

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/05/10 Time: 00:00

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

Cross-sections included: 115

Total pool (balanced) observations: 460

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD?	-0.002902	0.004363	-0.665141	0.5063
UNCONDITIONAL?	1.205844	0.008426	143.1132	0.0000
R-squared	0.917100	Mean dependent var		378345.2
Adjusted R-squared	0.916919	S.D. dependent var		207481.0
S.E. of regression	59803.81	Akaike info criterion		24.83986
Sum squared resid	1.64E+12	Schwarz criterion		24.85783
Log likelihood	-5711.169	Durbin-Watson stat		0.616707

2. Fixed Effect (Asumsi struktur var-cov residual homoskedastik)

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/05/10 Time: 00:01

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

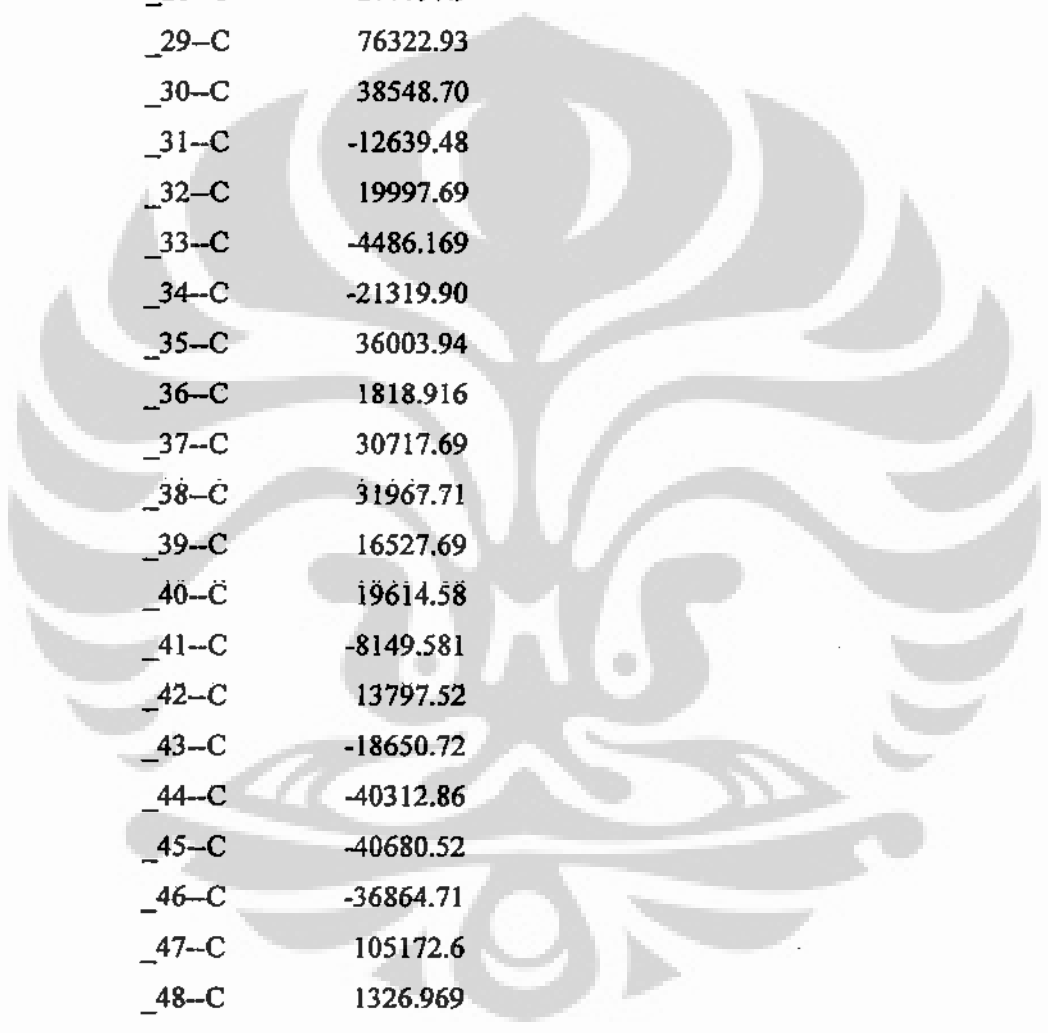
(lanjutan)

Cross-sections included: 115

Total pool (balanced) observations: 460

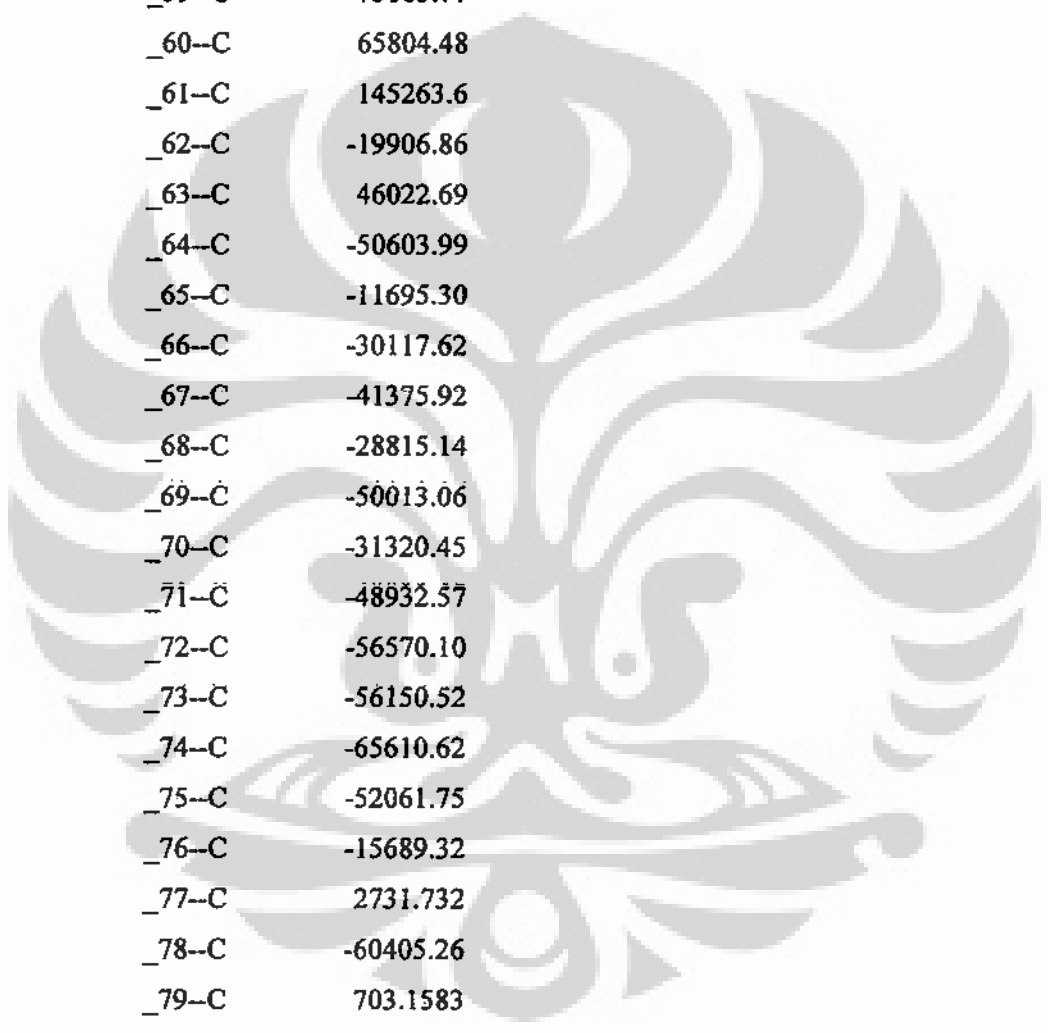
Variable	Coefficien			Prob.
	t	Std. Error	t-Statistic	
C	83335.91	7050.832	11.81930	0.0000
PAD?	0.005254	0.003478	1.510649	0.1318
UNCONDITIONAL?	0.939816	0.022451	41.86028	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_1-C	-58020.94			
_2-C	-49794.21			
_3-C	-40510.28			
_4-C	-49155.49			
_5-C	-38339.29			
_6-C	-35739.23			
_7-C	-27389.36			
_8-C	-38704.69			
_9-C	-29242.64			
_10-C	-46035.41			
_11-C	-71060.91			
_12-C	41507.32			
_13-C	-54777.49			
_14-C	-80742.71			
_15-C	-21401.42			
_16-C	-30183.38			
_17-C	-25823.21			
_18-C	90549.05			
_19-C	-62271.52			
_20-C	127080.7			
_21-C	150386.2			
_22-C	199194.2			

(lanjutan)



_23-C	14493.07
_24-C	36545.20
_25-C	63355.17
_26-C	84928.43
_27-C	2141.775
_28-C	277797.9
_29-C	76322.93
_30-C	38548.70
_31-C	-12639.48
_32-C	19997.69
_33-C	-4486.169
_34-C	-21319.90
_35-C	36003.94
_36-C	1818.916
_37-C	30717.69
_38-C	31967.71
_39-C	16527.69
_40-C	19614.58
_41-C	-8149.581
_42-C	13797.52
_43-C	-18650.72
_44-C	-40312.86
_45-C	-40680.52
_46-C	-36864.71
_47-C	105172.6
_48-C	1326.969
_49-C	-3795.275
_50-C	50337.15
_51-C	50832.60
_52-C	-11584.18
_53-C	3749.479

(lanjutan)



_54--C	-17989.34
_55--C	67031.42
_56--C	-14977.98
_57--C	39785.68
_58--C	6070.806
_59--C	-75185.77
_60--C	65804.48
_61--C	145263.6
_62--C	-19906.86
_63--C	46022.69
_64--C	-50603.99
_65--C	-11695.30
_66--C	-30117.62
_67--C	-41375.92
_68--C	-28815.14
_69--C	-50013.06
_70--C	-31320.45
_71--C	-48932.57
_72--C	-56570.10
_73--C	-56150.52
_74--C	-65610.62
_75--C	-52061.75
_76--C	-15689.32
_77--C	2731.732
_78--C	-60405.26
_79--C	703.1583
_80--C	-45248.74
_81--C	-56195.98
_82--C	-50153.38
_83--C	-29770.01
_84--C	-68613.87

(lanjutan)

_85-C	-40741.62
_86-C	117320.3
_87-C	295165.5
_88-C	-25971.57
_89-C	-13671.39
_90-C	993.1994
_91-C	-22980.05
_92-C	30439.40
_93-C	64238.24
_94-C	-12272.15
_95-C	-15051.62
_96-C	-30259.93
_97-C	-5653.851
_98-C	-25664.64
_99-C	-33544.13
_100-C	-57586.87
_101-C	-39315.27
_102-C	-63965.44
_103-C	-27258.47
_104-C	-41320.97
_105-C	-52425.91
_106-C	-30535.62
_107-C	-53374.87
_108-C	-71569.53
_109-C	-30310.88
_110-C	-484.8528
_111-C	60236.58
_112-C	42660.30
_113-C	143801.6
_114-C	-52726.37
_115-C	-31218.92

(lanjutan)

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.980493	Mean dependent var	378345.2
Adjusted R-squared	0.973896	S.D. dependent var	207481.0
S.E. of regression	33522.14	Akaike info criterion	23.89300
Sum squared resid	3.85E+11	Schwarz criterion	24.94377
Log likelihood	-5378.390	F-statistic	148.6251
Durbin-Watson stat	1,842130	Prob(F-statistic)	0,000000

3. Random Effect

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/05/10 Time: 00:02

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

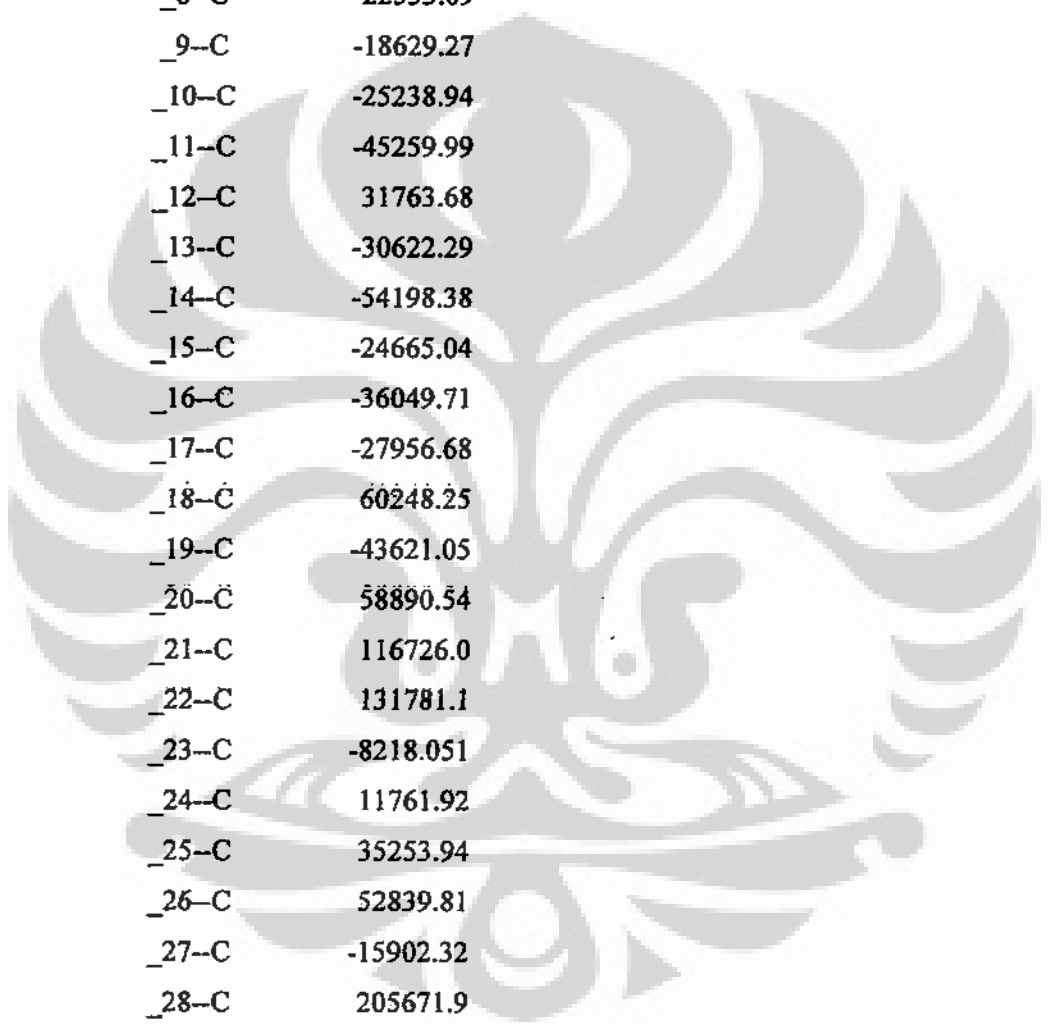
Cross-sections included: 115

Total pool (balanced) observations: 460

Swamy and Arora estimator of component variances

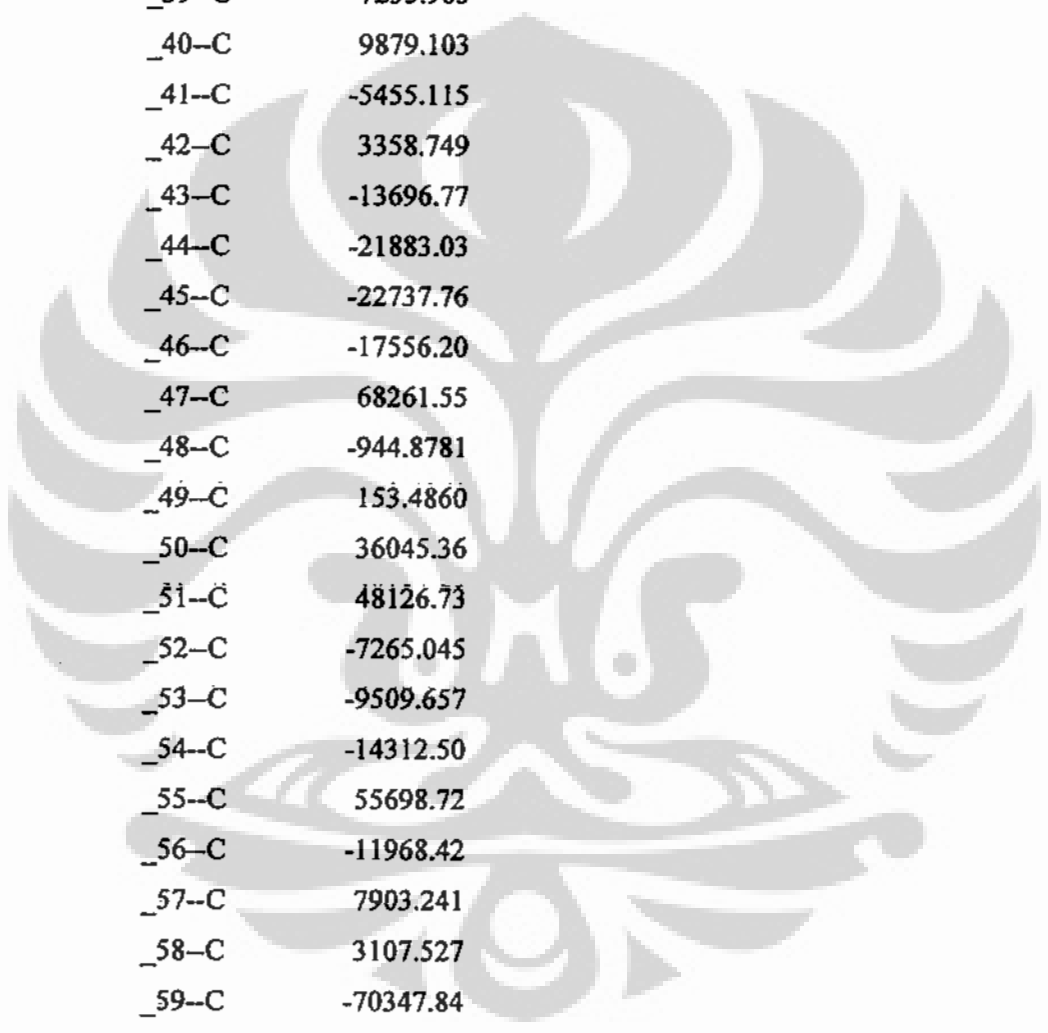
Variable	Coefficien			Prob.
	t	Std. Error	t-Statistic	
C	51545.78	7229.870	7.129558	0.0000
PAD?	0.002418	0.003292	0.734546	0.4630
UNCONDITIONAL?	1.042876	0.018349	56.83561	0.0000
Random Effects				
(Cross)				
_1-C	-42700.72			
_2-C	-32265.54			

(lanjutan)



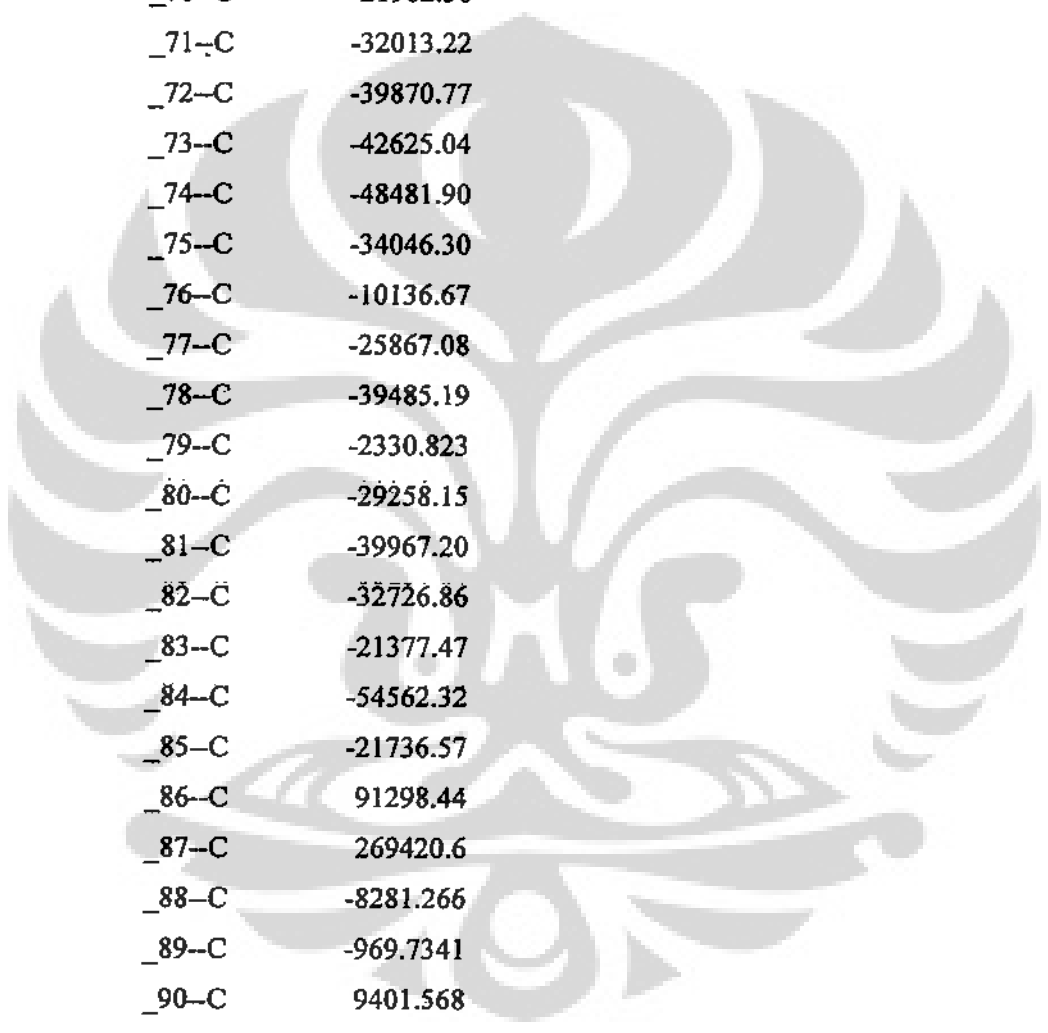
_3-C	-42394.17
_4-C	-33886.36
_5-C	-27836.59
_6-C	-24763.75
_7-C	-18732.43
_8-C	-22533.09
_9-C	-18629.27
_10-C	-25238.94
_11-C	-45259.99
_12-C	31763.68
_13-C	-30622.29
_14-C	-54198.38
_15-C	-24665.04
_16-C	-36049.71
_17-C	-27956.68
_18-C	60248.25
_19-C	-43621.05
_20-C	58890.54
_21-C	116726.0
_22-C	131781.1
_23-C	-8218.051
_24-C	11761.92
_25-C	35253.94
_26-C	52839.81
_27-C	-15902.32
_28-C	205671.9
_29-C	44788.84
_30-C	30030.23
_31-C	-6410.134
_32-C	4290.961
_33-C	-432.0215

(lanjutan)



_34-C	-33293.28
_35-C	30478.72
_36-C	-7739.551
_37-C	24597.05
_38-C	29611.09
_39-C	7235.905
_40-C	9879.103
_41-C	-5455.115
_42-C	3358.749
_43-C	-13696.77
_44-C	-21883.03
_45-C	-22737.76
_46-C	-17556.20
_47-C	68261.55
_48-C	-944.8781
_49-C	153.4860
_50-C	36045.36
_51-C	48126.73
_52-C	-7265.045
_53-C	-9509.657
_54-C	-14312.50
_55-C	55698.72
_56-C	-11968.42
_57-C	7903.241
_58-C	3107.527
_59-C	-70347.84
_60-C	44862.87
_61-C	109184.8
_62-C	-13430.99
_63-C	42070.69
_64-C	-44205.05

(lanjutan)



_65-C	-11215.15
_66-C	-22749.89
_67-C	-37271.37
_68-C	-15317.64
_69-C	-34751.95
_70-C	-21982.36
_71-C	-32013.22
_72-C	-39870.77
_73-C	-42625.04
_74-C	-48481.90
_75-C	-34046.30
_76-C	-10136.67
_77-C	-25867.08
_78-C	-39485.19
_79-C	-2330.823
_80-C	-29258.15
_81-C	-39967.20
_82-C	-32726.86
_83-C	-21377.47
_84-C	-54562.32
_85-C	-21736.57
_86-C	91298.44
_87-C	269420.6
_88-C	-8281.266
_89-C	-969.7341
_90-C	9401.568
_91-C	-7243.586
_92-C	31466.18
_93-C	61214.11
_94-C	-2883.191
_95-C	-11752.97

(lanjutan)

_96--C	-26576.09
_97--C	-9934.068
_98--C	-18395.68
_99--C	-20561.01
_100--C	-34636.97
_101--C	-24609.40
_102--C	-50991.44
_103--C	-18999.07
_104--C	-25611.28
_105--C	-36431.49
_106--C	-21954.14
_107--C	-36275.32
_108--C	-55743.45
_109--C	-19577.14
_110--C	-2567.424
_111--C	39515.69
_112--C	50018.90
_113--C	117209.1
_114--C	-31553.89
_115--C	-14182.14

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	46043.77	0.6536
Idiosyncratic random	33522.14	0.3464

Weighted Statistics

R-squared	0.873597	Mean dependent var	129418.8
Adjusted R-squared	0.873044	S.D. dependent var	100227.5
S.E. of regression	35712.02	Sum squared resid	5.83E+11
F-statistic	1579.207	Durbin-Watson stat	1.316030

(lanjutan)

Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.904315	Mean dependent var	378345.2
Sum squared resid	1.89E+12	Durbin-Watson stat	0.405692

PENGUJIAN FIXED MODEL (DENGAN UJI F)

Digunakan untuk mengetahui model yang lebih sesuai untuk digunakan, antara *fixed effect* dan *common effects*.

Ho : $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$ (*intersept* adalah sama) → model common

Ha : sekurang-kurangnya ada 1 *intersept* yang berbeda → model fixed

Uji Signifikansi Fixed effects

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: untitle

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.744458	(114,343)	0.0000
Cross-section Chi-square	664.356182	114	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Panel Least Squares

Date: 01/05/10 Time: 00:03

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

Cross-sections included: 115

Total pool (balanced) observations: 460

Variable	Coefficien		t-Statistic	Prob.
	t	Std. Error		
C	6571.440	6010.392	1.093346	0.2748
PAD?	-0,002032	0,004434	-0,458267	0,6470
UNCONDITIONAL?	1.188908	0.017632	67.42725	0.0000
R-squared	0.917316	Mean dependent var		378345.2 (lanjutan)
Adjusted R-squared	0.916955	S.D. dependent var		207481.0
S.E. of regression	59791.05	Akaike info criterion		24.84160
Sum squared resid	1.63E+12	Schwarz criterion		24.86854
Log likelihood	-5710.568	F-statistic		2535.047
Durbin-Watson stat	0.597603	Prob(F-statistic)		0.000000

hasil terlihat kalo nilai F signifikan 0,000, yang berarti tolak H_0 , atau fixed model.

Uji Hausman

Karena pada uji F ternyata model *fixed effects* lebih tepat untuk digunakan, maka langkah selanjutnya adalah menguji model mana yang lebih tepat digunakan, yaitu antara *fixed effects* dengan *random effects*.

H_0 : Model random effects lebih baik dari pada model fixed effects

H_a : Model fixed effects lebih baik dari pada model model random effects

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: untitle

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.		Prob.
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	
Cross-section random	63.658330	2	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD?	0.005254	0.002418	0.000001	0.0115
UNCONDITIONAL?	0.939816	1.042876	0.000167	0.0000

(lanjutan)

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Panel Least Squares

Date: 01/05/10 Time: 00:03

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

Cross-sections included: 115

Total pool (balanced) observations: 460

Variable	Coefficien			Prob.
	t	Std. Error	t-Statistic	
C	83335.91	7050.832	11.81930	0.0000
PAD?	0.005254	0.003478	1.510649	0.1318
UNCONDITIONAL?	0.939816	0.022451	41.86028	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.980493	Mean dependent var	378345.2
Adjusted R-squared	0.973896	S.D. dependent var	207481.0
S.E. of regression	33522.14	Akaike info criterion	23.89300
Sum squared resid	3.85E+11	Schwarz criterion	24.94377
Log likelihood	-5378.390	F-statistic	148.6251
Durbin-Watson stat	1.842130	Prob(F-statistic)	0.000000

Keputusan : Tolak H_0

Kesimpulan : Dengan tingkat kepercayaan sebesar 99%, *intersept* untuk setiap kabupaten tidak sama, yang artinya model *fixed effects* lebih tepat digunakan daripada *common effects*

Atau

dari hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai signifikansi Chi Square 0,000 yang berarti bahwa hipotesis nul akan ditolak, yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah metode *fixed effects*.

Dapat disimpulkan bahwa dengan pengujian formal maupun cara informal (apriori), model yang terpilih adalah *fixed effects*

PENGUJIAN STRUKTUR VARIAN-COVARIAN RESIDUAL ASUMSI HOMOSKEDASTIK

Pada pengujian sebelumnya, yaitu uji F dan uji hausman, ternyata model yang tepat digunakan adalah *fixed effects*. Selanjutnya, perlu dicari tahu struktur varian-covarian dari residual bersifat homoskedastik atau heterokedastik. Dengan mengetahui struktur var-cov residual maka akan dapat diketahui diharapkan akan didapat estimator yang terbaik.

$H_0 : \sigma^2 = \sigma^2$ (yaitu struktur homokedastik)

$H_a : \sigma^2 = \sigma^2$ (yaitu struktur heterokedastik)

Nilai uji LM 229,00. Sedangkan nilai Chi Square df 114 sekitar 43,773 (karena df maximal 30, didekati dengan df 30). Karena nilai uji LM lebih besar dari Chi Square, maka struktur varian-covarian bersifat heteroskedastik. Keputusan yang diambil adalah tolak H_0 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, dapat kita simpulkan bahwa model estimasi *fixed effects* dengan struktur varian-kovarian heteroskedastik lebih baik daripada model estimasi *fixed effects* dengan struktur homoskedastik

Setelah mengetahui struktur var-cov residual bersifat heteroskedastik, pengujian iberikutnya adalah mengetahui apakah selain bersifat heteroskedastik, struktur var-cov residual mengandung cross sectional correlation atau tidak. Tetapi dikarenakan kondisi data yaitu jumlah cross section lebih besar dari pada time series, maka pengujian tersebut tidak

dapat dilakukan. Sehingga model akhir yang digunakan adalah fixed effect dengan struktur var-cov residual bersifat heterokedastik.

Model Fixed effects dengan struktur var-cov adalah heterokedastik

Dependent Variable: BELANJA?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 01/05/10 Time: 00:07

(lanjutan)

Sample: 2003 2006

Included observations: 4

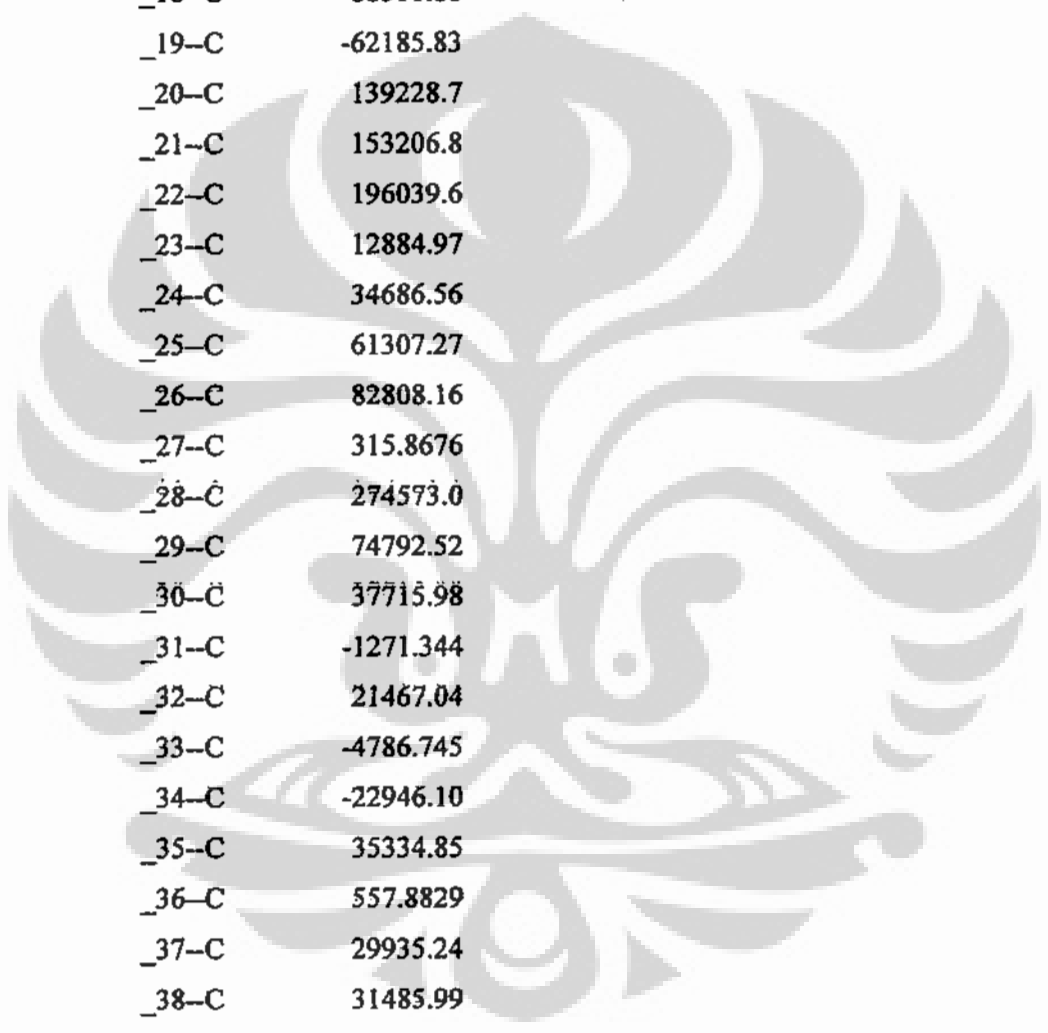
Cross-sections included: 115

Total pool (balanced) observations: 460

Linear estimation after one-step weighting matrix

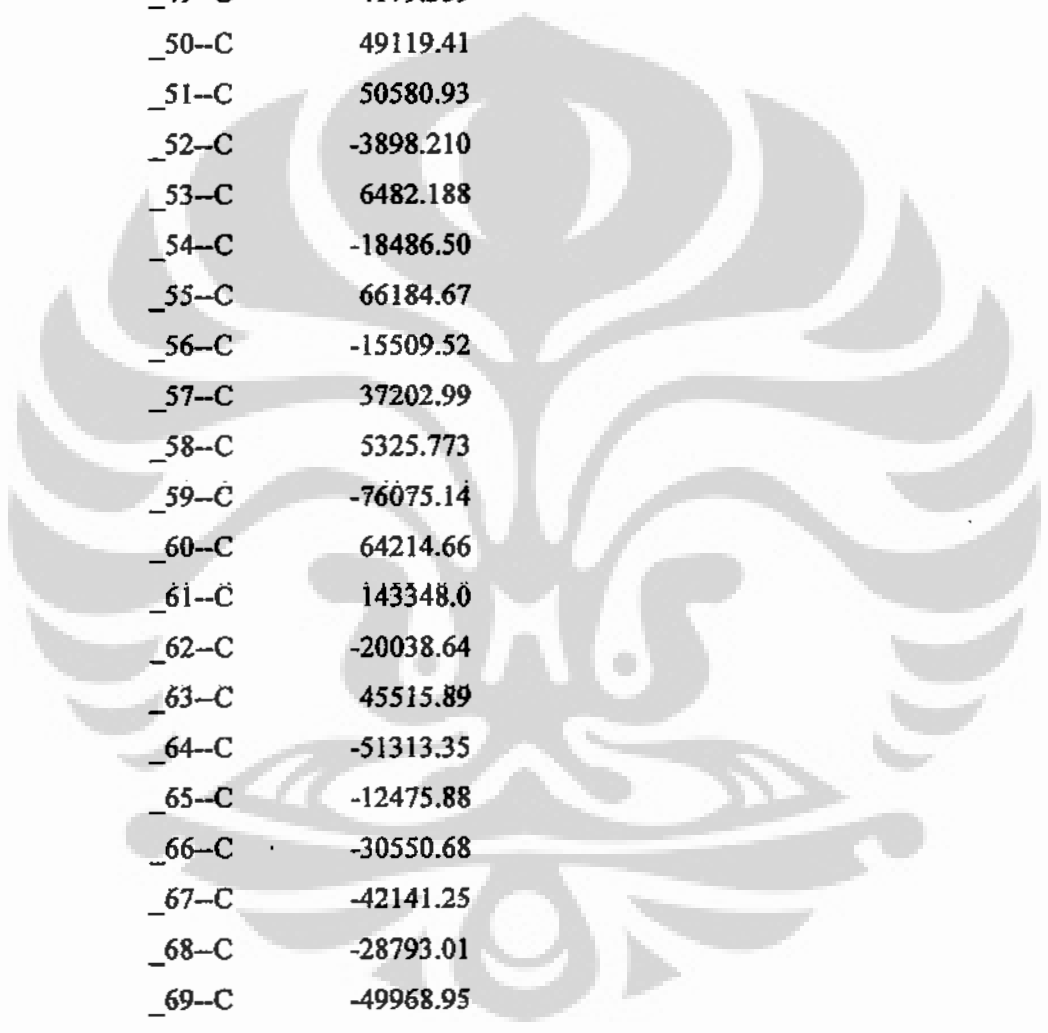
Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	82094.28	2717.146	30.21342	0.0000
PAD?	0.000419	0.002009	0.208743	0.8348
UNCONDITIONAL?	0.946321	0.008736	108.3203	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_1-C	-58142.22			
_2-C	-49682.77			
_3-C	-41595.41			
_4-C	-46132.04			
_5-C	-38048.33			
_6-C	-35956.18			
_7-C	-27721.43			
_8-C	-38573.62			
_9-C	-29432.53			
_10-C	-45615.72			
_11-C	-70504.73			
_12-C	40584.20			

(lanjutan)



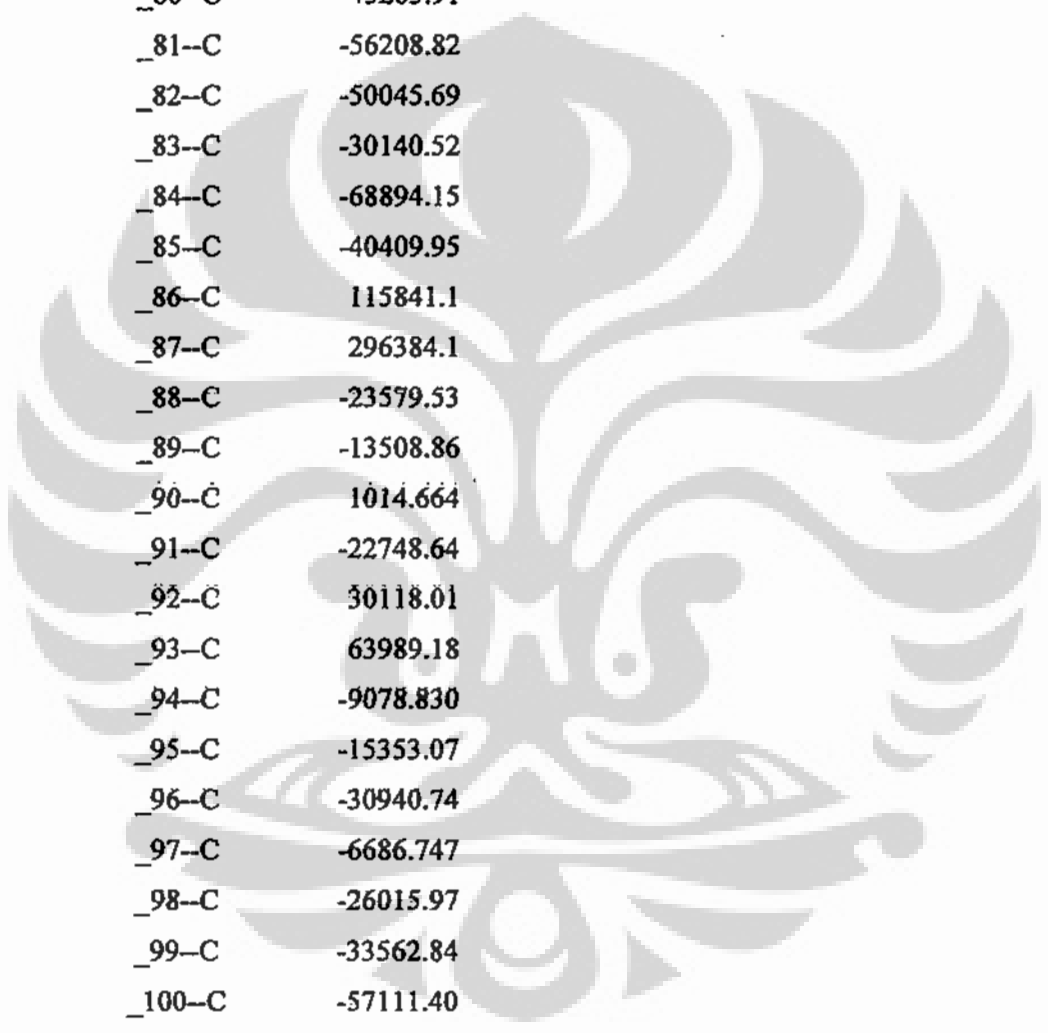
_13-C	-54102.20
_14-C	-80223.77
_15-C	-22468.41
_16-C	-31503.42
_17-C	-26856.60
_18-C	88511.88
_19-C	-62185.83
_20-C	139228.7
_21-C	153206.8
_22-C	196039.6
_23-C	12884.97
_24-C	34686.56
_25-C	61307.27
_26-C	82808.16
_27-C	315.8676
_28-C	274573.0
_29-C	74792.52
_30-C	37715.98
_31-C	-1271.344
_32-C	21467.04
_33-C	-4786.745
_34-C	-22946.10
_35-C	35334.85
_36-C	557.8829
_37-C	29935.24
_38-C	31485.99
_39-C	15417.28
_40-C	18537.44
_41-C	-8560.578
_42-C	12567.63
_43-C	-19043.36

(lanjutan)



_44--C	-39959.46
_45--C	-40391.85
_46--C	-36455.10
_47--C	102896.8
_48--C	6465.082
_49--C	-4179.359
_50--C	49119.41
_51--C	50580.93
_52--C	-3898.210
_53--C	6482.188
_54--C	-18486.50
_55--C	66184.67
_56--C	-15509.52
_57--C	37202.99
_58--C	5325.773
_59--C	-76075.14
_60--C	64214.66
_61--C	143348.0
_62--C	-20038.64
_63--C	45515.89
_64--C	-51313.35
_65--C	-12475.88
_66--C	-30550.68
_67--C	-42141.25
_68--C	-28793.01
_69--C	-49968.95
_70--C	-30170.00
_71--C	-48173.68
_72--C	-56562.03
_73--C	-56321.77
_74--C	-65610.91

(lanjutan)



_75-C	-51883.29
_76-C	-16104.32
_77-C	166.5119
_78-C	-58472.40
_79-C	-225.2207
_80-C	-45203.91
_81-C	-56208.82
_82-C	-50045.69
_83-C	-30140.52
_84-C	-68894.15
_85-C	-40409.95
_86-C	115841.1
_87-C	296384.1
_88-C	-23579.53
_89-C	-13508.86
_90-C	1014.664
_91-C	-22748.64
_92-C	30118.01
_93-C	63989.18
_94-C	-9078.830
_95-C	-15353.07
_96-C	-30940.74
_97-C	-6686.747
_98-C	-26015.97
_99-C	-33562.84
_100-C	-57111.40
_101-C	-39120.80
_102-C	-64273.83
_103-C	-27612.95
_104-C	-41265.06
_105-C	-52431.54

(lanjutan)

_106--C	-30868.40		
_107--C	-53301.66		
_108--C	-71367.92		
_109--C	-30517.75		
_110--C	-356.7957		
_111--C	59910.80		
_112--C	43171.49		
_113--C	142893.3		
_114--C	-52132.84		
_115--C	-30931.42		
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Weighted Statistics			
R-squared	0.993927	Mean dependent var	762764.6
Adjusted R-squared	0.991873	S.D. dependent var	577661.2
S.E. of regression	33241.35	Sum squared resid	3.79E+11
F-statistic	483.9087	Durbin-Watson stat	2.220936
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.993788	Mean dependent var	378345.2
Sum squared resid	3.88E+11	Durbin-Watson stat	1.847053

Model akhir yang terbentuk (fixed effects struktur var-cov residual heteroskedastik)

Formulanya;

Belanja $i = 82.094,28 + 0,946321$ UGi.

(karena PAD tidak signifikan, nilainya 0,8348 di atas 0,05)